



Katalog: 4102002
ISSN 2086-2369

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

2023

VOLUME 18, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4102002
ISSN 2086-2369

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2023

VOLUME 18, 2024

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2023

VOLUME 18, 2024

Katalog: 4102002

ISSN: 2086-2369

Nomor Publikasi: 07300.24008

Ukuran Buku: 17,6 cm × 25 cm

Jumlah Halaman: xxii+169 Halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penyunting:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Pembuat Kover:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

shutterstock.com, canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2023
Volume 18, 2024

Pengarah

Moh. Edy Mahmud

Penanggung Jawab

Muchammad Romzi

Penyunting

Wisnu Winardi · Yoyo Karyono

Penulis Naskah

Dimas Hari Santoso · Farhan Anshari Arsyi · Alvina Clarissa
I Nyoman Setiawan · Ety Kurniati · Syukriyah Delyana

Pengolah Data

Adi Nugroho

Penata Letak

Adi Nugroho · Syukriyah Delyana · Dimas Hari Santoso

Kata Pengantar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selama periode 2021-2023, IPM Indonesia tumbuh positif dan semakin cepat, seiring dengan pemulihan ekonomi yang berdampak terhadap pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dan komponen lain yang juga tumbuh secara konsisten.

Perkembangan IPM di tingkat daerah juga menunjukkan hal yang semakin baik, bahkan sebagian diantaranya mengalami percepatan. Disparitas IPM di tingkat daerah juga cenderung mengecil karena daerah dengan capaian IPM yang lebih rendah cenderung tumbuh lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain.

Pertumbuhan IPM 2023 menurut gender juga menunjukkan gambaran yang semakin baik, IPM laki-laki dan perempuan tumbuh positif. IPM perempuan tumbuh lebih cepat dibandingkan laki-laki sehingga memperkecil selisih antara keduanya dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Data dan informasi pembangunan manusia dan gender tersaji dalam publikasi ini secara lengkap. Ketersediaan data dan informasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam menyusun strategi dan mengupayakan capaian pembangunan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga upaya yang telah dibangun bersama ini membawa manfaat untuk mendukung perwujudan manusia Indonesia yang memiliki pilihan lebih luas, semakin berkualitas, produktif, berdaya saing, dan sejahtera.

Jakarta, Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti

Daftar Isi

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2023
Volume 18, 2024

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xxi
Ringkasan.....	1
Bab 1 Pengukuran Pembangunan Manusia	5
1.1 Memahami Konsep Pembangunan Manusia	5
1.2 Mengukur Pembangunan Manusia	10
1.3 Indeks Pembangunan Manusia dan Perencanaan Pembangunan	14
Bab 2 Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Nasional	19
2.1 Pembangunan Manusia Indonesia 2023.....	19
2.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat.....	20
2.3 Capaian Dimensi Pengetahuan	21
2.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak	22
Bab 3 Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Daerah	27
3.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi	27
3.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia 2020 dan 2023	29
3.3 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota..	31
3.4 Perkembangan Disparitas Capaian Pembangunan Manusia Antarwilayah	33
Bab 4 Capaian Gender dalam Pembangunan Manusia	39
4.1 Peran Gender dalam Pembangunan	39
4.2 Capaian Dimensi Pembangunan Manusia menurut Gender.....	40
4.3 Capaian IPG Indonesia di Tingkat Nasional dan Provinsi	46
4.4 Hubungan antara IPG dengan IPM	48
Bab 5 Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi	53
Daftar Pustaka	125
Catatan Teknis.....	129
Lampiran	137

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
2.1 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Indonesia, 2020–2023	22
3.1 Capaian IPM Sepuluh Provinsi dengan Pertumbuhan IPM Tercepat, 2023	28
3.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota dari Tahun 2022 ke 2023	32
5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Indonesia, 2023	54
5.2 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Indonesia, 2022 dan 2023	55
5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Aceh, 2023	56
5.4 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Aceh, 2022 dan 2023	57
5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Utara, 2023	58
5.6 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Utara, 2022 dan 2023	59
5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Barat, 2023	60
5.8 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Barat, 2022 dan 2023	61
5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Riau, 2023	62
5.10 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Riau, 2022 dan 2023	63
5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jambi, 2023	64
5.12 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jambi, 2022 dan 2023	65
5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Selatan, 2023	66
5.14 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Selatan, 2022 dan 2023	67
5.15 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bengkulu, 2023	68
5.16 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bengkulu, 2022 dan 2023	69
5.17 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Lampung, 2023	70
5.18 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Lampung, 2022 dan 2023	71
5.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2023	72
5.20 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Bangka Belitung, 2022 dan 2023	73

Tabel	Halaman
5.21 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Riau, 2023.....	74
5.22 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Riau, 2022 dan 2023.....	75
5.23 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM DKI Jakarta, 2023.....	76
5.24 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia DKI Jakarta, 2022 dan 2023	77
5.25 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Barat, 2023	78
5.26 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Barat, 2022 dan 2023.....	79
5.27 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Tengah, 2023.....	80
5.28 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Tengah, 2022 dan 2023	81
5.29 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM D.I. Yogyakarta, 2023.....	82
5.30 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta, 2022 dan 2023	83
5.31 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Timur, 2023	84
5.32 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Timur, 2022 dan 2023.....	85
5.33 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Banten, 2023	86
5.34 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Banten, 2022 dan 2023.....	87
5.35 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bali, 2023	88
5.36 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bali, 2022 dan 2023.....	89
5.37 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Barat, 2023	90
5.38 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat, 2022 dan 2023.....	91
5.39 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Timur, 2023	92
5.40 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur, 2022 dan 2023	93
5.41 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Barat, 2023.....	94
5.42 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2022 dan 2023.....	95
5.43 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Tengah, 2023.....	96
5.44 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, 2022 dan 2023	97
5.45 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Selatan, 2023	98
5.46 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan, 2022 dan 2023	99

Tabel	Halaman
5.47 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Timur, 2023	100
5.48 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2022 dan 2023	101
5.49 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Utara, 2023	102
5.50 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Utara, 2022 dan 2023	103
5.51 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Utara, 2023	104
5.52 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Utara, 2022 dan 2023	105
5.53 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tengah, 2023	106
5.54 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah, 2022 dan 2023	107
5.55 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Selatan, 2023	108
5.56 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan, 2022 dan 2023	109
5.57 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tenggara, 2023	110
5.58 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara, 2022 dan 2023	111
5.59 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2023	112
5.60 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Gorontalo, 2022 dan 2023	113
5.61 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Barat, 2023	114
5.62 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, 2022 dan 2023	115
5.63 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku, 2023	116
5.64 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku, 2022 dan 2023	117
5.65 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku Utara, 2023	118
5.66 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku Utara, 2022 dan 2023	119
5.67 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat, 2023	120
5.68 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat, 2022 dan 2023	121
5.69 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua, 2023	122
5.70 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua, 2022 dan 2023	123

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1.1 Penduduk Indonesia menurut Generasi, 2020	6
1.2 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP	12
2.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2020–2023.....	19
2.2 Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup saat Lahir Indonesia, 2020–2023	20
2.3 Capaian dan Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, 2020–2023 ...	21
2.4 Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2020–2023	22
2.5 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan di Indonesia, 2020–2023.....	23
3.1 Capaian IPM menurut Provinsi, 2023	27
3.2 Peta Pembangunan Manusia Provinsi, 2020 dan 2023.....	30
3.3 Persentase Provinsi menurut Status Pembangunan Manusia, 2020–2023	31
3.4 Persentase Kabupaten/Kota menurut Status Pembangunan Manusia, 2020–2023	32
3.5 Perkembangan Disparitas IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020–2023	34
3.6 Disparitas IPM Antarkabupaten/kota dalam Provinsi, 2023	34
4.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan di Indonesia (persen), 2021–2023.....	40
4.2 Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2023	41
4.3 Selisih Umur Harapan Hidup saat Lahir Antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (tahun), 2023	41
4.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (tahun), 2010–2023	43
4.5 Selisih Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (tahun), 2023	43
4.6 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2023	44
4.7 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (tahun), 2010–2023.....	44
4.8 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah per tahun), 2010–2023	45
4.9 Perbedaan Pengeluaran Riil per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (ribu rupiah per tahun), 2023	46
4.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia, 2020–2023	46
4.11 Disparitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tingkat Provinsi, 2020–2023	47
4.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi, 2023.....	47

Gambar	Halaman
4.13 Disparitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Tingkat Kabupaten/ Kota, 2023	48
4.14 Pembagian Kuadran Provinsi berdasarkan Nilai IPG dan IPM, 2023	49
5.1 Indeks Indikator Komponen IPM Indonesia, 2023	54
5.2 Perkembangan IPM Indonesia, 2020–2023	54
5.3 Pertumbuhan IPM Indonesia, 2021–2023	54
5.4 Disparitas dan Capaian IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2020–2023	54
5.5 Jumlah Provinsi di Indonesia menurut Status IPM, 2020 dan 2023	54
5.6 Indeks Indikator Komponen IPM Aceh, 2023	56
5.7 Perkembangan IPM Aceh, 2020–2023	56
5.8 Pertumbuhan IPM Aceh, 2021–2023	56
5.9 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Aceh, 2020–2023	56
5.10 Jumlah Kabupaten/Kota di Aceh menurut Status IPM, 2020 dan 2023	56
5.11 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Utara, 2023	58
5.12 Perkembangan IPM Sumatera Utara, 2020–2023	58
5.13 Pertumbuhan IPM Sumatera Utara, 2021–2023	58
5.14 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Utara, 2020–2023	58
5.15 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023	58
5.16 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Barat, 2023	60
5.17 Perkembangan IPM Sumatera Barat, 2020–2023	60
5.18 Pertumbuhan IPM Sumatera Barat, 2021–2023	60
5.19 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Barat, 2020–2023	60
5.20 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023	60
5.21 Indeks Indikator Komponen IPM Riau, 2023	62
5.22 Perkembangan IPM Riau, 2020–2023	62
5.23 Pertumbuhan IPM Riau, 2021–2023	62
5.24 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Riau, 2020–2023	62
5.25 Jumlah Kabupaten/Kota di Riau menurut Status IPM, 2020 dan 2023	62
5.26 Indeks Indikator Komponen IPM Jambi, 2023	64
5.27 Perkembangan IPM Jambi, 2020–2023	64
5.28 Pertumbuhan IPM Jambi, 2021–2023	64

5.29	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jambi, 2020–2023	64
5.30	Jumlah Kabupaten/Kota di Jambi menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	64
5.31	Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Selatan, 2023	66
5.32	Perkembangan IPM Sumatera Selatan, 2020–2023	66
5.33	Pertumbuhan IPM Sumatera Selatan, 2021–2023.....	66
5.34	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Selatan, 2020–2023	66
5.35	Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	66
5.36	Indeks Indikator Komponen IPM Bengkulu, 2023	68
5.37	Perkembangan IPM Bengkulu, 2020–2023	68
5.38	Pertumbuhan IPM Bengkulu, 2021–2023.....	68
5.39	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bengkulu, 2020–2023	68
5.40	Jumlah Kabupaten/Kota di Bengkulu menurut Status IPM, 2020 dan 2023	68
5.41	Indeks Indikator Komponen IPM Lampung, 2023.....	70
5.42	Perkembangan IPM Lampung, 2020–2023.....	70
5.43	Pertumbuhan IPM Lampung, 2021–2023	70
5.44	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Lampung, 2020–2023	70
5.45	Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung menurut Status IPM, 2020 dan 2023	70
5.46	Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2023	72
5.47	Perkembangan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2020–2023	72
5.48	Pertumbuhan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2021–2023	72
5.49	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Bangka Belitung, 2020–2023.....	72
5.50	Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	72
5.51	Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Riau, 2023.....	74
5.52	Perkembangan IPM Kepulauan Riau, 2020–2023.....	74
5.53	Pertumbuhan IPM Kepulauan Riau, 2021–2023	74
5.54	Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Riau, 2020–2023	74
5.55	Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	74
5.56	Indeks Indikator Komponen IPM DKI Jakarta, 2023.....	76
5.57	Perkembangan IPM DKI Jakarta, 2020–2023.....	76

Gambar	Halaman
5.58 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta, 2021–2023	76
5.59 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di DKI Jakarta, 2020–2023.....	76
5.60 Jumlah Kabupaten/Kota di DKI Jakarta menurut Status IPM, 2020 dan 2023 ..	76
5.61 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Barat, 2023.....	78
5.62 Perkembangan IPM Jawa Barat, 2020–2023.....	78
5.63 Pertumbuhan IPM Jawa Barat, 2021–2023	78
5.64 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat, 2020–2023.....	78
5.65 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023 ..	78
5.66 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Tengah, 2023	80
5.67 Perkembangan IPM Jawa Tengah, 2020–2023	80
5.68 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah, 2021–2023	80
5.69 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah, 2020–2023	80
5.70 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023	80
5.71 Indeks Indikator Komponen IPM D.I. Yogyakarta, 2023.....	82
5.72 Perkembangan IPM D.I. Yogyakarta, 2020–2023	82
5.73 Pertumbuhan IPM D.I. Yogyakarta, 2021–2023	82
5.74 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di D.I. Yogyakarta, 2020–2023.....	82
5.75 Jumlah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	82
5.76 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Timur, 2023.....	84
5.77 Perkembangan IPM Jawa Timur, 2020–2023.....	84
5.78 Pertumbuhan IPM Jawa Timur, 2021–2023	84
5.79 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur, 2020–2023.....	84
5.80 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023 ..	84
5.81 Indeks Indikator Komponen IPM Banten, 2023.....	86
5.82 Perkembangan IPM Banten, 2020–2023.....	86
5.83 Pertumbuhan IPM Banten, 2021–2023	86
5.84 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Banten, 2020–2023	86
5.85 Jumlah Kabupaten/Kota di Banten menurut Status IPM, 2020 dan 2023	86
5.86 Indeks Indikator Komponen IPM Bali, 2023.....	88
5.87 Perkembangan IPM Bali, 2020–2023.....	88
5.88 Pertumbuhan IPM Bali, 2021–2023	88

Gambar	Halaman
5.89 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2020–2023	88
5.90 Jumlah Kabupaten/Kota di Bali menurut Status IPM, 2020 dan 2023	88
5.91 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Barat, 2023	90
5.92 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Barat, 2020–2023	90
5.93 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Barat, 2021–2023	90
5.94 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Barat, 2020–2023	90
5.95 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023	90
5.96 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Timur, 2023	92
5.97 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur, 2020–2023	92
5.98 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Timur, 2021–2023	92
5.99 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Timur, 2020–2023	92
5.100 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023	92
5.101 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Barat, 2023	94
5.102 Perkembangan IPM Kalimantan Barat, 2020–2023	94
5.103 Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat, 2021–2023	94
5.104 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Barat, 2020–2023	94
5.105 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023	94
5.106 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Tengah, 2023	96
5.107 Perkembangan IPM Kalimantan Tengah, 2020–2023	96
5.108 Pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah, 2021–2023	96
5.109 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Tengah, 2020–2023	96
5.110 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023	96
5.111 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Selatan, 2023	98
5.112 Perkembangan IPM Kalimantan Selatan, 2020–2023	98
5.113 Pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan, 2021–2023	98
5.114 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Selatan, 2020–2023	98
5.115 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023	98

Gambar	Halaman
5.116 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Timur, 2023	100
5.117 Perkembangan IPM Kalimantan Timur, 2020–2023	100
5.118 Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2021–2023	100
5.119 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2020–2023	100
5.120 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	100
5.121 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Utara, 2023	102
5.122 Perkembangan IPM Kalimantan Utara, 2020–2023	102
5.123 Pertumbuhan IPM Kalimantan Utara, 2021–2023.....	102
5.124 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Utara, 2020–2023	102
5.125 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	102
5.126 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Utara, 2023.....	104
5.127 Perkembangan IPM Sulawesi Utara, 2020–2023.....	104
5.128 Pertumbuhan IPM Sulawesi Utara, 2021–2023	104
5.129 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Utara, 2020–2023.....	104
5.130 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	104
5.131 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tengah, 2023.....	106
5.132 Perkembangan IPM Sulawesi Tengah, 2020–2023.....	106
5.133 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah, 2021–2023.....	106
5.134 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tengah, 2020–2023	106
5.135 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	106
5.136 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Selatan, 2023.....	108
5.137 Perkembangan IPM Sulawesi Selatan, 2020–2023.....	108
5.138 Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2021–2023	108
5.139 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Selatan, 2020–2023	108
5.140 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	108
5.141 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tenggara, 2023	110
5.142 Perkembangan IPM Sulawesi Tenggara, 2020–2023	110
5.143 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tenggara, 2021–2023.....	110

Gambar	Halaman
5.144 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tenggara, 2020–2023	110
5.145 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	110
5.146 Indeks Indikator Komponen IPM Gorontalo, 2023.....	112
5.147 Perkembangan IPM Gorontalo, 2020–2023.....	112
5.148 Pertumbuhan IPM Gorontalo, 2021–2023	112
5.149 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Gorontalo, 2020–2023	112
5.150 Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo menurut Status IPM, 2020 dan 2023 ...	112
5.151 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Barat, 2023	114
5.152 Perkembangan IPM Sulawesi Barat, 2020–2023	114
5.153 Pertumbuhan IPM Sulawesi Barat, 2021–2023.....	114
5.154 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Barat, 2020–2023	114
5.155 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	114
5.156 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku, 2023	116
5.157 Perkembangan IPM Maluku, 2020–2023	116
5.158 Pertumbuhan IPM Maluku, 2021–2023.....	116
5.159 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku, 2020–2023	116
5.160 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	116
5.161 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku Utara, 2023	118
5.162 Perkembangan IPM Maluku Utara, 2020–2023	118
5.163 Pertumbuhan IPM Maluku Utara, 2021–2023.....	118
5.164 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku Utara, 2020–2023	118
5.165 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023.....	118
5.166 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat, 2023	120
5.167 Perkembangan IPM Papua Barat, 2020–2023	120
5.168 Pertumbuhan IPM Papua Barat, 2021–2023.....	120
5.169 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat, 2020–2023	120
5.170 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023	120
5.171 Indeks Indikator Komponen IPM Papua, 2023.....	122
5.172 Perkembangan IPM Papua, 2020–2023	122

Gambar	Halaman
5.173 Pertumbuhan IPM Papua, 2021–2023	122
5.174 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua, 2020–2023.....	122
5.175 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua menurut Status IPM, 2020 dan 2023	122

<https://www.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2023.....	129
2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	130
3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2020–2023	146
4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/ Kota, 2020–2023	147
5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara Anggota ASEAN, 1990–2022.....	160

<https://www.bps.go.id>

Ringkasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77). IPM 2023 tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM meningkat, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,10 tahun menjadi 13,15 tahun. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,69 tahun pada 2023 menjadi 8,77 tahun pada 2023. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan meningkat 420 ribu rupiah (3,66 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2022-2023, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun, dari 72,81 pada 2020 menjadi 74,39 pada 2023.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,56 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada 2020, UHH Indonesia adalah 73,37 tahun dan pada 2023 mencapai 73,93 tahun. Kedua indikator pembentuk dimensi pengetahuan juga terus meningkat. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Indonesia rata-rata meningkat 0,43 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,13 persen per tahun. Sementara itu, untuk dimensi standar hidup layak, indikator pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Indonesia meningkat sebesar 2,09 persen per tahun selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan mencapai Rp11.013.000, meningkat menjadi Rp11.899.000 pada tahun 2023.

Pada 2023, status pembangunan manusia di Kalimantan Barat meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,47. Selain Kalimantan Barat, dalam kurun waktu 2020-2023 peningkatan status dari “sedang” ke “tinggi” juga dicapai Gorontalo dan Maluku Utara sejak tahun 2022. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 28 provinsi, status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 4 provinsi, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sementara itu, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Pengukuran Pembangunan Manusia

1



Pengukuran Pembangunan Manusia

1.1 Memahami Konsep Pembangunan Manusia

1.1.1 Pembangunan Manusia dalam Konteks Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dan pembangunan manusia adalah dua konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain, kedua konsep ini memiliki tujuan serta fokus yang saling melengkapi. Pembangunan nasional adalah segala upaya yang terencana dan berkelanjutan dari suatu negara untuk mencapai kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, seperti misalnya kondisi ekonomi, sosial, politik, keamanan, budaya, dan infrastruktur (UNDP, 2022). Dengan kata lain, pembangunan nasional bertujuan untuk membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan suatu negara secara holistik. Sementara itu, fokus dari pembangunan manusia adalah pengembangan potensi individu dan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan nasional. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menjamin ketersediaan akses kepada kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial.

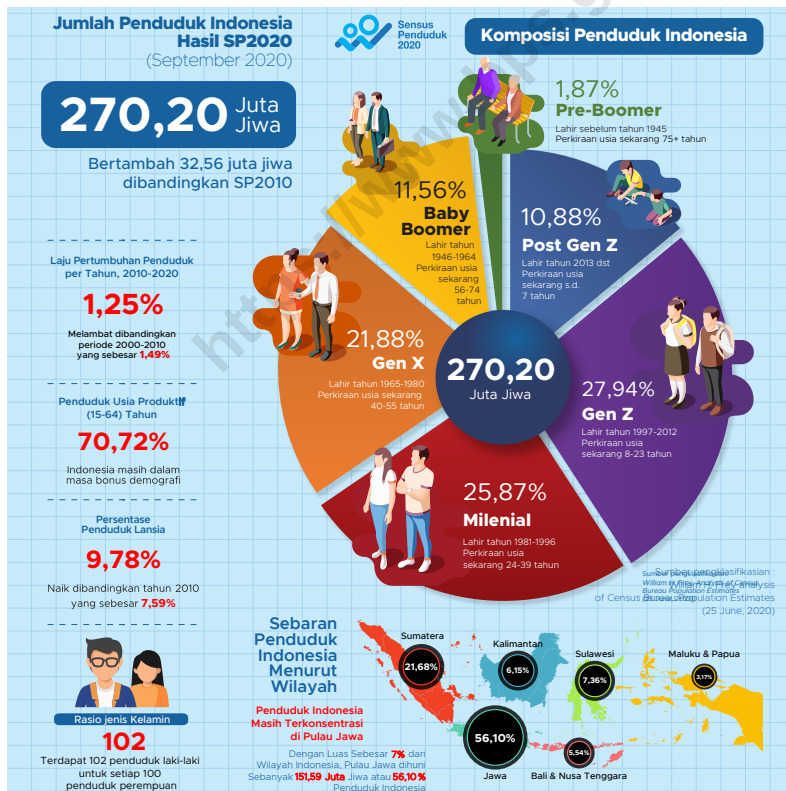
Pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesejahteraan (Haq, 1995). Pembangunan nasional yang sukses tidak dapat dicapai tanpa pembangunan manusia yang kuat. Sebaliknya, proses pembangunan manusia akan terhambat tanpa pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, kualitas manusia menjadi kunci penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya, meningkatkan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan layanan kesehatan secara nasional juga dapat meningkatkan harapan hidup masyarakat serta tingkat produktivitas pekerja.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk terus meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan dan program pemerintah yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar untuk membangun sekolah-sekolah baru, menaikkan kualitas serta kesejahteraan guru, serta menyediakan beasiswa yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31. Pada tahun 2014, pemerintah juga secara resmi meluncurkan program jaminan kesehatan nasional yang memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai implementasi Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, menyadari bahwa tulang punggung pembangunan adalah

infrastruktur yang baik, pemerintah secara intensif membangun berbagai infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Barack Obama, Presiden AS periode 2009-2017, pada sebuah kegiatan di New York (2013) pernah menyampaikan bahwa investasi di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak hanya sekedar pengeluaran pemerintah semata namun juga sebuah investasi demi kemakmuran bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Apa yang diupayakan pemerintah ditujukan untuk kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.1.2 Pembangunan Manusia dan Generasi Muda Indonesia

Manusia atau individu di suatu negara adalah aktor utama pembangunan nasional. Kualitas pembangunan manusia sangat menentukan seberapa cepat pembangunan nasional berhasil mencapai tujuan. Bagi Indonesia, generasi muda adalah kelompok yang paling memiliki peran dalam pembangunan nasional. Karakter generasi muda yang adaptif dengan perubahan sangat cocok dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin cepat dewasa ini. Selain itu, bonus demografi yang saat ini sedang dinikmati oleh Indonesia, memberikan keuntungan melalui besarnya jumlah penduduk usia produktif yang sebagian besar diantaranya ialah generasi muda.



Sumber: Sensus Penduduk (2020)

Gambar 1.1 Penduduk Indonesia menurut Generasi, 2020

Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah generasi muda, yaitu mereka yang saat ini berusia di bawah 40 tahun. Para generasi yang dianggap sebagai generasi penerus bangsa ini terbagi ke dalam tiga



kelompok generasi yaitu milenial, *Gen Z*, dan *post Gen Z*. Generasi milenial adalah mereka yang lahir pada kisaran tahun 1981 s.d. 1996, sementara *Gen Z* lahir pada tahun 1997-2012.

Dengan jumlahnya yang relatif besar, jika kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dijaga dengan baik, maka generasi muda menawarkan keuntungan yang sangat besar bagi pembangunan nasional. Inilah yang disebut oleh banyak kalangan sebagai bonus demografi. Wongboonsin (2003) dalam jurnalnya yang berjudul "*Comparative migration policies in the ESCAP region*" mengatakan bahwa bonus demografi adalah sebuah masa yang memberikan keuntungan ekonomis akibat dari menurunnya rasio ketergantungan penduduk sebagai hasil fertilitas dalam jangka panjang. Ketika jumlah penduduk usia produktif berlimpah, rasio ketergantungan akan menurun hingga kurang dari 50, sehingga peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi.

Ada beberapa hal yang dapat ditawarkan oleh generasi muda sebagai aktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia. Pertama, generasi muda dapat tampil sebagai agen perubahan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kofi Anan (2022) dalam *The 58th Munich Security Conference (MSC)*, bahwa generasi muda harus menjadi lokomotif perubahan serta inovasi global. Memperkuat generasi muda berarti menciptakan agen-agen perubahan untuk pembangunan. Sebagai agen perubahan, generasi muda memiliki potensi untuk membawa perubahan bagi bangsa dan berperan dalam berbagai bidang. Kedua, generasi muda adalah motor penggerak kemajuan bangsa. Usia produktif memungkinkan generasi muda untuk berkiper di segala bidang dan memiliki andil besar dalam roda pembangunan. Hasil dari serangkaian proses tersebut adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Ketiga, generasi muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa. Generasi yang tampil sebagai tulang punggung kemajuan bangsa dan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Sehingga penting untuk dapat menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada mereka agar identitas bangsa Indonesia tetap terjaga dan tidak luntur oleh gerusan perkembangan zaman dan pengaruh budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

1.1.3 Hakikat Konsep Pembangunan Manusia

Memahami konsep pembangunan manusia memerlukan kedalaman pemahaman tentang konsep pembangunan dan manusia itu sendiri. Langkah pertama untuk memahami konsep pembangunan manusia dapat ditempuh melalui penjabaran peran dan keterkaitan manusia dalam pembangunan. Peran manusia dalam pembangunan nasional adalah sentral. Peran aktif manusia memungkinkan pembangunan nasional

dapat berjalan dengan optimal. Manusia adalah subjek sekaligus objek pembangunan. Artinya, manusia adalah pelaksana (subjek) dan juga penerima (objek) manfaat dari pembangunan nasional. Keberadaan manusia akan memunculkan kreativitas dan inovasi yang jika ditambah dengan kerja keras akan menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di berbagai bidang. Manusia berperan besar dalam merumuskan ide, gagasan, dan strategi pembangunan, serta mengimplementasikannya dalam berbagai program dan kegiatan.

Dalam tulisannya yang berjudul *“Development as Capability Expansion”*, Amartya Sen (1990) menyatakan bahwa pembangunan manusia berarti perluasan pilihan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut antara lain mencakup makanan, pendidikan, kesehatan, dan hak-hak dasar lainnya. Jika kebutuhan dasarnya dipenuhi, maka manusia dapat secara bebas berkontribusi bagi pembangunan nasional. Sehingga, dalam konsep pembangunan manusia, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat hanya dilihat dari kemajuan ekonomi saja, namun kebebasan individu dalam mendapatkan sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan.

Setelah memahami hakikat manusia dalam pembangunan, berikutnya perlu dipahami tiga faktor yang mendasari peran manusia dalam pembangunan yaitu: berumur panjang dan sehat; berpendidikan; dan sejahtera atau hidup dalam standar yang layak. Sebagai objek sentral sekaligus subjek utama pembangunan, sudah selayaknya manusia mendapatkan perhatian pada tiga aspek dasar yaitu: i) umur panjang dan hidup sehat; ii) pengetahuan; dan iii) standar hidup layak. Setiap manusia berhak memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas sehingga “memiliki kesempatan” atau “memiliki keluasaan pilihan” untuk hidup panjang (umur) dan sehat. Setiap manusia juga berhak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas sehingga “memiliki kesempatan” atau “memiliki keluasaan pilihan” untuk mengembangkan pengetahuan. Terakhir, setiap manusia berhak memiliki akses ke air bersih, sanitasi, perumahan, dan makanan sehingga “memiliki keluasaan pilihan” untuk dapat hidup dengan layak. Inilah makna sebenarnya dari “Pembangunan Manusia sebagai Perluasan Pilihan”. Seperti halnya yang disampaikan oleh UNDP dalam *“Human Development Report”* edisi tahun 2015, bahwa pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara umum dengan cara memperluas pilihan mereka dalam mengakses sumber daya dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara baik dan layak (UNDP, 2015). Hakikat pembangunan manusia sebagai perluasan pilihan inilah yang pada akhirnya mendasari Amartya Sen dan Mahbub UI Haq pada tahun 1990 melahirkan ide pengukuran pembangunan manusia melalui publikasi *“Human Development Report 1990”*.

Konsep pembangunan manusia telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu, dimulai dari pandangan kuno hingga pemikiran modern saat ini. Pada pandangan kuno, pembangunan manusia hanya berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan fisik manusia, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Hal tersebut memiliki tujuan agar manusia dapat bertahan dan melanjutkan hidupnya (Sen, 1999). Pada abad pertengahan, pembangunan manusia lebih terfokus pada kemajuan spiritual dan moral dengan tujuan mencapai kehidupan yang lebih baik di akhirat (Alatas, 1977). Pada abad pencerahan, pembangunan manusia lebih condong pada kemajuan intelektual dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan rasional. Pada abad modern



awal, pembangunan manusia mulai terpusat pada kemajuan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup manusia (Sen, 1999). Namun, saat ini pembangunan manusia semakin berkembang dan memperluas pandangannya untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup manusia dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, akses terhadap sumber daya, dan keadilan sosial (UNDP, 2022).

Perkembangan pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat. Revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam cara manusia hidup dan bekerja, menjadi salah satu perubahan paling penting dalam sejarah pembangunan manusia. Perang dunia serta konflik internasional lainnya juga memengaruhi perkembangan pembangunan manusia karena dampaknya terhadap kerusakan infrastruktur, hilangnya sumber daya, dan kerugian manusia lainnya. Sementara itu, globalisasi tidak hanya membuka pasar dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar antara negara-negara maju dan berkembang. Perubahan iklim juga berperan besar dalam perkembangan pembangunan manusia karena menimbulkan ancaman-ancaman yang mengarah pada keberlangsungan hidup manusia terutama dalam konteks sumber daya alam, kesehatan manusia, dan keamanan pangan (Beneria, 2016).

Sejarah pembangunan manusia menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi perkembangannya baik yang berdampak positif maupun negatif pada pembangunan manusia. Sementara itu, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, konflik, dan pengungsi masih menjadi penghambat dalam mencapai pembangunan manusia. Namun, tantangan tersebut tidak serta merta menutup pemanfaatan peluang seperti kemajuan teknologi dan kesadaran manusia.

1.1.4 Tantangan dalam Pembangunan Manusia

Dari penjabaran di atas terungkap jelas bahwa konsep pembangunan manusia adalah konsep yang kompleks dan abstrak sehingga perlu upaya keras untuk memahami dan mencapainya. Meskipun demikian, pembangunan manusia tetaplah sangat penting bagi pencapaian pembangunan nasional. Tantangan dalam pembangunan manusia sudah hadir sejak dalam tahap memahami pembangunan manusia itu sendiri dan berlanjut ke tantangan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pengukuran pembangunan manusia menjadi kompleks karena pada dasarnya konsep pembangunan manusia itu sendiri yang juga abstrak dan cukup sulit dimengerti tanpa memahami filosofi dasarnya. Inklusivitas pemahaman pembangunan manusia di tengah masyarakat adalah hal yang krusial mengingat pemahaman di tengah masyarakat dapat bervariasi tergantung dari interpretasi baik secara ideologi maupun politik yang berkembang saat ini. Hal ini dipersulit dengan beragamnya tingkat literasi masyarakat yang dipicu oleh level pendidikan dan juga kesadaran individu yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Tantangan lainnya dalam pembangunan manusia tidak lain adalah segala aspek yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Kendala bahasa yang menjadi jembatan literatur terkait pembangunan manusia, faktor budaya yang mencirikan pribadi tiap masyarakat, serta paradigma pembangunan yang terlalu fokus pada capaian ekonomi dapat menjadi tantangan upaya pembangunan manusia.

Seluruh tantangan pembangunan manusia tersebut sangat penting untuk dapat diatasi agar dapat mewujudkan perkembangan manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang terkait dengan pembangunan manusia sejatinya dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pembangunan manusia juga harus menyentuh sejumlah masalah sosial, seperti pengentasan kemiskinan, ketimpangan gender, serta perlindungan hak asasi manusia, karena peningkatan kesejahteraan manusia tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, namun juga pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses kesehatan dan pendidikan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat (UNDP, 2018).

Pada tahun 1987, *United Nations* (UN) melaksanakan *the World Commission on Environment and Development* (WCED) yang melahirkan laporan yang dikenal dengan judul *"Our Common Future"*. Dalam laporan tersebut untuk pertama kalinya pembangunan berkelanjutan diperkenalkan sebagai proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (UN, 1987). Salah satu perhatian utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah fokus terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan. Demikian pula dalam pembangunan manusia yang dalam prosesnya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya untuk mencapai pembangunan manusia harus diletakkan di tengah-tengah keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi (UNDP, 2018). Oleh karena itu, pembangunan manusia yang berkelanjutan harus mampu mengatasi tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, kekeringan, dan bencana alam, seraya mempromosikan kesetaraan, inklusi, dan keadilan sosial.

1.2 Mengukur Pembangunan Manusia

1.2.1 Kompleksitas Sudut Pandang dalam Pengukuran Pembangunan

Pembangunan nasional adalah akumulasi dari sebuah perjalanan panjang suatu negara dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup bangsanya. Oleh karena itu, ukuran pembangunan nasional menjadi sebuah konsep yang kompleks dan multidimensi, dapat menggunakan berbagai macam paradigma pengukuran yang sangat tergantung pada

sudut pandang yang digunakan. Salah satu sudut pandang yang umum digunakan adalah paradigma ekonomi yang melihat kemajuan pembangunan dari kemajuan ekonomi wilayah tersebut. Paradigma ini berusaha menjelaskan keberhasilan pembangunan melalui akumulasi *output* yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Salah satu ekonom yang mendukung hal ini adalah Michael Todaro, ahli ekonomi pembangunan dari Amerika Serikat. Dalam jurnalnya, Todaro (2005) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur sebuah keberhasilan pembangunan suatu negara.

Capaian perekonomian sudah sejak lama menarik perhatian dunia dan menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Publik menjadi sangat antusias terhadap bahasan-bahasan mengenai tingkat pendapatan, akumulasi modal, dan juga pertumbuhan ekonomi karena dianggap sebagai representasi yang tepat untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi saksi semakin cepatnya laju pembangunan, hadirilah fenomena-fenomena sosial yang tidak selalu berjalan beriringan dengan fenomena ekonomi. Contohnya, suatu negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat pengangguran dan kemiskinan juga masih relatif tinggi.

Menurut Todaro & Smith (2012), paradigma pembangunan yang berkembang pada periode generasi "*baby boomer*" hanya merefleksikan fenomena ekonomi. Hal ini merepresentasikan bahwa tingkat perekonomian suatu negara yang tinggi tidak selalu memberikan jaminan terhadap tercapainya kesejahteraan sosial di kalangan masyarakat. Pendapatan nasional yang besar dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak selalu berdampak positif terhadap masyarakat secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan tidak mampu menjelaskan aspek penting lain yang juga berkembang seiring dengan pembangunan, seperti misalnya masalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

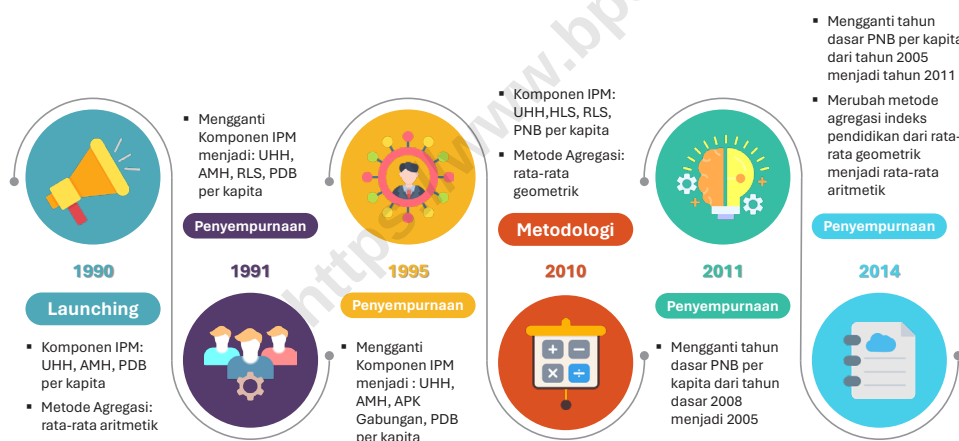
Ketidakmampuan konsep pembangunan melalui kacamata perekonomian untuk menjelaskan fenomena sosial dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya mendorong munculnya sudut pandang lain dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Paradigma yang baru menuntut terjelaskannya aspek-aspek sosial, seperti pendidikan dan kesehatan di tengah masyarakat. Berdasarkan pembahasan di bagian sebelumnya, maka konsep pembangunan manusia menjadi kandidat tepat dalam menjawab kebutuhan untuk menjelaskan fenomena sosial-ekonomi yang turut berkembang seiring dengan pembangunan nasional. Tujuan utama pembangunan dari sudut pandang pembangunan manusia adalah terciptanya lingkungan yang nyaman untuk masyarakat, yaitu lingkungan yang mendukung masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan produktif (UNDP, 1990).

1.2.2 Upaya Mengukur Pembangunan Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan dari manusia itu sendiri. Esensi utama dari pilihan tersebut adalah agar manusia dapat hidup sehat dan panjang umur, mendapatkan pengetahuan, serta memiliki akses terhadap peluang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak (UNDP, 1990). Jika ketiga hal ini tidak

terpenuhi maka banyak peluang dalam aspek kehidupan manusia lainnya yang tidak kunjung terbuka. Berangkat dari konsep dasar tersebut, UNDP menyusun sebuah indeks sebagai ukuran dari capaian pembangunan manusia. Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dijelaskan dan diperkenalkan sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP pertama kali memperkenalkan IPM pada tahun 1990 melalui publikasi "*Human Development Report 1990*".

Sejak saat itu, UNDP menghitung IPM dan merilisnya dalam publikasi dengan judul yang sama setiap tahunnya untuk menjelaskan bagaimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan dalam aspek penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman, pengukuran IPM pun terus diupayakan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Hingga saat ini tercatat sudah terjadi lima kali perubahan untuk perbaikan terhadap penghitungan IPM sejak pertama kali dirilis tahun 1990. Perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 2010, dimana UNDP mengadopsi sejumlah indikator baru penyusun IPM. Sementara, pada tahun 2014, UNDP sedikit melakukan modifikasi pada metode penghitungan IPM. Gambar 1.2 di bawah ini menampilkan secara kronologis, sejarah penghitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP dari waktu ke waktu.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia oleh UNDP

Layaknya manusia yang selalu berkembang, begitu pula pengukuran IPM mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Telah terjadi lima kali penyempurnaan terhadap IPM sejak tahun 1990. Penyempurnaan signifikan terjadi pada tahun 2010 yang utamanya terkait indikator-indikator penyusun IPM, sedangkan tahun 2014 terjadi perubahan metode penghitungan. Jika digambarkan, penyempurnaan pengukuran IPM dapat diamati melalui Gambar 1.2 di atas.

1.2.3 Indikator Pembangunan Manusia di Indonesia

Indonesia mengadopsi pengukuran pembangunan manusia UNDP dengan menghitung indeks yang sama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM yang dihitung secara mandiri oleh Indonesia juga terdiri atas tiga dimensi seperti halnya yang disusun oleh UNDP, yaitu:

- i. dimensi umur panjang dan hidup sehat;
- ii. dimensi pengetahuan ; dan
- iii. dimensi standar hidup yang layak.

Indonesia selalu mengikuti setiap perubahan yang dilakukan oleh UNDP terkait penghitungan IPM, baik itu perubahan pada indikator yang digunakan maupun perubahan metodologi penghitungan. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, metodologi penghitungan IPM Indonesia telah menggunakan metodologi terakhir yang disempurnakan oleh UNDP pada tahun 2014 sebagai standar penghitungan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indeks komposit. Artinya, indeks ini disusun dari sejumlah indikator untuk kemudian dihitung menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan IPM. Dari tiga dimensi IPM di atas, terdapat empat indikator penyusun. Dalam menentukan indikator yang digunakan, IPM Indonesia juga mengacu pada standar UNDP. Meski demikian, terdapat perbedaan pada salah satu indikator dimensi standar hidup yang layak yang dipicu oleh ketiadaan indikator yang sama dengan yang digunakan oleh UNDP pada level subnasional di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk dimensi umur panjang dan hidup sehat, indikator yang digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau e_0 . UHH merupakan perkiraan rata-rata lamanya waktu (dalam tahun) yang akan dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Penggunaan indikator ini didasarkan pada kenyataan bahwa umur panjang merupakan sesuatu yang tak ternilai dan dapat terwujud jikalau manusia mendapatkan nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. UHH dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*) dan di standardisasi menggunakan standar penghitungan UNDP.

Berikutnya, dua indikator dimensi pengetahuan yaitu: i) Harapan Lama Sekolah (HLS); dan ii) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini ingin merepresentasikan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan formal. Harapan lama sekolah adalah simbol kesempatan atau peluang yang dimiliki oleh masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Sementara itu, rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan dari sumber daya manusia yang ada di suatu wilayah. Penghitungan kedua indikator dimensi pengetahuan atau pendidikan ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu: i) data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh BPS; ii) data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama; dan iii) hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota.

Dimensi yang terakhir, standar hidup yang layak, tidak dapat menggunakan indikator yang sama sesuai dengan standar UNDP yaitu Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita (US\$ PPP). Data tersebut tidak tersedia pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

sehingga perlu menggunakan indikator lain yang sama-sama mencerminkan standar hidup layak masyarakat dan tersedia lintas wilayah dan waktu. Setelah melalui kajian yang panjang, dipilihlah indikator pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan sebagai indikator yang mewakili dimensi standar hidup yang layak. Indikator ini terpilih karena mampu mencerminkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan dihitung menggunakan sejumlah data survey dari BPS, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, serta harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen.

1.3 Indeks Pembangunan Manusia dan Perencanaan Pembangunan

IPM dapat digunakan sebagai alat ukur kemajuan pembangunan suatu negara atau wilayah. Konsepnya yang terbangun atas dasar tiga hakikat utama jati diri manusia, membuat IPM mampu menjelaskan kemajuan manusia secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan dari waktu ke waktu dan antarwilayah yang berbeda. Selain itu, capaian IPM antarwilayah dapat digunakan untuk memandu pemangku kebijakan dalam menyusun skala prioritas pembangunan wilayah di suatu negara. Contohnya, ketika suatu wilayah memiliki nilai IPM yang rendah di dimensi pengetahuan atau pendidikan, maka pemerintah dapat mengalihkan sumber daya dan fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Selain untuk membantu proses perencanaan pembangunan, IPM juga dapat berperan pada proses evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan. Dengan memperhatikan perkembangan IPM dan indikator penyusunnya dari waktu ke waktu, maka pemerintah dapat menilai apakah kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini memiliki dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dari proses di atas, dapat dilihat peran penting IPM dalam siklus perencanaan pembangunan, yang dimulai dari penyediaan data dan informasi, penyusunan perencanaan pembangunan, hingga sampai pada tahap evaluasi pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dan kualitas hidup manusia di suatu negara (UNDP, 2023b). IPM memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain sebagai katalis dalam siklus pembangunan, IPM juga dapat digunakan untuk mendorong kerja sama internasional dalam konteks pembangunan. Negara-negara dengan kondisi pembangunan manusia yang sudah lebih mapan dengan IPM yang tinggi, dapat membantu negara lain yang masih berjuang meningkatkan kondisi pembangunan manusianya untuk mencapai tujuan pembangunannya. Hal ini sesuai dengan amanah dari UNDP dalam salah satu laporannya yang menyebutkan bahwa salah satu manfaat utama IPM adalah adanya keterbandingan antarnegara dalam hal kemajuan pembangunan manusia (UNDP, 2023a).

Konsep pembangunan manusia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan

global yang ingin meniadakan satu individu di mana pun di dunia ini yang tertinggal. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDG's) adalah sebuah rencana aksi global yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan memastikan bahwa semua orang memperoleh keadilan dan kemakmuran yang layak (*United Nation*, 2015). SDG's terdiri dari 17 tujuan yang secara komprehensif mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan-tujuan tersebut menetapkan prioritas-prioritas global, seperti mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki lingkungan hidup. Dan, pembangunan manusia merupakan bagian integral dari SDG's karena merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan SDG's yang kompleks, ambisius, dan multisektor menjadikan kolaborasi antarpihak yang terkait menjadi sangat vital. Kerja sama antara pemerintah, *Non Governmental Organization* (NGO), sektor swasta, dan masyarakat sipil harus dijaga karena pemerintah tidak dapat bekerja sendirian untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan-layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Konsep pembangunan manusia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan dukungan pemerintah yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sebuah laporan dari UN terkait SDG's mempromosikan pembangunan manusia yang berkelanjutan melalui langkah-langkah konkret, seperti menjamin akses masyarakat yang lebih luas dan merata pada sumber daya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari proses pembangunan dan pencapaian SDG's.

Selain bermanfaat secara global, IPM juga terkait erat dengan perencanaan pembangunan nasional. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah Indonesia menetapkan prioritas, rencana strategis, serta sasaran pembangunan dalam jangka pendek yaitu lima tahun ke depan. RPJMN merupakan instrumen penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Melalui RPJMN, kelangsungan pembangunan nasional dapat terjamin, termasuk di dalamnya program pembangunan manusia. Dalam RPJMN, pembangunan manusia merupakan salah satu rencana kerja prioritas karena melalui pembangunan manusia dapat tercipta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta masyarakat yang maju dan sejahtera. RPJMN memberikan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan (RPJMN 2020-2024, 2020). Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah Indonesia menargetkan IPM meningkat dari 72,29 pada tahun 2021 menjadi 75,54 pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2023). Untuk mencapai target ini, pemerintah fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta perlindungan sosial untuk masyarakat yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat sistem keuangan dan perlindungan sosial, serta mempromosikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.



Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Nasional

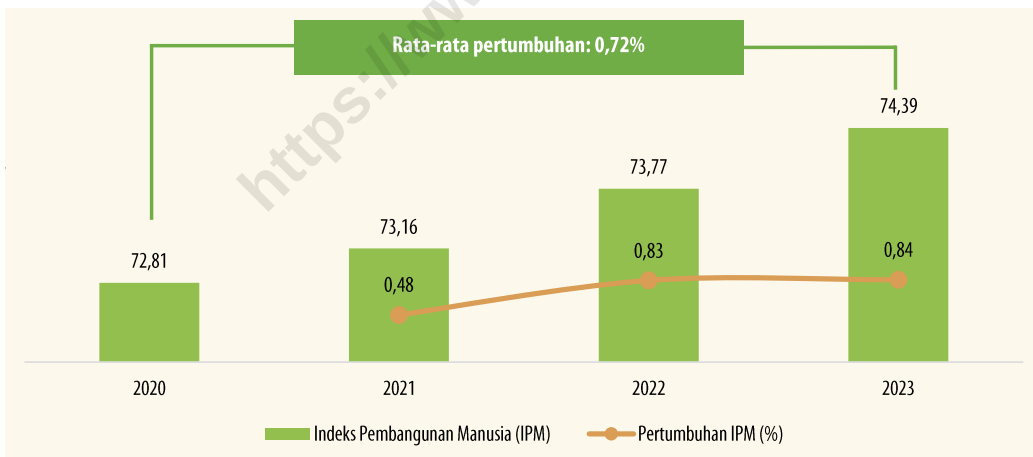
2



Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Nasional

2.1 Pembangunan Manusia Indonesia 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sudah tergolong berstatus tinggi (di atas 70) sejak 2016 dan terus mengalami peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020 hingga 2023. Dimulai dengan nilai 72,81 pada tahun 2020 yang meningkat ke 73,16 pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 73,77 pada tahun 2022, hingga akhirnya IPM Indonesia mencapai 74,39 pada tahun 2023. Kenaikan IPM juga terus mengalami percepatan setiap tahun, dimulai dari 0,48 persen dari 2020 ke 2021, meningkat menjadi 0,83 persen dari 2021 ke 2022, dan mengalami peningkatan tercepat dari 2022 ke 2023 dengan pertumbuhan 0,84 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan IPM Indonesia 2020-2023 adalah sebesar 0,72 persen per tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik

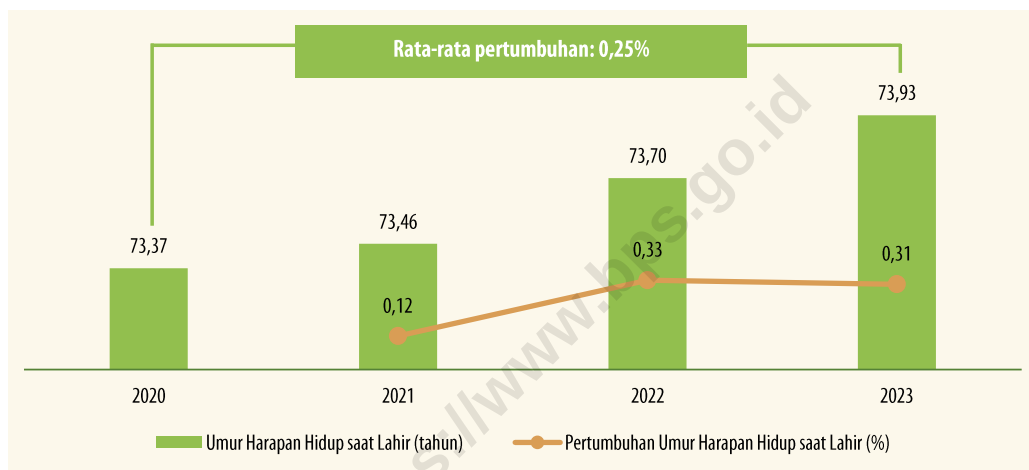
Gambar 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2020–2023

Percepatan kenaikan IPM 2023 salah satunya didorong oleh dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen dari 2022 ke 2023. Selain itu, dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Sebagai salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Peningkatan UHH mengindikasikan bahwa kesehatan masyarakat secara keseluruhan juga membaik.

Pada tahun 2023, UHH Indonesia tercatat sebesar 73,93 tahun, artinya anak yang lahir pada tahun 2023 diperkirakan dapat hidup hingga berumur 73,93 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UHH mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun atau tumbuh sebesar 0,31 persen (UHH 2022 adalah sebesar 73,70 tahun). Pada 2020-2023, rata-rata pertumbuhan UHH adalah sebesar 0,25 persen per tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.2 Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup saat Lahir Indonesia, 2020–2023

Faktor-faktor yang memengaruhi derajat kesehatan individu dan komunitas sering dikaitkan dengan model determinan kesehatan yang dikemukakan oleh H.L. Blum pada tahun 1970-an. Teori ini mencoba memetakan dan mengategorikan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap derajat kesehatan masyarakat. Menurut Blum, ada empat kategori utama yang memengaruhi derajat kesehatan, yaitu faktor lingkungan (40 persen), faktor perilaku (30 persen), faktor layanan kesehatan (20 persen), dan faktor genetik (10 persen).

Terdapat beberapa statistik lainnya yang selaras dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia pada 2023. Diantaranya adalah terjadinya penurunan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir, yaitu dari 29,94 persen penduduk pada 2022 menjadi 26,27 persen penduduk pada 2023.

Pada faktor lingkungan, berkaitan dengan akses terhadap sumber air minum layak, terdapat 91,72 persen rumah tangga di Indonesia pada 2023 memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Capaian ini meningkat 0,67 persen poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 91,05 persen. Selain itu, pada tahun 2023 terdapat 95,78 persen rumah tangga di Indonesia sudah menggunakan fasilitas buang air besar yang memadai (kloset

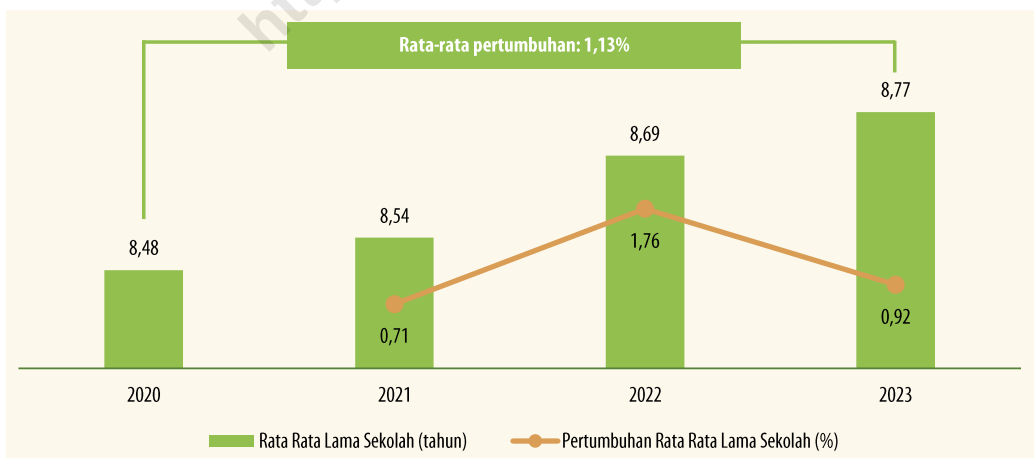
leher angsa). Capaian ini meningkat 1,64 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 94,14 persen.

Dari faktor perilaku, pada 2023 terdapat 52,62 persen perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat KB atau cara tradisional. Angka ini meningkat 0,23 persen poin dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 52,39 persen. Ditambah lagi, untuk faktor layanan kesehatan, 72,38 persen penduduk Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan pada 2023. Angka ini juga meningkat 2,76 persen poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 69,62 persen.

2.3 Capaian Dimensi Pengetahuan

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menyusun dimensi pengetahuan. RLS mengukur jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh individu yang berusia 25 tahun ke atas. RLS dijadikan indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di suatu daerah. Sementara itu, HLS merupakan harapan lamanya tahun pendidikan yang akan dijalani oleh seorang anak berusia 7 tahun di masa yang akan datang. HLS memberikan gambaran tentang perkembangan sistem pendidikan di berbagai tingkatan, yang diukur melalui jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan bisa diselesaikan oleh anak-anak di wilayah tersebut.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas di Indonesia pada 2023 mencapai 8,77 tahun. Angka ini mengartikan bahwa rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Apabila dibandingkan dengan 2022, rata-rata lama sekolah Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,08 tahun atau sebesar 0,92 persen (RLS 2022 sebesar 8,69 tahun).

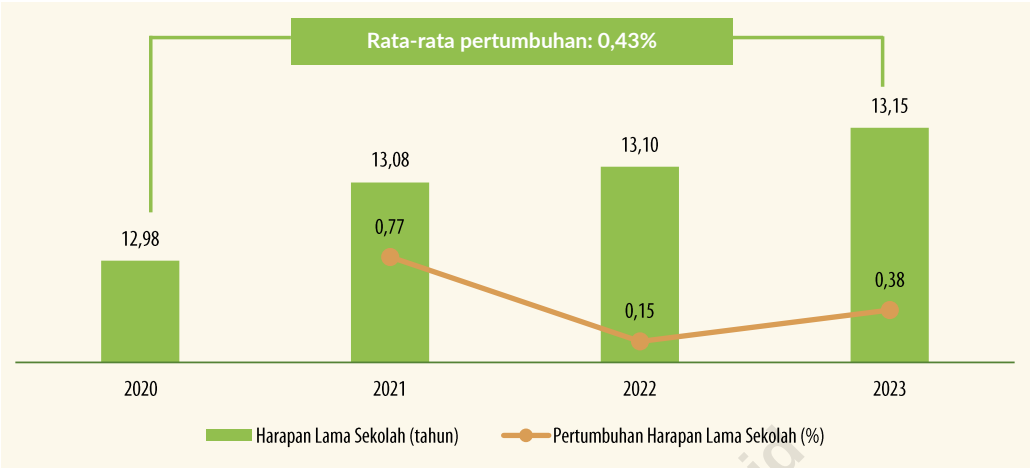


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.3 Capaian dan Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia, 2020–2023

Sedangkan, HLS Indonesia pada tahun 2023 mencapai 13,15 tahun, yang berarti anak yang berusia 7 tahun pada 2023 diharapkan dapat bersekolah selama 13,15 tahun atau sampai dengan jenjang perguruan tinggi tahun pertama. HLS mengalami peningkatan

dibandingkan dengan 2022 yaitu sebesar 0,05 tahun atau 0,38 persen (HLS 2022 sebesar 13,10 tahun).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.4 Capaian dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia, 2020–2023

Kenaikan RLS dan HLS didukung dengan statistik Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang meningkat pada 2023. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Indonesia tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022.

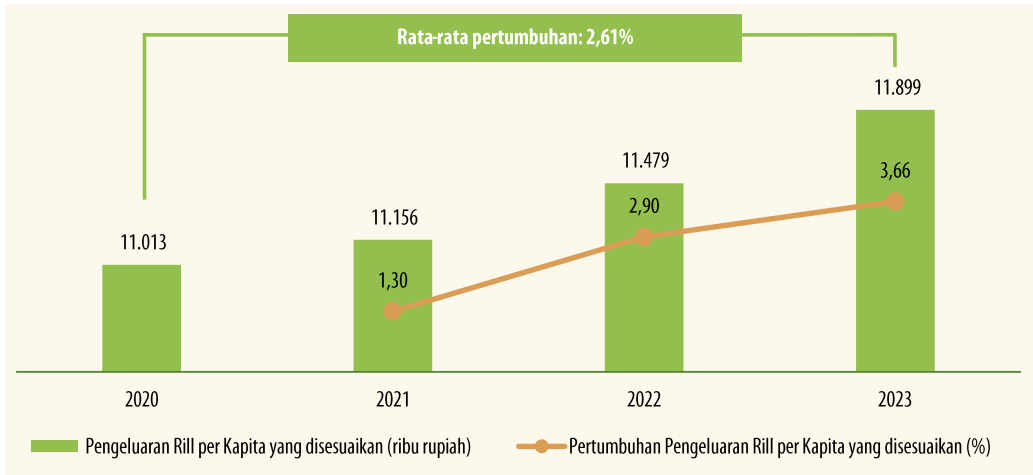
Tabel 2.1 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni Indonesia, 2020–2023

Statistik Pendidikan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
APS Penduduk Berumur 7–12 Tahun	99,26	99,19	99,10	99,16
APS Penduduk Berumur 13–15 Tahun	95,74	95,99	95,92	96,10
APS Penduduk Berumur 16–18 Tahun	72,72	73,09	73,15	73,42
APM SD	97,69	97,80	97,88	97,89
APM SMP	80,12	80,59	80,89	81,35
APM SMA	61,25	61,65	61,97	62,53

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023, Badan Pusat Statistik

2.4 Capaian Dimensi Standar Hidup Layak

Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan adalah indikator yang digunakan untuk mewakili dimensi standar hidup layak. Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan Indonesia pada 2023 adalah 11.899.000 rupiah per tahun. Dibandingkan tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat sebesar 3,66 persen dibandingkan 2022 yang sebesar 11.479.000 rupiah per tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2.5 Capaian dan Pertumbuhan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan di Indonesia, 2020–2023

Capaian pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan ini didukung oleh beberapa statistik lainnya seperti ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,05 persen pada 2023, menurunnya tingkat kemiskinan dari 9,54 persen pada maret 2022 menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 5,86 persen pada Agustus 2022 menjadi 5,32 persen pada Agustus 2023.

Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Daerah

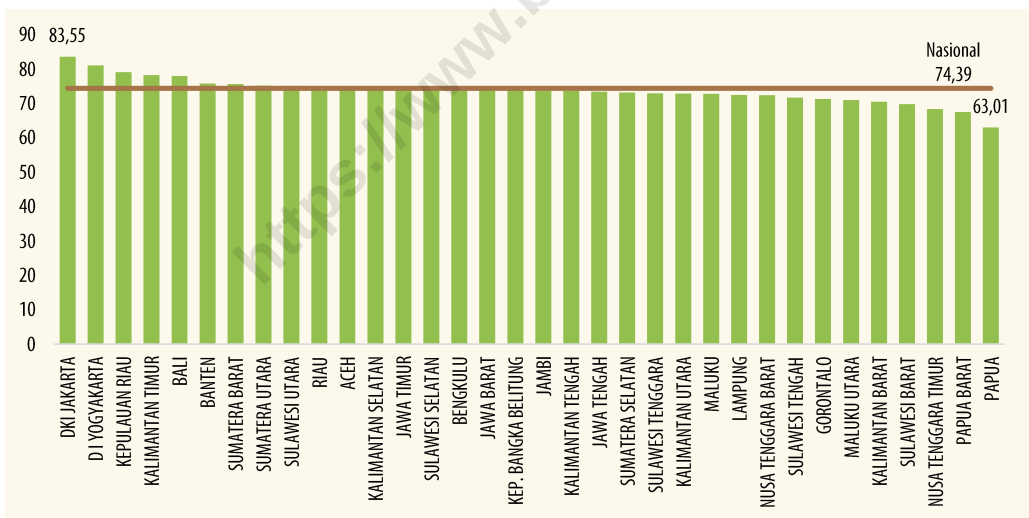
3



Capaian Pembangunan Manusia di Tingkat Daerah

3.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Sejalan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, IPM di seluruh provinsi juga mengalami peningkatan pada tahun 2023. Posisi IPM tertinggi dan terendah tidak mengalami perubahan sejak lima tahun terakhir. DKI Jakarta (83,55) selalu meraih posisi IPM tertinggi sedangkan Papua (63,01) berada di posisi terendah. Meskipun memiliki nilai IPM terendah, Papua merupakan provinsi dengan peningkatan IPM tercepat yaitu sebesar 1,37 persen. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, terdapat 14 provinsi dengan capaian IPM di atas nasional. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.1 Capaian IPM menurut Provinsi, 2023

Pada tahun 2023, hampir seluruh provinsi mengalami peningkatan IPM di atas 0,5, hanya Sumatera Barat dan D.I. Yogyakarta yang tercatat mengalami peningkatan IPM di bawah 0,5, masing-masing meningkat sebesar 0,48 dan 0,44. Meskipun DKI Jakarta merupakan provinsi dengan capaian IPM tertinggi, pertumbuhan IPM tahun 2023 masih berada di posisi sebelas (0,94 persen). Sebaliknya, IPM Papua menempati posisi terakhir tetapi memiliki pertumbuhan tercepat.

Keberhasilan DKI Jakarta dalam menempati posisi IPM tertinggi tidak terlepas dari tingginya capaian komponen UHH (75,81 tahun), HLS (11,45 tahun), dan pengeluaran riil per kapita (19,37 juta rupiah). Capaian ketiga komponen ini merupakan yang tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Peningkatan umur harapan hidup disebabkan karena fasilitas kesehatan yang sudah membaik mulai dari banyaknya rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pelayanan yang diberikan juga terus ditingkatkan. Program bantuan di bidang kesehatan juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah seperti, BPJS, Kartu Jakarta Sehat, dan lainnya dalam upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan ke seluruh penduduk tanpa terkecuali (Chika, 2022). Data BPS DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat rumah sakit sebanyak 209 dan dokter sebanyak 7.473. Pertumbuhan pengeluaran riil per kapita DKI Jakarta sebesar 2,3 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar yang berkontribusi dalam ekonomi regional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang positif menjadi pertanda peningkatan daya beli masyarakat. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat DKI setelah dua tahun terkena dampak pandemi COVID-19 cukup signifikan, terlihat dari kondisi peningkatan pengeluaran riil per kapita yang berada di atas 2 persen.

Di sisi lain, capaian IPM dan komponen di Papua merupakan yang terendah dibandingkan 34 provinsi lainnya. Meskipun demikian, pertumbuhan pengeluaran riil per kapita Papua merupakan yang tertinggi dengan nilai sebesar 5,50 persen. Hal ini tidak terlepas dari persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin.

Tabel 3.1 Capaian IPM Sepuluh Provinsi dengan Pertumbuhan IPM Tercepat, 2023

Provinsi	Harapan Hidup saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran riil per kapita (Ribu rupiah)		Indeks Pembangunan Manusia	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Papua	67,98	68,17	11,14	11,15	7,02	7,15	7.146	7.562	62,16	63,01
Nusa Tenggara Timur	71,30	71,57	13,21	13,22	7,70	7,82	7.877	8.248	67,63	68,40
Papua Barat	68,23	68,51	13,21	13,34	7,84	7,93	8.101	8.404	66,72	67,47
Kalimantan Barat	73,47	73,71	12,66	12,67	7,59	7,71	9.355	9.810	69,71	70,47
Kalimantan Timur	74,45	74,72	13,84	14,02	9,92	9,99	12.641	13.202	77,36	78,20
Maluku Utara	70,47	70,76	13,73	13,74	9,24	9,26	8.398	8.834	70,26	70,98
Nusa Tenggara Barat	71,66	72,02	13,96	13,97	7,61	7,74	10.681	11.095	71,65	72,37
Maluku	70,16	70,45	14,00	14,08	10,19	10,20	8.876	9.278	72,04	72,75
Sumatera Selatan	73,76	74,04	12,55	12,63	8,37	8,50	11.109	11.472	72,48	73,18
Lampung	73,95	74,17	12,74	12,77	8,18	8,29	10.336	10.769	71,79	72,48

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain Papua, dua provinsi lain yang memiliki pertumbuhan IPM di atas angka 1,10 persen adalah provinsi Nusa Tenggara Timur (1,14 persen) dan Papua Barat (1,12 persen). IPM kedua provinsi tersebut secara keseluruhan tumbuh di atas 1,1 persen karena didorong oleh pertumbuhan pengeluaran riil per kapita sebesar 3,5 persen. Meskipun komponen

pendidikan kedua provinsi tidak begitu tinggi, adanya kompensasi dari dua indikator lainnya mengakibatkan IPM tumbuh dengan cepat.

Peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Nusa Tenggara Timur didukung oleh Penurunan TPT sebesar 0,40 persen poin dan rata-rata upah buruh sebesar 239 ribu rupiah. Sementara itu, peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan didorong oleh peningkatan angka pekerja formal sebesar 1,73 persen poin dan peningkatan upah buruh/pegawai sekitar empat ratus ribu rupiah.

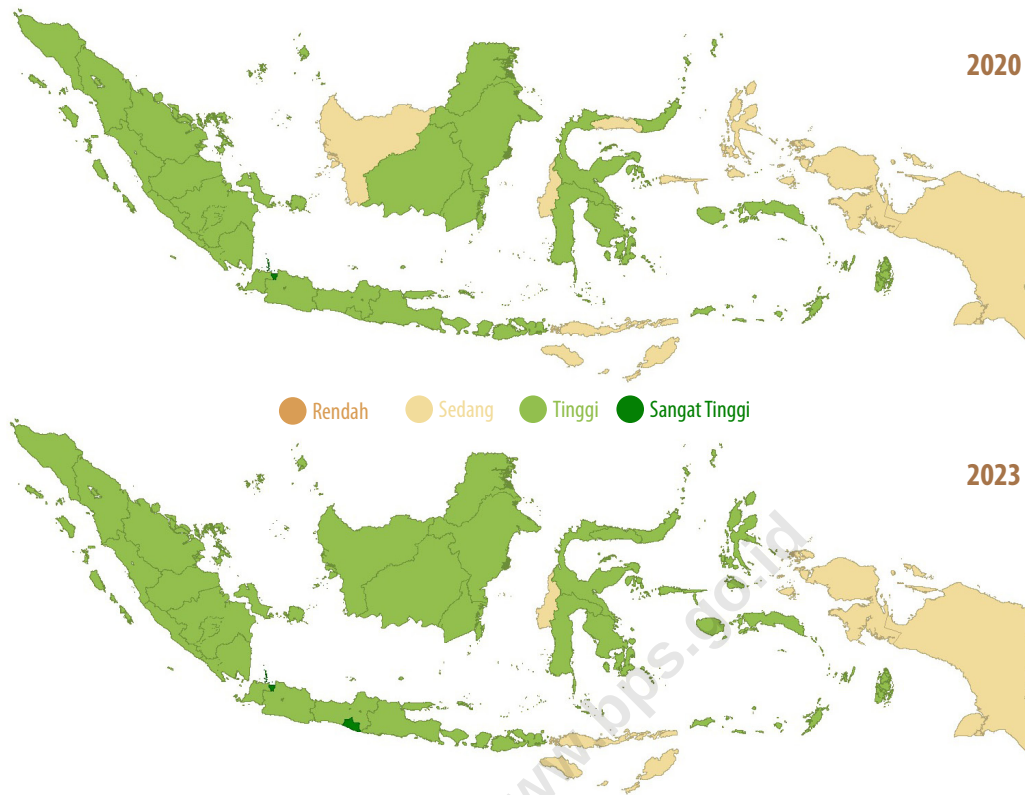
Hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami pertumbuhan IPM yang positif, meskipun demikian terdapat 12 provinsi dengan pertumbuhan lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kedua belas provinsi tersebut adalah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sumatera Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Aceh, dan Kepulauan Riau.

3.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia 2020 dan 2023

Pada tahun 2020 status pembangunan manusia “sangat tinggi” hanya dicapai oleh DKI Jakarta. Namun, sejak tahun 2021 D.I. Yogyakarta mampu menyamai status pembangunan manusia DKI Jakarta. Pada tahun 2023 terdapat dua provinsi yang memiliki status IPM “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$) yaitu, DKI Jakarta dan D.I. Yogyakarta. Selain D.I. Yogyakarta, selama tiga tahun terakhir terdapat perubahan status pembangunan manusia yang terjadi di tingkat provinsi. Pada periode tersebut, terdapat tiga provinsi yang berhasil merubah status pembanguna manusia dari “sedang” ($60 \leq IPM < 70$) menjadi “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) yaitu, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo.

Keberhasilan berbagai provinsi dalam memperbaiki status pembangunan manusia tidak terlepas dari berbagai upaya kebijakan pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah D.I. Yogyakarta terhadap pembangunan manusia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 yaitu: (a) Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal; (b) Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan; (c) Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif; dan (d) Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Perbedaan capaian pembangunan manusia dapat dilihat dari disparitas capaian Kawasan Barat dan Timur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional. Gambar 3.2 menunjukkan masih terdapat adanya perbedaan status pembangunan manusia yang cukup berarti antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur. Namun, Kawasan Timur perlahan mulai mengalami perbaikan status pembangunan manusia pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2020.



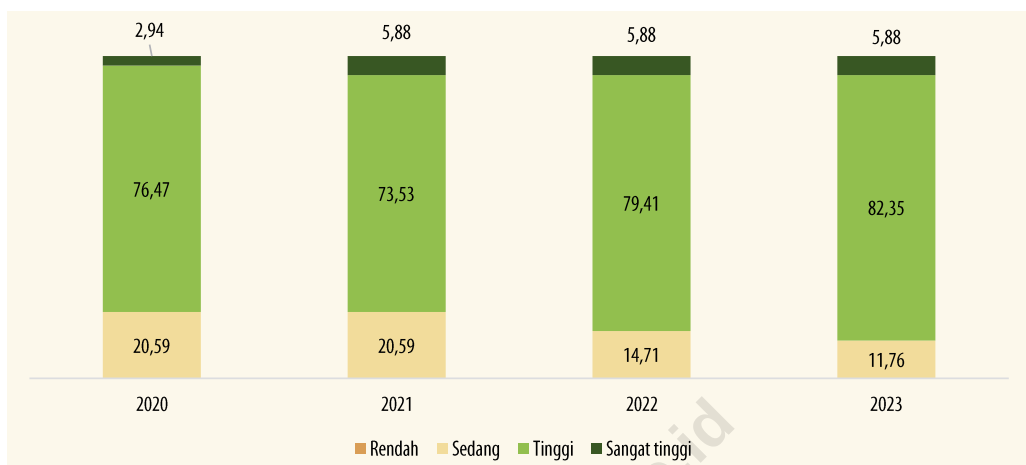
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 3.2 Peta Pembangunan Manusia Provinsi, 2020 dan 2023

Indonesia memiliki lima gugusan pulau besar yaitu, Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua. Di seluruh gugusan pulau besar tersebut telah terdapat provinsi dengan status pembangunan manusia “tinggi”, kecuali Maluku dan Papua. Kelima pulau ini memiliki capaian pembangunan manusia yang berbeda-beda. Pada tahun 2023, seluruh provinsi di Pulau Sumatera menyandang status pembangunan manusia “tinggi”. Di gugusan Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, seluruh provinsi telah memiliki capaian IPM dengan status “tinggi” dan “sangat tinggi”, kecuali Nusa Tenggara Timur masih berada pada kategori “sedang”. Seluruh provinsi di Pulau Kalimantan memiliki status pembangunan manusia “tinggi”. Di Pulau Sulawesi, hanya Sulawesi Barat yang memiliki status pembangunan manusia “sedang”. Sementara itu, pada gugusan Kepulauan Maluku dan Papua, hanya di Papua Barat dan Papua yang masih menyandang status pembangunan manusia “sedang”.

Kondisi pada tahun 2023 tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan kondisi tiga tahun yang lalu. Pergeseran status pembangunan manusia hanya terjadi pada kategori “sangat tinggi”, dimana jumlah provinsi berstatus “sangat tinggi” pada tahun 2023 naik dari 2,94 persen menjadi 5,88 persen dibandingkan tahun 2020. Selain itu, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia “sedang” turun dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2023, hampir semua provinsi menyandang status pembangunan manusia “tinggi” (82,35

persen). Hal ini tidak menutup kemungkinan akan semakin meningkatnya persentase provinsi yang menyandang status pembangunan manusia “tinggi” pada tahun-tahun berikutnya.



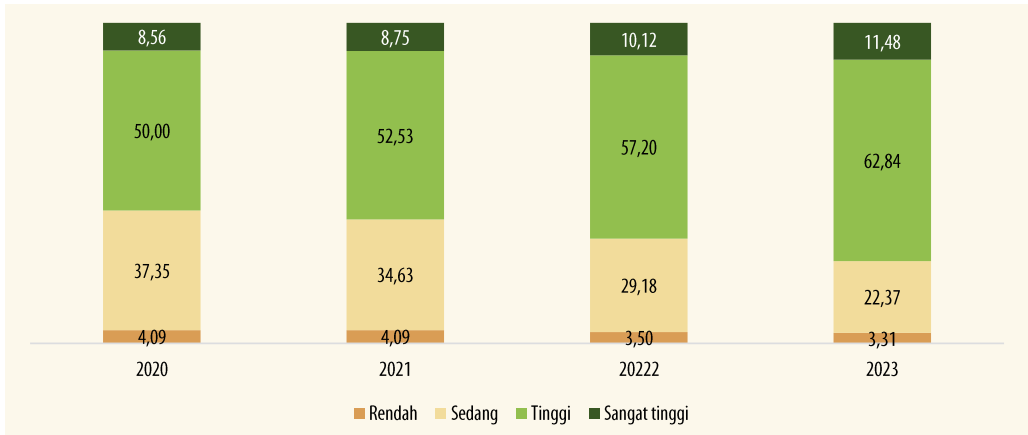
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.3 Persentase Provinsi menurut Status Pembangunan Manusia, 2020–2023

3.3 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

IPM Provinsi dapat tercermin dari IPM kabupaten/kota pembentuknya. Peningkatan IPM kabupaten/kota akan mengiringi peningkatan IPM provinsi. Variasi capaian IPM di tingkat provinsi juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Posisi kota dengan IPM tertinggi tidak berubah sejak 2020 dimana kota Yogyakarta menempati posisi pertama dengan capaian IPM tahun 2023 sebesar 88,61. Sama halnya dengan posisi IPM terendah tidak berubah sejak tiga tahun silam yaitu diduduki oleh Kabupaten Nduga dengan capaian IPM tahun 2023 sebesar 37,68.

Secara umum sejak tahun 2020 capaian IPM kabupaten/kota berada pada status pembangunan manusia “tinggi”. Sejak tahun 2020 lebih dari 50 persen kabupaten/kota berada di status “tinggi” dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Hingga tahun 2023 kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “tinggi” mencapai 62,84 persen. Peningkatan juga terjadi pada jumlah kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “sangat tinggi”, meskipun tidak sebanyak yang berstatus “tinggi”. Berbeda halnya dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan manusia “sedang” dan “rendah”, keduanya mengalami penurunan sejak tahun 2020. Penurunan ini terus terjadi hingga pada tahun 2023 jumlah kabupaten/kota yang memiliki status sedang dan rendah masing-masing berjumlah 3,31 persen dan 22,37 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan beberapa kabupaten/kota dalam memperbaiki taraf kehidupan penduduknya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 3.4 Persentase Kabupaten/Kota menurut Status Pembangunan Manusia, 2020–2023

Tabel 3.2 Perubahan Status Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota dari Tahun 2022 ke 2023

Rendah menjadi Sedang	Sedang menjadi Tinggi			Tinggi menjadi Sangat Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mappi	1. Aceh Barat Daya	13. Batang	25. Sukamara	Kota Langsa
	2. Banyu Asin	14. Jember	26. Seruyan	Kota Lhoksumawe
	3. Bondowoso	15. Sitobondo	27. Barito Kuala	Kota Pematang Siantar
	4. Seluma	16. Probolinggo	28. Mahakam Ulu	Kota Payakumbuh
	5. Blora	17. Pemekasan	29. Tana Tidung	Kota Pangkal Pinang
	6. Way Kanan	18. Pandeglang	30. Bolaang Mongondow	Kota Banjarmasin
	7. Pesisir Barat	19. Karangasem	31. Bolaang Mongondow Timur	Kota Pare-pare
	8. Pasang Kayu	20. Lombok Tengah	32. Buol	Kota Sorong
	9. Indramayu	21. Lombok Timur	33. Sigi	
	10. Bandung Barat	22. Bima	34. Bone	
	11. Purbalingga	23. Sambas	35. Konawe Selatan	
	12. Wonosobo	24. Kubu Raya	36. Gorontalo	

Sumber: BPS (diolah 2023)

Pada tahun 2023 terdapat 36 kabupaten/kota yang mengalami perubahan status pembangunan manusia dari “sedang” ke “tinggi”. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana tercatat hanya terdapat 31 kabupaten/kota yang mengalami perubahan status dari IPM kategori sedang menjadi IPM kategori tinggi. Pergeseran status dari “sedang” ke status “tinggi” merupakan yang terbanyak selama tiga tahun terakhir.

Berbeda halnya dengan kabupaten/kota yang mengalami pergeseran dari status “rendah” ke “sedang”, pada tahun 2023 hanya terdapat satu kabupaten yaitu Kabupaten Mappi. IPM Kabupaten Mappi meningkat sebesar 0,96 menjadi 60,71 pada tahun 2023. Keberhasilan Kabupaten Mappi dalam mengubah statusnya didukung oleh berbagai sektor baik kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Berdasarkan data BPS Kabupaten

Mappi, persentase penduduk miskin menurun 0,32 persen poin pada tahun 2023. Dari segi pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun meningkat 0,03 persen poin dan kemampuan baca tulis huruf latin yang meningkat 4,01 persen poin. Sementara dari sisi kesehatan, kepemilikan tempat buang air besar meningkat 0,2 persen poin dibandingkan tahun 2022.

Pergeseran status pembangunan manusia dari “tinggi” ke “sangat tinggi” terjadi pada 8 kota yaitu, Kota Langsa, Lhoksumawe, Pematang Siantar, Payakumbuh, Pangkal Pinang, Banjarmasin, Pare-pare, dan Sorong. Capaian ini sangat signifikan bila dibandingkan dua tahun terakhir. Pada tahun 2021 hanya ada dua kota yang mengalami pergeseran status dari “tinggi” ke “sangat tinggi”. Sedangkan pada tahun 2022 hanya ada tiga kota yang mengalami pergeseran status dari “tinggi” ke “sangat tinggi”. Secara umum, seluruh kota yang mengalami perubahan status menjadi “sangat tinggi” mengalami peningkatan pengeluaran riil per kapita di atas 2 persen.

3.4 Perkembangan Disparitas Capaian Pembangunan Manusia Antarwilayah

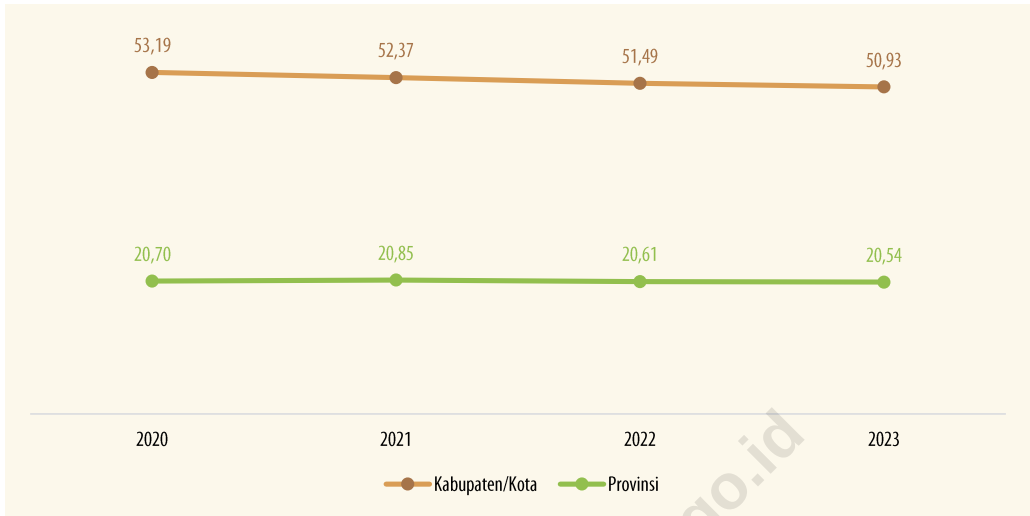
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Keragaman sumber daya baik alam maupun manusianya membuat setiap pulau memiliki keunikannya masing-masing. Dalam mengelola sumber daya tersebut pemerintah mengeluarkan UU No 2 tahun 1999 terkait sistem otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah menyebabkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam berbagai bidang. Penerapan otonomi daerah memberi peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah (Ratna, 2021). Diharapkan otonomi daerah dapat secara maksimal memanfaatkan potensi setiap daerah dan akhirnya berhasil dalam Pembangunan.

Pembangunan yang terjadi di Indonesia pada mulanya berfokus pada Pulau Jawa. Berdasarkan strategi pembangunan ekonomi tersebut Indonesia mampu menikmati peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun diikuti dengan adanya kesenjangan yang juga semakin besar (Tambunan 2001). Salah satu agenda pembangunan yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Harapan yang diberikan pada agenda tersebut adalah teratasinya kesenjangan pembangunan di segala aspek termasuk kesenjangan dalam pembangunan manusia.

Selama empat tahun disparitas yang terjadi baik kabupaten/kota dan provinsi berangsur mengalami penurunan setiap tahunnya. Disparitas kabupaten/kota turun jauh lebih cepat dibandingkan provinsi. Meskipun demikian, disparitas pembangunan manusia antarkabupaten/kota jauh lebih tinggi daripada antarprovinsi. Artinya, capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota jauh lebih beragam dibandingkan dengan di tingkat provinsi.

Disparitas kabupaten/kota selama empat tahun sudah menurun 2,27 poin menjadi 50,93 pada tahun 2023. Sementara itu, disparitas provinsi sejak 2020 hanya turun sebesar

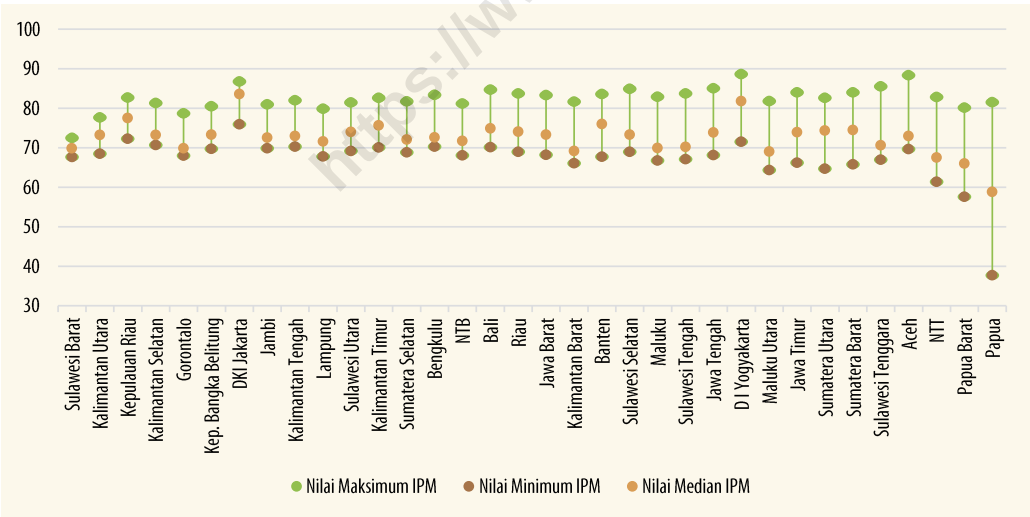
0,16 poin menjadi 20,54 pada tahun 2023. Pengukuran disparitas dilakukan dengan melakukan selisih antara nilai IPM tertinggi dan IPM terendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 3.5 Perkembangan Disparitas IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota, 2020–2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)



Gambar 3.6 Disparitas IPM Antarkabupaten/kota dalam Provinsi, 2023

Disparitas antarkabupaten/kota dalam provinsi tidak mengalami perubahan dibandingkan empat tahun sebelumnya. Disparitas terendah pada tahun 2023 masih terjadi di Sulawesi Barat, sedangkan disparitas tertinggi terjadi di Papua. Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa pembangunan di Papua masih menghadapi permasalahan, yaitu belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus, pengembangan potensi unggulan

berbasis sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, dan terbatasnya pelayanan dasar serta kerentanan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan.

<https://www.bps.go.id>

Capaian Gender dalam Pembangunan Manusia

4



Capaian Gender dalam Pembangunan Manusia

4.1 Peran Gender dalam Pembangunan

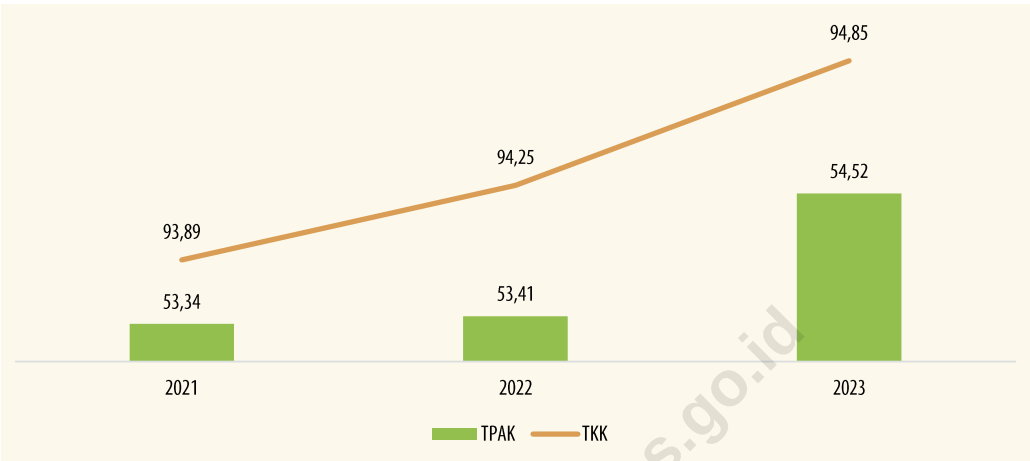
Dewasa ini, isu gender dalam pembangunan menjadi sangat penting untuk diatasi dalam menghadapi tantangan global. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus memperhatikan peran gender secara menyeluruh, memastikan partisipasi perempuan dalam rangkaian proses pengambilan keputusan, serta mengatasi segala ketimpangan terhadap akses di berbagai lini kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Seiring waktu, menguatnya kesetaraan gender dalam pembangunan tidak hanya berdampak dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan, akan tetapi juga akan mempercepat laju pencapaiannya.

Istilah kesetaraan gender muncul dari adanya perbedaan keadaan dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan ini dicerminkan dari kesempatan terbatas yang dimiliki oleh salah satu pihak dalam mengikuti program dan kegiatan di masyarakat. Umumnya keterbatasan ini berasal dari nilai dan norma yang menganggap laki-laki bersifat superior atau lebih mampu sehingga membatasi gerak perempuan dalam berpartisipasi. Selain itu, budaya patriarki yang diadopsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menyebabkan kaum laki-laki lebih diunggulkan (Aula, 2023).

Dalam pembangunan manusia, perspektif gender sangat penting untuk diperhatikan mengingat pembangunan manusia selayaknya dirasakan secara merata oleh perempuan maupun laki-laki. Perspektif gender yang dibicarakan ini tidak hanya menyangkut perempuan dan laki-laki yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin saja, akan tetapi juga memperhatikan peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat (BPS, 2014). Pemerataan peningkatan kualitas hidup antargender ini akan mendorong optimalisasi pembangunan nasional yang sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang mengangkat isu pengarusutamaan gender (prioritas nasional 3) untuk menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang masih terjadi hingga saat ini (Aula, 2023).

Seiring berjalannya waktu, perempuan yang merupakan salah satu aktor dalam pembangunan terus mengalami perkembangan dari segi kontribusi dan partisipasi. Perkembangan jumlah perempuan selama tiga tahun terakhir (2021-2023) mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh tren turun dari angka rasio jenis kelamin dengan nilai berurutan sebesar 102,30; 102,20; dan 102,09 (BPS, 2023a). Bahkan, kondisi ini didukung oleh jumlah penduduk perempuan yang tumbuh sebesar 0,83 persen, sedangkan laki-laki mengalami kontraksi sebesar 0,82 persen pada tahun 2023 (BPS, 2022b; 2023b). Semakin banyak jumlah perempuan mencerminkan semakin besarnya peluang perempuan dalam berkontribusi dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya

tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja selama tiga tahun terakhir yang sejalan dengan peningkatan persentase keberhasilan masuk ke pasar kerja (gambar 4.1). Perkembangan positif ini tentu harus diikuti dengan pemenuhan hak dan kesempatan yang setara antargender sehingga perempuan memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki dan perannya dapat dirasakan dalam pembangunan.



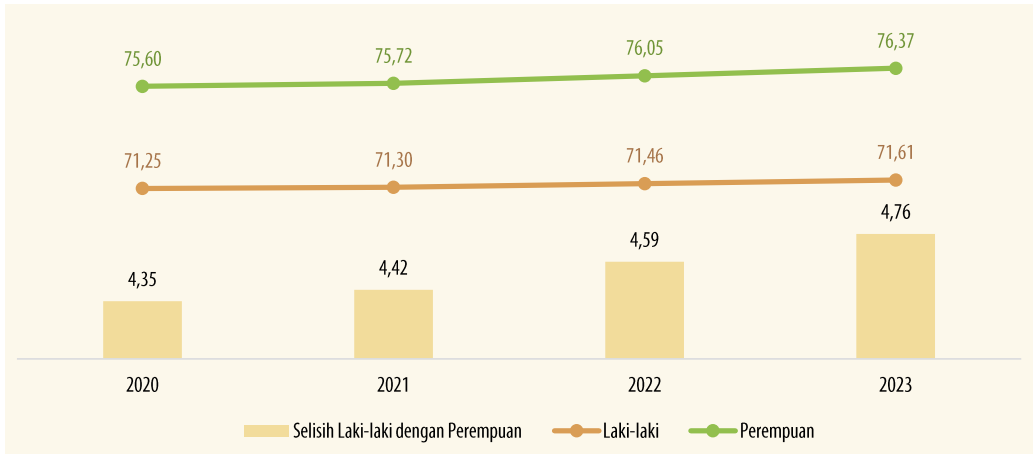
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Perempuan di Indonesia (persen), 2021–2023

4.2 Capaian Dimensi Pembangunan Manusia menurut Gender

Pembangunan manusia yang merefleksikan kualitas hidup manusia seyogyanya dapat dinikmati secara merata baik bagi perempuan dan laki-laki. Ketiga dimensi dalam pembangunan manusia yang terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak yang dapat dicapai dengan adanya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi harus berkualitas dan tidak bias terhadap gender. Hak dan kesempatan yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki harus sama sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Dengan adanya prinsip kesetaraan gender maka akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan menyokong pembangunan nasional.

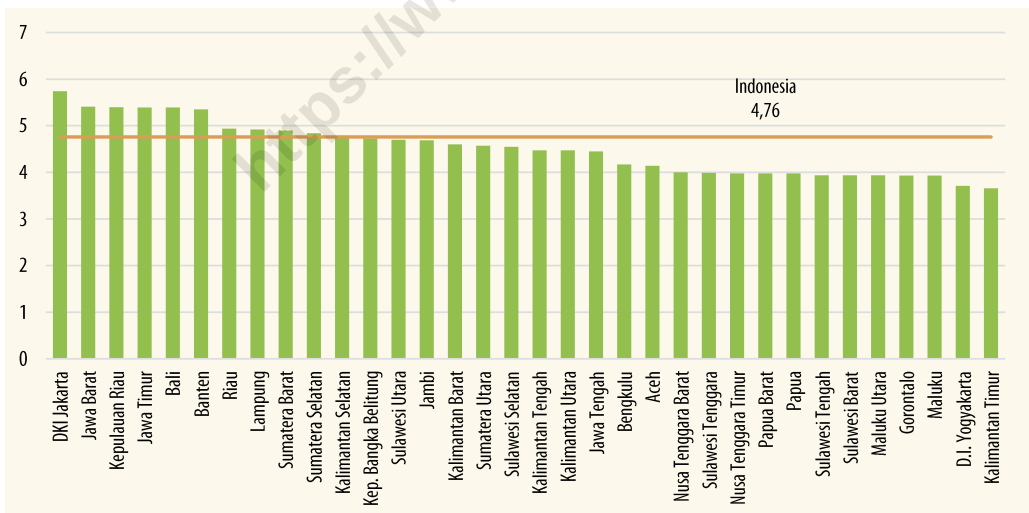
Dimensi kesehatan merupakan aspek yang dapat dilihat melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Dilihat dari gambar 4.2, UHH Indonesia memiliki tren naik baik untuk penduduk perempuan dan laki-laki selama empat tahun terakhir. Tren naik pada UHH ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas kesehatan yang tercermin dari semakin panjang umur dan sehatnya penduduk di Indonesia. Sayangnya, UHH antara penduduk perempuan dan laki-laki memiliki selisih nilai yang meningkat setiap tahun, mulai dari 4,35 tahun hingga 4,76 tahun. Selisih nilai ini dihasilkan dari tingginya UHH penduduk perempuan terhadap laki-laki. Misalnya, bayi perempuan yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan hidup hingga 76,37 tahun, sedangkan bayi laki-laki hanya memiliki harapan hidup hingga 71,61 tahun.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.2 Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Jenis Kelamin (tahun), 2020–2023

Menilik grafik pada gambar 4.3, terlihat bahwa terdapat keselarasan antara selisih UHH nasional dengan provinsi-provinsi di Indonesia dimana UHH penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selisih UHH tersebut berkisar antara 3,66 tahun yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur hingga 5,74 tahun yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Jika dibandingkan dengan selisih UHH nasional yang bernilai 4,76 tahun, 11 provinsi berada di atas nilai nasional sedangkan 23 provinsi lainnya berada di bawah nilai nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.3 Selisih Umur Harapan Hidup saat Lahir Antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (tahun), 2023

Fenomena lebih tingginya UHH saat lahir penduduk perempuan dibandingkan laki-laki merupakan hal yang lumrah terjadi di beberapa negara di dunia. Tidak memandang tingkat perekonomiannya, negara maju pun mengalami fenomena ini meskipun dengan *gap* yang berbeda-beda, mulai dari setengah hingga sepuluh tahun (*ourworldindata.org*,

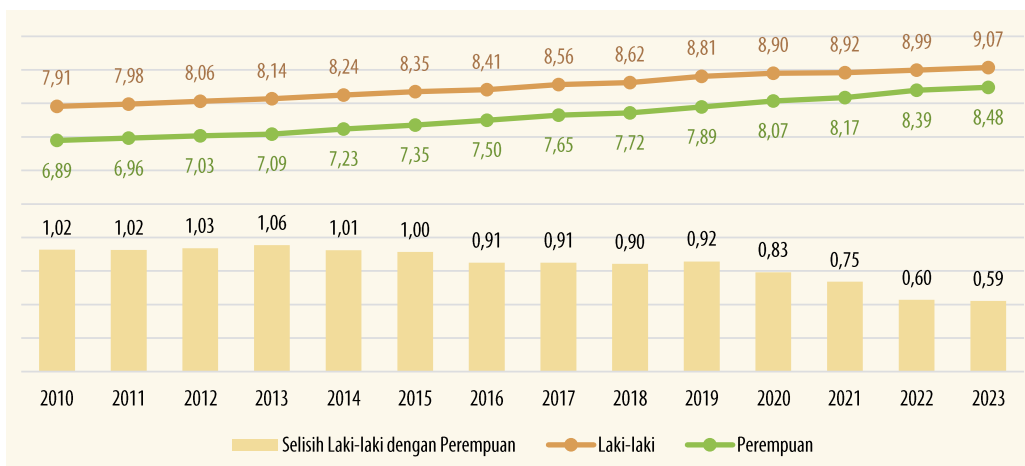
2023). Fakta ini juga didukung dengan adanya *health life expectancy index* (HALE Index) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa penduduk perempuan dapat menikmati hidup sehat selama 63,8 tahun, sedangkan penduduk laki-laki hanya 61,9 tahun di Indonesia (WHO, 2023).

Jika didalami penyebabnya, perbedaan nilai UHH antara perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh biologis, gaya hidup, hingga lingkungan. Dari sisi biologis, perempuan memiliki sel dengan kromosom XX sedangkan laki-laki memiliki kromosom XY. Jika terjadi kerusakan pada satu kromosom X, kondisi ini akan mengakibatkan tidak adanya pengganti kromosom X pada sel laki-laki. Tak hanya itu, hormon estrogen yang dihasilkan secara biologis dalam tubuh manusia juga memengaruhi imunitas. Sayangnya, hormon estrogen dalam tubuh laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan sehingga daya tahan tubuh perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki.

Selain itu, gaya hidup ikut serta dalam memengaruhi kondisi tubuh manusia. Orang yang memiliki gaya hidup sehat, dimulai dari mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, dan mencukupi kebutuhan air minum pasti memiliki kesehatan yang lebih baik. Akan tetapi, ada juga gaya hidup yang mengancam tubuh manusia seperti mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Pada tahun 2023, persentase laki-laki yang merokok sebesar 7,01 persen, sedangkan perempuan hanya sebesar 0,15 persen di Indonesia (BPS, 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa ancaman kesehatan akibat rokok mendominasi pada penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari sisi lingkungan, aktivitas di luar ruangan dan mengerjakan pekerjaan yang berisiko juga ikut memengaruhi keamanan manusia. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja sebesar 84,26 persen, sedangkan perempuan hanya 54,52 persen (BPS, 2023). Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga sehingga harus keluar untuk bekerja. Pekerjaan yang dilakukan laki-laki pun cenderung lebih berisiko, misalnya pekerja bangunan, pelaut, dan sopir. Dalam menjalani aktivitasnya, pekerja juga kemungkinan akan menghadapi hambatan atau kecelakaan lalu lintas. Berkaitan dengan risiko tersebut, laki-laki yang masih remaja pun cenderung terlibat dalam tawuran antarpelajar dan balapan motor yang dapat mengancam nyawa.

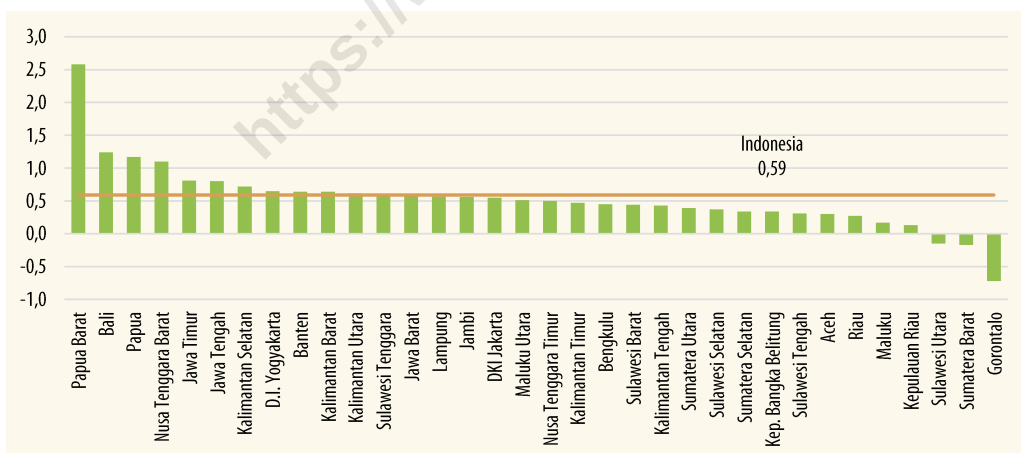
Beralih ke pengetahuan, dimensi ini merefleksikan kesempatan dalam menempuh pendidikan yang dapat dilihat melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) yang akan berdampak pada peningkatan atau penurunan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di masa mendatang. Berdasarkan gambar 4.4, RLS antara perempuan dan laki-laki memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Peningkatan RLS ini juga dibarengi dengan semakin menyempitnya *gap* RLS antargender. Namun, *gap* yang sempit ini belum sampai menyamai level pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2023, RLS laki-laki sebesar 9,07 tahun atau secara rata-rata penduduk laki-laki berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX. Sementara itu, RLS perempuan sebesar 8,48 tahun atau secara rata-rata penduduk perempuan berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Jenis Kelamin (tahun), 2010–2023

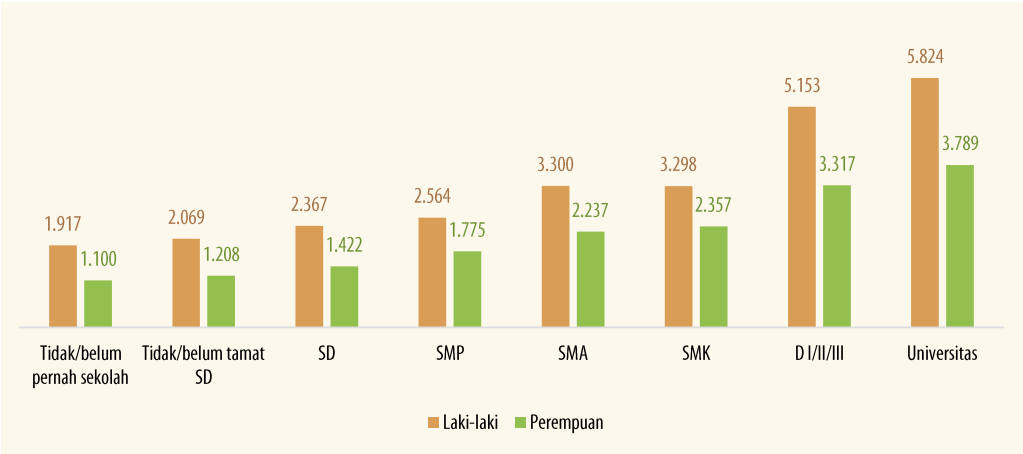
Sejalan dengan selisih RLS nasional, RLS laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk sebagian besar provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Selisih nilai berkisar dari -0,72 hingga 2,78 tahun. Tanda negatif menunjukkan bahwa RLS perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Jika dirinci berdasarkan besaran selisih, 13 provinsi berada di atas nasional dan 21 provinsi lainnya berada di bawah nasional. Semakin dekat selisih nilai dengan nol, maka semakin kecil kesenjangan atau terwujudnya kesetaraan gender.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.5 Selisih Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (tahun), 2023

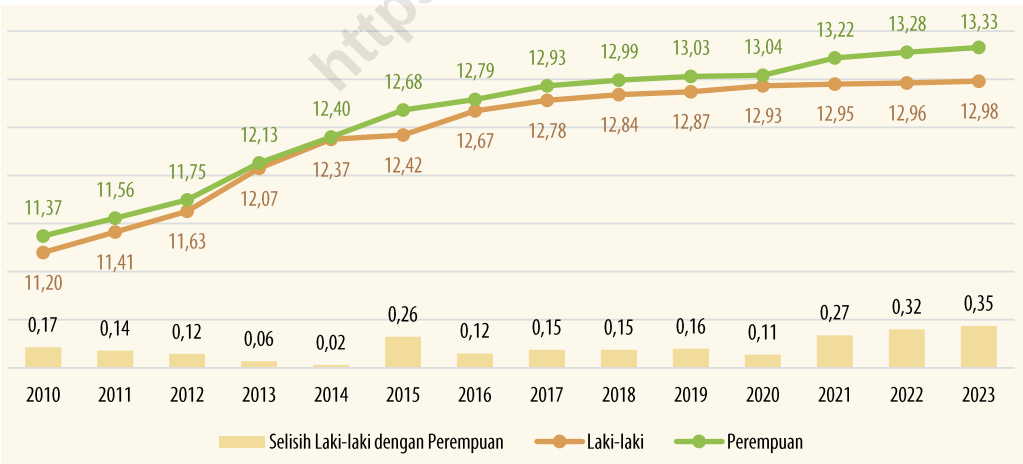
Realita akan adanya *gap* antara RLS perempuan dan laki-laki perlu mendapatkan perhatian yang serius. Mengingat pendidikan memengaruhi upah yang akan diterima di pasar kerja. Berdasarkan grafik pada gambar 4.6, terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka semakin besar upah yang akan diterima oleh buruh/karyawan/pegawai.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.6 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu rupiah), 2023

Meskipun RLS perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, namun hal sebaliknya terjadi pada HLS. HLS perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selisih nilai HLS antara perempuan dan laki-laki pada tahun 2023 sebesar 0,35 tahun dimana perempuan memiliki capaian sebesar 13,33 tahun dan laki-laki sebesar 12,98 tahun. Capaian HLS ini belum mengindikasikan adanya kesetaraan gender karena capaian perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, capaian HLS laki-laki juga perlu didorong agar setara dengan perempuan. Tingginya HLS perempuan dan laki-laki akan berdampak pada peningkatan RLS perempuan sehingga *gap* RLS antargender menjadi lebih sempit dalam jangka panjang.

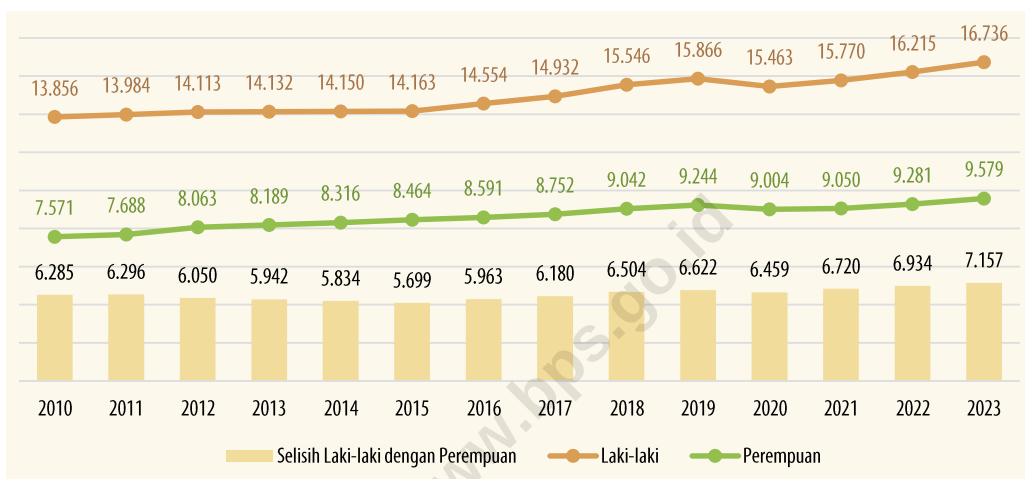


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.7 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (tahun), 2010–2023

Dilihat dari tahun ke tahun, capaian HLS memiliki tren naik. Akan tetapi, peningkatan HLS ini diikuti oleh semakin melebarnya selisih HLS antara perempuan dan laki-laki. Melebarnya *gap* HLS antargender terjadi sejak empat tahun terakhir dan *gap* HLS antargender tahun 2023 menjadi yang terlebar jika dilihat dari tahun 2010.

Peningkatan nilai RLS dan HLS yang tidak begitu signifikan pada dimensi pengetahuan umumnya disebabkan oleh adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hambatan utama yang menjadi masalah hingga memicu putus sekolah adalah ekonomi (Lestari, 2020). Sebagian besar pelajar yang mengalami putus sekolah menyatakan bahwa keinginan untuk membantu perekonomian keluarga lebih besar daripada untuk menyelesaikan sekolah. Kondisi ini juga didukung oleh persentase pekerja yang berumur 15-19 tahun (setara pelajar sekolah menengah atas) yang mengalami peningkatan selama 3 tahun terakhir, yaitu 3,13 persen pada tahun 2021, 3,14 persen pada tahun 2022, dan 3,17 persen pada tahun 2023 (BPS, 2021; 2022a; 2023c).

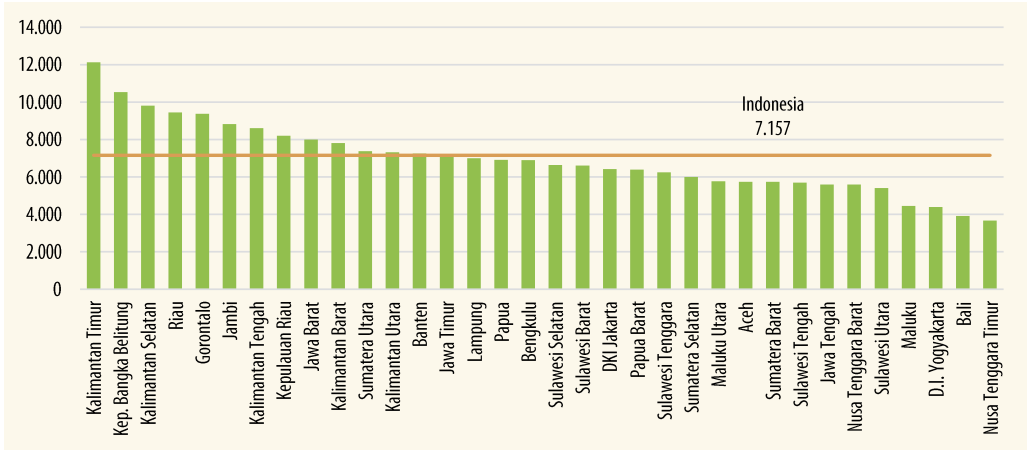


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.8 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan menurut Jenis Kelamin (ribu rupiah per tahun), 2010–2023

Masih berkaitan dengan ekonomi, dimensi standar hidup layak juga dilihat dari sisi ekonomi melalui indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita penduduk laki-laki mencapai 16.736 ribu rupiah, sedangkan perempuan mencapai 9.579 ribu rupiah. Berdasarkan grafik pada gambar 4.8, terlihat bahwa pengeluaran riil per kapita penduduk perempuan dan laki-laki memiliki tren naik meskipun nilainya sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Walaupun demikian, peningkatan pengeluaran riil per kapita tidak diikuti oleh penyempitan *gap* antargender. *Gap* semakin melebar sejak empat tahun terakhir dimana pengeluaran riil per kapita penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bahkan, *gap* pengeluaran riil per kapita antargender tahun 2023 ini meningkat 3,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Serupa dengan *gap* pengeluaran riil per kapita antargender nasional, *gap* provinsi juga menunjukkan bahwa pengeluaran riil per kapita laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Bahkan, *gap* tertinggi mencapai 12.125 ribu rupiah yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan terendah sebesar 3.669 ribu rupiah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, 14 provinsi memiliki *gap* yang lebih tinggi dan 20 provinsi memiliki *gap* lebih rendah dibandingkan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.9 Perbedaan Pengeluaran Riil per Kapita antara Perempuan dan Laki-laki menurut Provinsi (ribu rupiah per tahun), 2023

4.3 Capaian IPG Indonesia di Tingkat Nasional dan Provinsi

IPG merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks ini membandingkan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki berdasarkan dimensi dalam IPM. Capaian IPG yang tinggi menunjukkan kualitas perempuan dan laki-laki yang semakin setara dan begitu pula sebaliknya. Capaian IPG yang baik akan berdampak terhadap optimalisasi peran masing-masing gender dalam pembangunan.

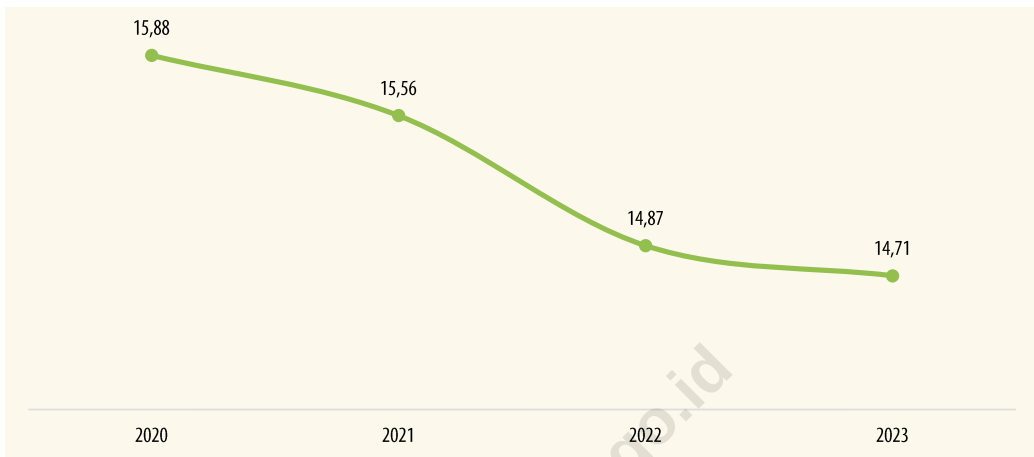
Menilik Gambar 4.10, IPG nasional memiliki tren naik atau meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan, IPG nasional di atas nilai 91 selama empat tahun terakhir. Selain itu, peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kesenjangan capaian kemampuan dasar antara perempuan dan laki-laki yang semakin berkurang. Pada tahun 2023, IPG nasional mencapai 92,29 atau meningkat sebanyak 0,24 poin dari tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia, 2020–2023

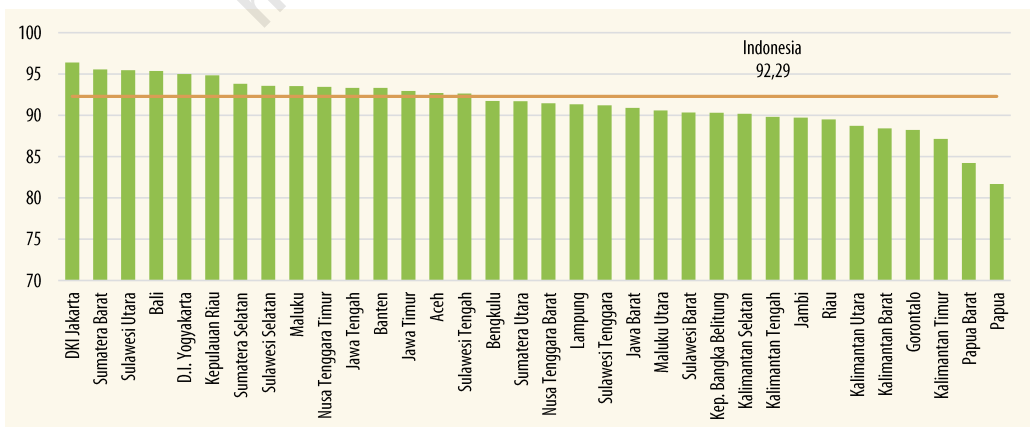
Sejalan dengan IPG yang semakin meningkat, disparitas IPG nasional tingkat provinsi juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan, penurunan selama empat tahun terakhir mencapai satu poin lebih, dari 15,88 pada tahun 2020 menjadi 14,71 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa *gap* IPG antarprovinsi di Indonesia semakin berkurang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.11 Disparitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional Tingkat Provinsi, 2020–2023

Tak hanya di tingkat nasional, kesetaraan gender dalam IPM juga terjadi pada tingkat provinsi. Bahkan, 15 provinsi sudah memiliki capaian IPG di atas nasional dan 19 provinsi lainnya masih di bawah nasional. Dilihat dari Gambar 4.12, Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian IPG tertinggi sebesar 96,4 sedangkan kedua provinsi yang terletak di Pulau Papua dengan capaian terendah, yaitu sebesar 84,24 untuk Provinsi Papua Barat dan 81,69 untuk Provinsi Papua.

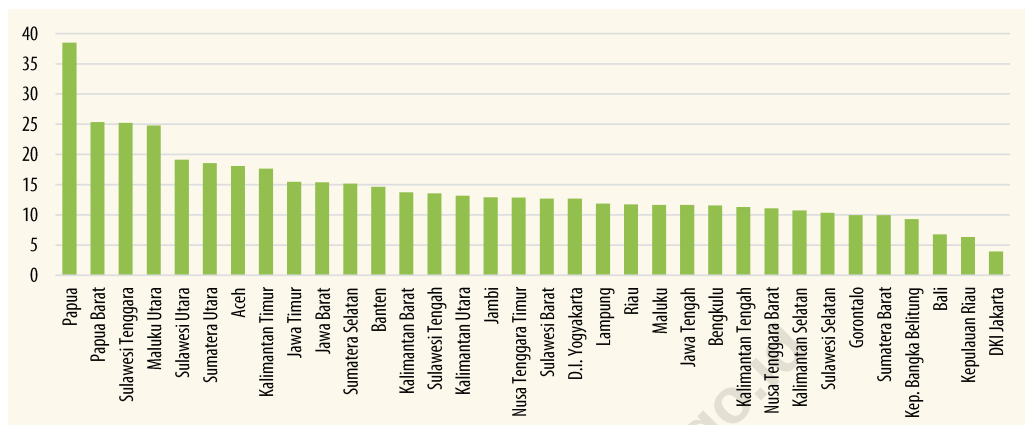


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) menurut Provinsi, 2023

Selaras dengan kondisi yang terjadi pada tingkat nasional, peningkatan nilai IPG tingkat provinsi juga dibarengi dengan penurunan disparitas IPG provinsi tingkat kabupaten/kota. Terlebih lagi dengan adanya fakta yang memperlihatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta

memiliki IPG tertinggi dengan disparitas IPG terendah dan Provinsi Papua memiliki IPG terendah dengan disparitas IPG tertinggi. Jika dibandingkan, terdapat selisih sebesar 34,55 poin antara disparitas IPG Provinsi DKI Jakarta dengan Papua yang mana rincian disparitas IPG Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 3,95 sedangkan Provinsi Papua mencapai 38,5.



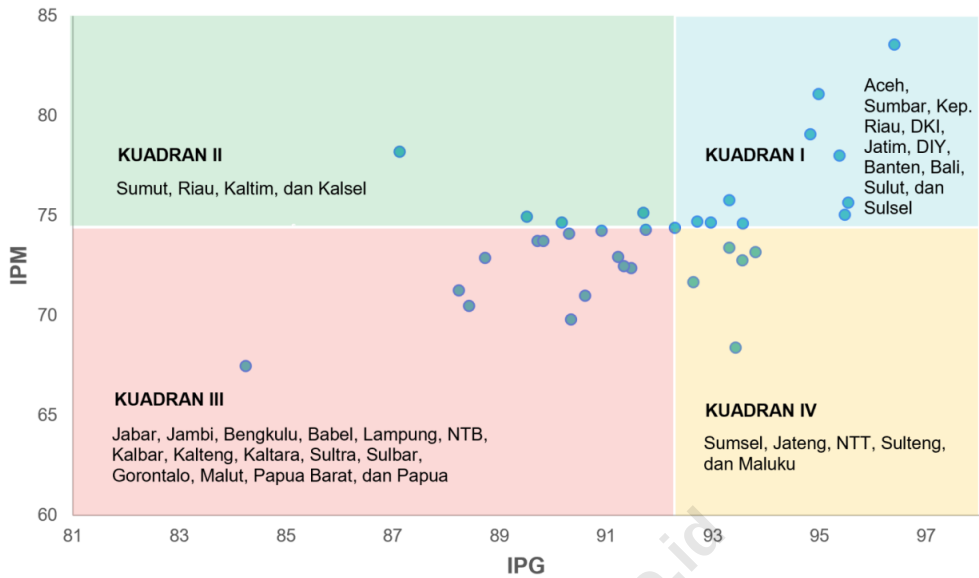
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.13 Disparitas Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota, 2023

4.4 Hubungan Antara IPG dengan IPM

Hubungan antara IPG dan IPM dapat dilihat dengan salah satu metode analisis, yaitu analisis kuadran. IPG dan IPM tingkat provinsi dipetakan melalui diagram pencar dan dibagi habis menjadi empat kuadran yang terbentuk dari titik IPG dan IPM tingkat nasional. Provinsi-provinsi yang terletak pada kuadran I memiliki IPG dan IPM di atas capaian nasional, sedangkan kuadran II memiliki IPG di bawah capaian nasional namun IPM di atas capaian nasional, kuadran III memiliki IPG dan IPM di bawah capaian nasional, serta kuadran IV memiliki IPG di atas capaian nasional namun IPM di bawah capaian nasional.

Ditinjau lebih lanjut, provinsi-provinsi yang terletak di kuadran I memiliki keselarasan dimana capaian IPM yang tinggi dibarengi dengan IPG yang tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang semakin baik di provinsi-provinsi tersebut dirasakan secara merata baik oleh perempuan dan laki-laki. Sedangkan pada kuadran II, capaian IPM yang tinggi berbanding terbalik dengan capaian IPG. Pembangunan manusia yang semakin baik pada provinsi-provinsi tersebut tidak dirasakan secara merata atau kesenjangan antargender terjadi dalam menikmati hasil pembangunan. Beralih ke kuadran III, provinsi-provinsi pada kuadran ini memiliki capaian pembangunan yang rendah dengan diperparah oleh tingginya kesenjangan antargender. Terakhir terkait kuadran IV, capaian pembangunan manusia dari provinsi-provinsi pada kuadran ini masih rendah, namun kesenjangan dalam menikmati hasil pembangunannya lebih baik.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.14 Pembagian Kuadran Provinsi berdasarkan Nilai IPG dan IPM, 2023

Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi

5



Profil Pembangunan Manusia Nasional dan Provinsi

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana pembangunan manusia di Indonesia tahun 2023. Dalam bab ini disajikan profil pembangunan manusia nasional dan provinsi. Informasi profil pembangunan manusia ini disajikan dalam dua halaman yang berisikan gambaran tentang capaian dan status pembangunan manusia nasional dan setiap provinsi.

Halaman pertama memuat informasi tentang capaian IPM tahun 2023 dan indikator komponen penyusunnya serta rata-rata pertumbuhan selama periode 2020-2023. Informasi selanjutnya adalah perbandingan capaian IPM provinsi dengan IPM nasional. Informasi ini menunjukkan sejauh mana kinerja provinsi dalam pembangunan manusia jika dibandingkan dengan capaian nasional. Pada halaman ini juga memuat data capaian pemerataan pembangunan manusia di setiap provinsi. Informasi tersebut disajikan melalui perkembangan data disparitas dan capaian IPM kabupaten/kota tertinggi dan terendah selama tahun 2020-2023 serta status IPM kabupaten/kota tahun 2020 dan 2023 dari masing-masing provinsi.

Halaman kedua memuat data beberapa indikator yang terkait dengan pembangunan manusia serta perubahannya antara tahun 2022-2023. Indikator-indikator tersebut memberikan informasi lain yang terkait dengan capaian pembangunan manusia di setiap provinsi. Selain itu, indikator-indikator tersebut diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan sekaligus evaluasi dari upaya peningkatan pembangunan manusia di tingkat provinsi.

Upaya peningkatan pembangunan manusia tidak dapat berdiri sendiri. Capaian pembangunan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tiga diantaranya terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Strategi yang tepat dan sinergi dari seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menaklukkan berbagai tantangan, serta untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih baik dan berkelanjutan.

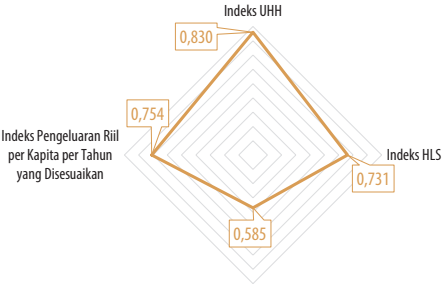
Indonesia

IPM 2023: **74,39** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,84%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,72%**

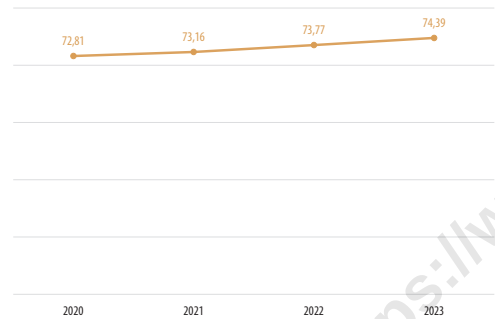
Tabel 5.1 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Indonesia, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,93 tahun	0,25
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,15 tahun	0,43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,77 tahun	1,13
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.899 ribu	2,61

Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



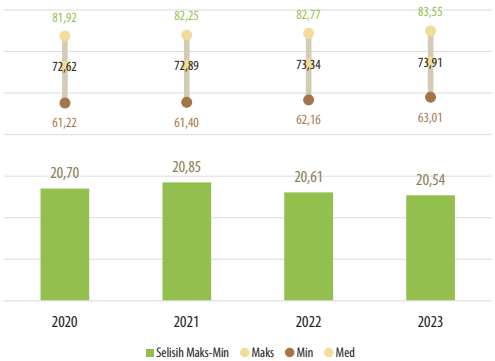
Gambar 5.1 Indeks Indikator Komponen IPM Indonesia, 2023



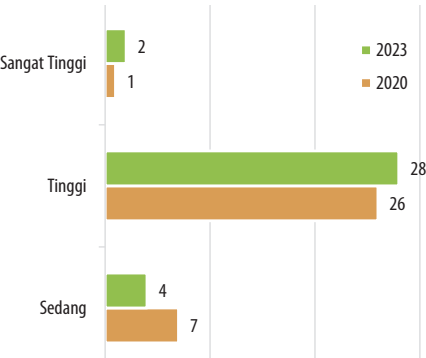
Gambar 5.2 Perkembangan IPM Indonesia, 2020–2023



Gambar 5.3 Pertumbuhan IPM Indonesia, 2021–2023



Gambar 5.4 Disparitas dan Capaian IPM Provinsi Tertinggi dan Terendah di Indonesia, 2020–2023



Catatan: Tidak ada provinsi yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.5 Jumlah Provinsi di Indonesia menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.2 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Indonesia, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	74,95	76,97	2,02
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,05	91,72	0,67
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	5,74	4,10	-1,64
Morbiditas	%	13,36	11,15	-2,21
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	14,15	14,58	0,43
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	90,21	91,15	0,94
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	95,79	96,04	0,25
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,10	99,16	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,92	96,10	0,18
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	73,15	73,42	0,27
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,99	26,85	0,86
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,56	0,67	0,11
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,94	6,93	-0,01
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	22,52	21,61	-0,91
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	89,78	87,01	-2,77
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	87,50	87,75	0,25
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	71.043	74.965	3.921
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	42.472	44.139	1.668
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	135.296.713	139.852.377	4.555.664
Persentase Pekerja Formal ¹	%	40,69	40,89	0,20
Persentase Pekerja Informal ¹	%	59,31	59,11	-0,20
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.070.756	3.178.227	107.471
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,86	5,32	-0,54
Penduduk Miskin ²	ribu orang	26.161	25.899	-262,61
Penduduk Miskin ³	ribu orang	26.363	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	9,54	9,36	-0,18
Persentase Penduduk Miskin ³	%	9,57	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,384	0,388	0,004
Gini Rasio ³	–	0,381	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

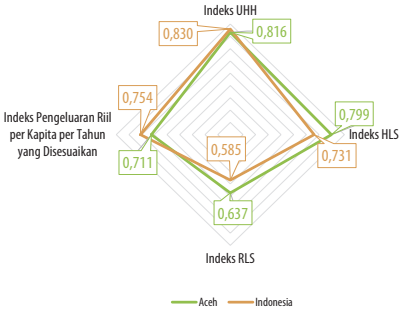
Aceh

IPM 2023: **74,70** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,80%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,64%**

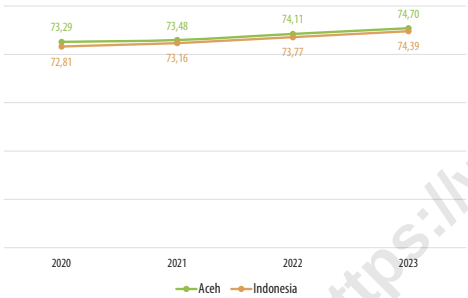
Tabel 5.3 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Aceh, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,06 tahun	0,17
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,38 tahun	0,16
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,55 tahun	0,78
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.334 ribu	2,87

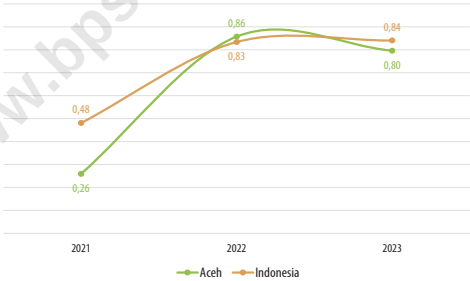
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



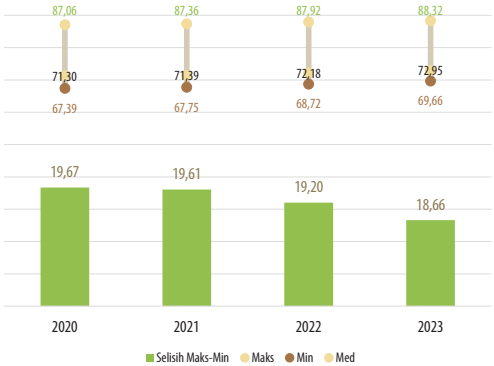
Gambar 5.6 Indeks Indikator Komponen IPM Aceh, 2023



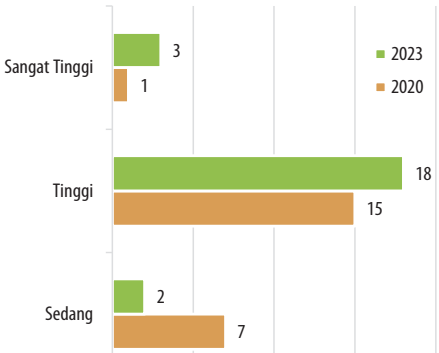
Gambar 5.7 Perkembangan IPM Aceh, 2020–2023



Gambar 5.8 Pertumbuhan IPM Aceh, 2021–2023



Gambar 5.9 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Aceh, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.10 Jumlah Kabupaten/Kota di Aceh menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.4 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Aceh, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	71,74	73,17	1,43
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	89,70	89,74	0,04
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	13,04	8,84	-4,20
Morbiditas	%	19,44	14,51	-4,93
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	8,57	8,77	0,20
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	92,55	94,42	1,87
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,53	98,95	0,42
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,44	99,43	-0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,96	97,72	-0,24
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	83,10	83,41	0,31
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	31,72	33,10	1,38
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,32	0,24	-0,08
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,13	3,48	0,35
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	14,30	9,76	-4,54
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	88,68	81,30	-7,38
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	82,89	80,08	-2,81
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	38.900	41.424	2.524
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	26.062	26.800	739
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.394.994	2.447.345	52.351
Persentase Pekerja Formal ¹	%	38,55	40,14	1,59
Persentase Pekerja Informal ¹	%	61,45	59,86	-1,59
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.327.990	2.594.530	266.540
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,17	6,03	-0,14
Penduduk Miskin ²	ribu orang	807	807	-0,07
Penduduk Miskin ³	ribu orang	818	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	14,64	14,45	-0,19
Persentase Penduduk Miskin ³	%	14,75	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,311	0,296	-0,015
Gini Rasio ³	–	0,291	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

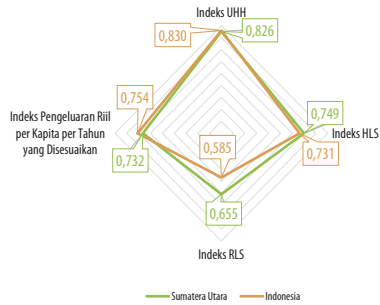
Sumatera Utara

IPM 2023: **75,13** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,83%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,68%**

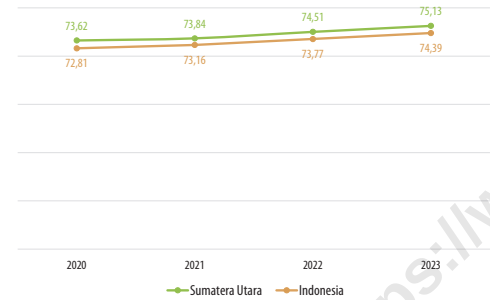
Tabel 5.5 Capaian Indikator Komponen Penyusun
IPM Sumatera Utara, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,67 tahun	0,31
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,48 tahun	0,63
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,82 tahun	0,97
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.049 ribu	1,97

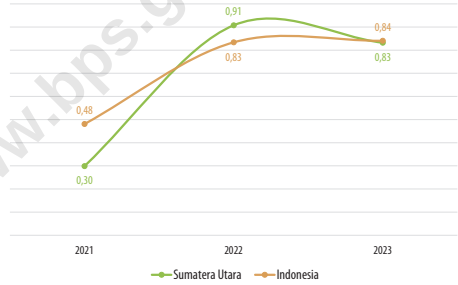
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



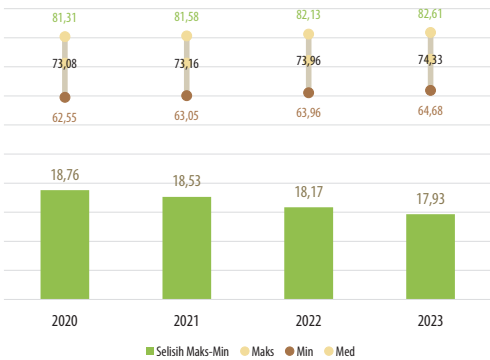
Gambar 5.11 Indeks Indikator Komponen
IPM Sumatera Utara, 2023



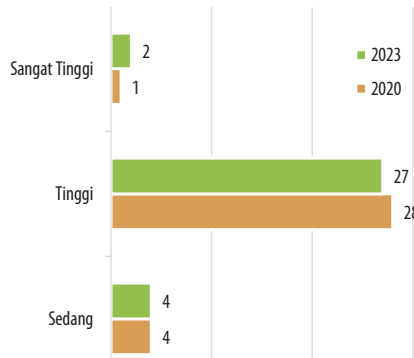
Gambar 5.12 Perkembangan IPM Sumatera
Utara, 2020–2023



Gambar 5.13 Pertumbuhan IPM Sumatera Utara,
2021–2023



Gambar 5.14 Disparitas dan Capaian IPM
Kabupaten/Kota Tertinggi dan
Terendah di Sumatera Utara,
2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.15 Jumlah Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara menurut Status
IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.6 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Utara, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	71,02	72,27	1,25
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,13	92,19	0,06
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	6,90	4,73	-2,17
Morbiditas	%	12,98	10,10	-2,88
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	4,76	5,07	0,31
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	88,05	89,37	1,32
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	97,11	97,11	0,00
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,50	99,51	0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,78	96,76	-0,02
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	78,66	79,25	0,59
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,60	28,61	2,01
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,37	0,34	-0,03
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,73	4,50	-0,23
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,41	13,27	0,86
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	89,24	86,45	-2,79
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,57	89,23	-0,34
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	62.922	68.306	5.383
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	37.781	39.140	1.360
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	7.197.374	7.549.537	352.163
Persentase Pekerja Formal ¹	%	40,93	41,48	0,55
Persentase Pekerja Informal ¹	%	59,07	58,52	-0,55
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.576.442	2.610.584	34.142
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,16	5,89	-0,27
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.268	1.240	-28,48
Penduduk Miskin ³	ribu orang	1.262	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	8,42	8,15	-0,27
Persentase Penduduk Miskin ³	%	8,33	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,312	0,309	-0,003
Gini Rasio ³	–	0,326	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

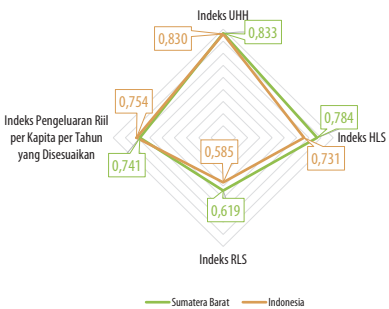
Sumatera Barat

IPM 2023: **75,64** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,64%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,60%**

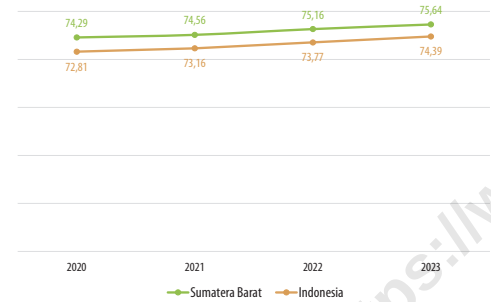
Tabel 5.7 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,14 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,11 tahun	0,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,28 tahun	1,06
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11380 ribu	1,97

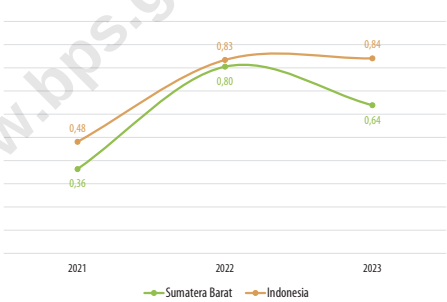
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



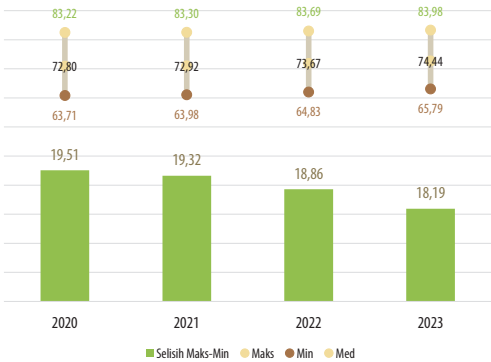
Gambar 5.16 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Barat, 2023



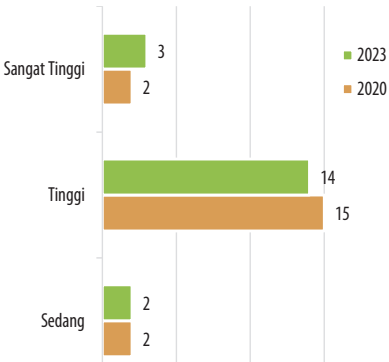
Gambar 5.17 Perkembangan IPM Sumatera Barat, 2020–2023



Gambar 5.18 Pertumbuhan IPM Sumatera Barat, 2021–2023



Gambar 5.19 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Barat, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.20 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.8 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	76,53	78,68	2,15
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	85,23	85,59	0,36
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	12,49	9,18	-3,31
Morbiditas	%	13,99	11,84	-2,15
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	7,80	7,83	0,03
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	95,83	95,93	0,10
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,00	97,66	-0,34
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,55	99,76	0,21
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,52	96,79	0,27
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	83,71	84,33	0,62
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	35,41	38,08	2,67
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,28	0,29	0,01
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,10	5,14	0,04
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	16,45	14,45	-2,00
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,21	89,72	-0,49
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	94,20	89,54	-4,66
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	50.264	54.327	4.063
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	32.167	33.188	1.021
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.688.164	2.844.925	156.761
Persentase Pekerja Formal ¹	%	34,74	35,81	1,07
Persentase Pekerja Informal ¹	%	65,26	64,19	-1,07
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.655.767	2.753.517	97.750
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,28	5,94	-0,34
Penduduk Miskin ²	ribu orang	335	340	5,16
Penduduk Miskin ³	ribu orang	344	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,92	5,95	0,03
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,04	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,300	0,280	-0,020
Gini Rasio ³	–	0,292	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

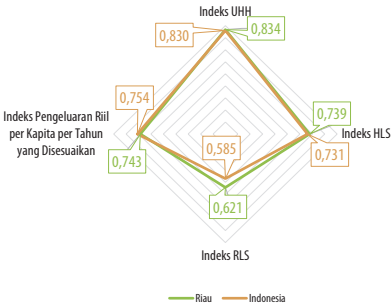
Riau

IPM 2023: **74,95** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,67%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,58%**

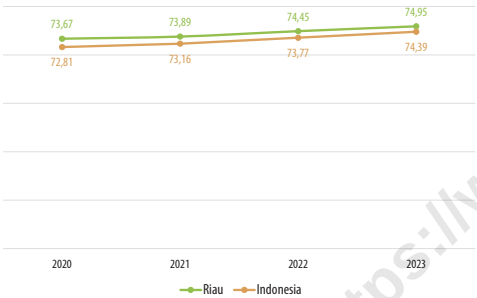
Tabel 5.9 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Riau, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,18 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,3 tahun	0,25
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,32 tahun	0,65
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.448 ribu	2,36

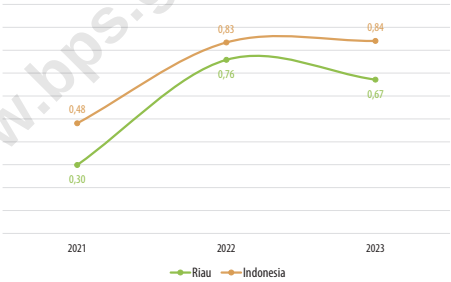
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



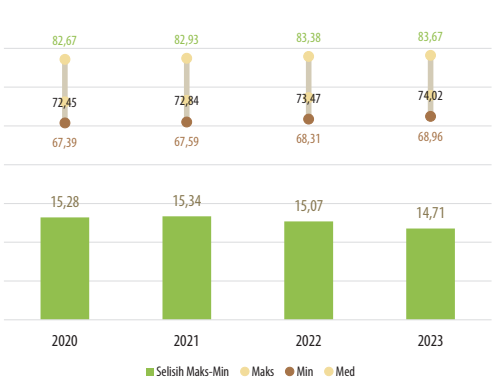
Gambar 5.21 Indeks Indikator Komponen IPM Riau, 2023



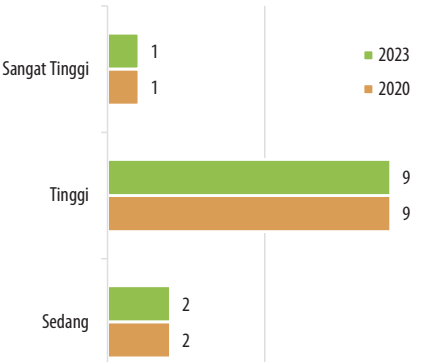
Gambar 5.22 Perkembangan IPM Riau, 2020–2023



Gambar 5.23 Pertumbuhan IPM Riau, 2021–2023



Gambar 5.24 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Riau, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM "Rendah"

Gambar 5.25 Jumlah Kabupaten/Kota di Riau menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.10 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Riau, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	70,15	72,70	2,55
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	90,07	90,47	0,40
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	3,99	2,59	-1,40
Morbiditas	%	11,75	9,68	-2,07
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	9,49	9,10	-0,39
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	86,67	87,51	0,84
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	96,49	96,67	0,18
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,61	99,65	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,72	95,89	0,17
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,32	78,15	0,83
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	28,65	30,07	1,42
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,56	0,47	-0,09
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,50	5,79	0,29
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	18,23	16,64	-1,59
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,90	90,40	-4,50
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,30	88,91	-1,39
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	151.259	154.522	3.263
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	80.774	83.071	2.297
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	3.168.929	3.002.334	-166.595
Persentase Pekerja Formal ¹	%	45,98	47,87	1,89
Persentase Pekerja Informal ¹	%	54,02	52,13	-1,89
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.889.691	3.011.040	121.349
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,37	4,23	-0,14
Penduduk Miskin ²	ribu orang	485	486	0,63
Penduduk Miskin ³	ribu orang	493	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,78	6,68	-0,10
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,84	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,326	0,324	-0,002
Gini Rasio ³	–	0,323	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

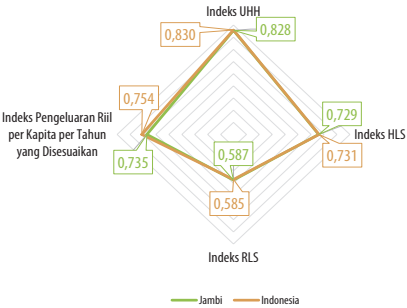
Jambi

IPM 2023: **73,73** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,85%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,66%**

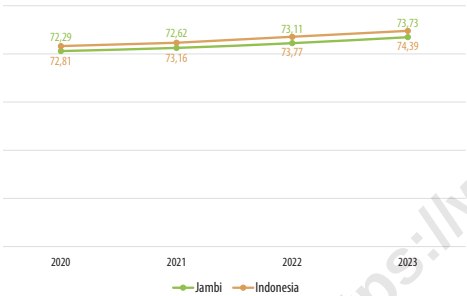
Tabel 5.11 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jambi, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,84 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,13 tahun	0,38
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81 tahun	1,00
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.160 ribu	2,41

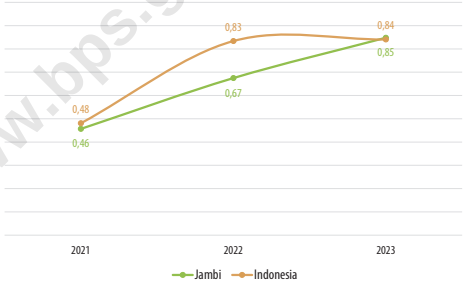
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



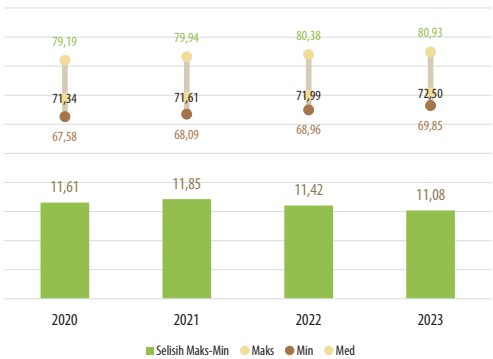
Gambar 5.26 Indeks Indikator Komponen IPM Jambi, 2023



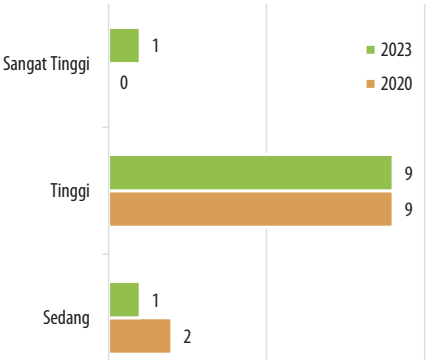
Gambar 5.27 Perkembangan IPM Jambi, 2020–2023



Gambar 5.28 Pertumbuhan IPM Jambi, 2021–2023



Gambar 5.29 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jambi, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM "Rendah"

Gambar 5.30 Jumlah Kabupaten/Kota di Jambi menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.12 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jambi, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	67,28	67,47	0,19
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	79,19	80,02	0,83
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	9,37	5,40	-3,97
Morbiditas	%	12,11	10,73	-1,38
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	16,46	16,00	-0,46
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	81,14	81,12	-0,02
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	95,41	95,52	0,11
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,33	99,49	0,16
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,20	96,01	-0,19
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,53	72,46	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,35	23,98	0,63
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,29	0,37	0,08
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,25	7,62	0,37
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,96	19,45	-1,51
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	87,65	82,63	-5,02
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	87,52	81,77	-5,75
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	76.164	79.836	3.671
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	44.515	46.007	1.493
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.797.819	1.802.264	4.445
Persentase Pekerja Formal ¹	%	40,02	40,27	0,25
Persentase Pekerja Informal ¹	%	59,98	59,73	-0,25
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.520.767	2.668.478	147.711
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,59	4,53	-0,06
Penduduk Miskin ²	ribu orang	279	281	1,31
Penduduk Miskin ³	ribu orang	284	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,62	7,58	-0,04
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,70	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,320	0,343	0,023
Gini Rasio ³	–	0,335	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

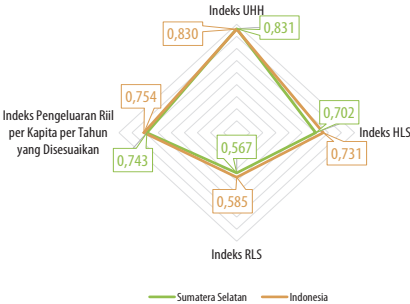
Sumatera Selatan

IPM 2023: **73,18** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,97%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,72%**

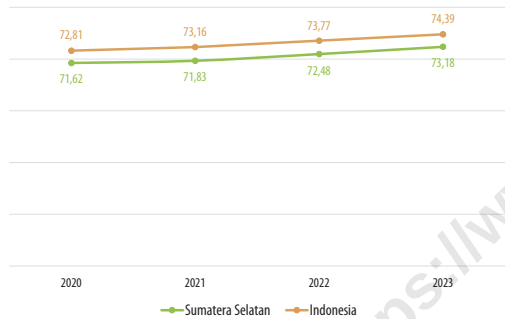
Tabel 5.13 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sumatera Selatan, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,04 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,63 tahun	0,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,5 tahun	1,04
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.472 ribu	2,50

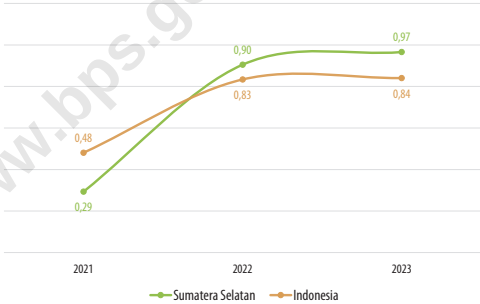
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



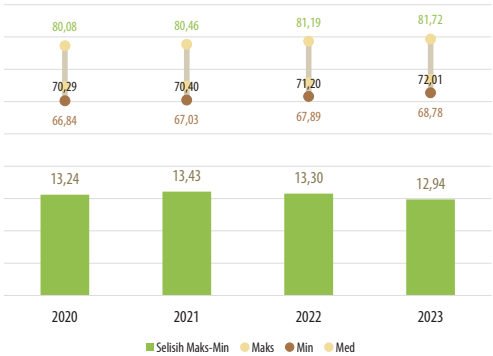
Gambar 5.31 Indeks Indikator Komponen IPM Sumatera Selatan, 2023



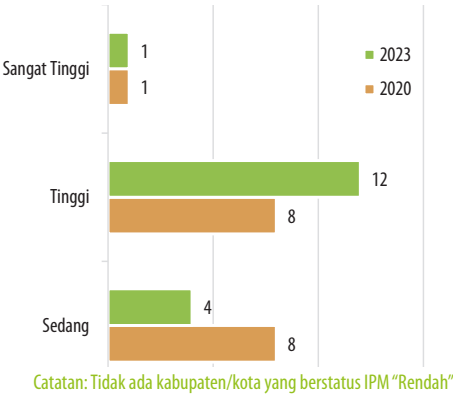
Gambar 5.32 Perkembangan IPM Sumatera Selatan, 2020–2023



Gambar 5.33 Pertumbuhan IPM Sumatera Selatan, 2021–2023



Gambar 5.34 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sumatera Selatan, 2020–2023



Gambar 5.35 Jumlah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.14 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sumatera Selatan, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	65,70	67,54	1,84
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	86,35	87,19	0,84
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,82	5,28	-2,54
Morbiditas	%	10,73	8,29	-2,44
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	12,92	12,82	-0,10
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	85,14	87,24	2,10
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	95,64	96,22	0,58
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,38	99,41	0,03
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,06	95,27	0,21
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	70,93	71,71	0,78
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	18,61	19,79	1,18
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,55	0,58	0,03
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,67	7,09	-0,58
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	23,99	20,05	-3,94
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,53	82,53	-9,00
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,16	86,07	-3,09
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	68.237	71.950	3.713
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.719	41.278	1.559
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.289.704	4.399.659	109.955
Persentase Pekerja Formal ¹	%	36,72	37,03	0,31
Persentase Pekerja Informal ¹	%	63,28	62,97	-0,31
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.630.695	2.767.669	136.974
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,63	4,11	-0,52
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.045	1.046	0,99
Penduduk Miskin ³	ribu orang	1.055	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,90	11,78	-0,12
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,95	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,339	0,338	-0,001
Gini Rasio ³	–	0,330	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

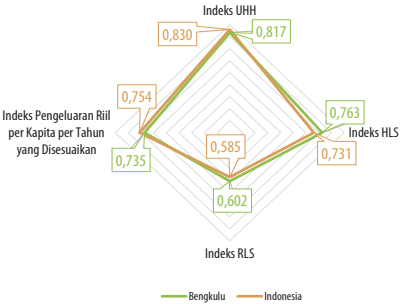
Bengkulu

IPM 2023: **74,30** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,84%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,62%**

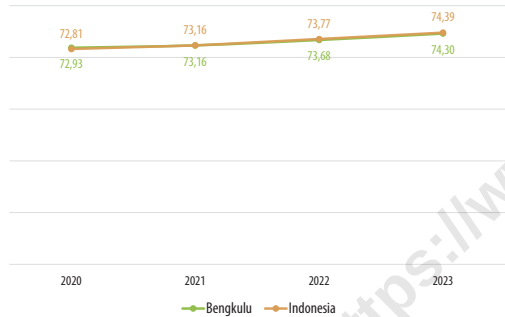
Tabel 5.15 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bengkulu, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,11 tahun	0,24
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,74 tahun	0,32
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,03 tahun	0,71
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.172 ribu	2,48

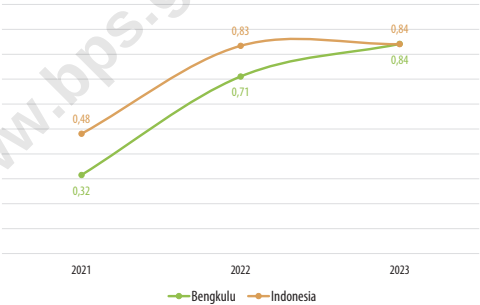
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



Gambar 5.36 Indeks Indikator Komponen IPM Bengkulu, 2023



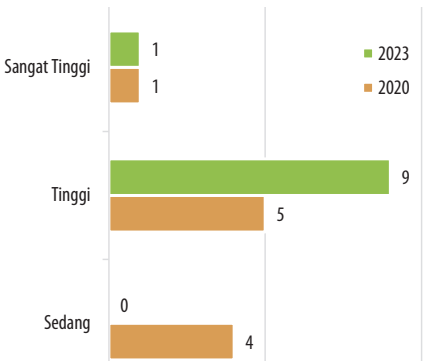
Gambar 5.37 Perkembangan IPM Bengkulu, 2020–2023



Gambar 5.38 Pertumbuhan IPM Bengkulu, 2021–2023



Gambar 5.39 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bengkulu, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.40 Jumlah Kabupaten/Kota di Bengkulu menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.16 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bengkulu, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	55,01	56,42	1,41
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	73,07	73,08	0,01
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,49	5,03	-2,46
Morbiditas	%	12,46	11,75	-0,71
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	15,28	16,05	0,77
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	91,66	93,74	2,08
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,55	98,47	-0,08
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,49	99,42	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,73	97,91	0,18
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	79,31	79,57	0,26
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,42	30,74	1,32
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,31	0,49	0,18
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,52	4,46	-0,06
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,05	18,35	-1,70
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,06	91,40	0,34
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,42	90,24	-2,18
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	43.757	46.285	2.528
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	24.238	24.948	709
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.037.496	1.069.615	32.119
Persentase Pekerja Formal ¹	%	32,46	32,23	-0,23
Persentase Pekerja Informal ¹	%	67,54	67,77	0,23
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.737.834	2.740.734	2.900
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,59	3,42	-0,17
Penduduk Miskin ²	ribu orang	297	288	-8,77
Penduduk Miskin ³	ribu orang	293	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	14,62	14,04	-0,58
Persentase Penduduk Miskin ³	%	14,34	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,315	0,333	0,018
Gini Rasio ³	–	0,315	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

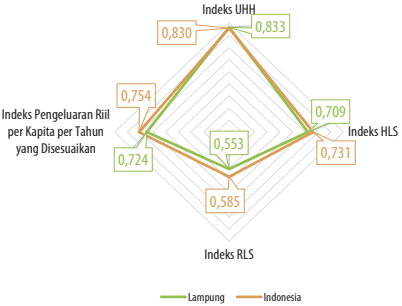
Lampung

IPM 2023: **72,48** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,96%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,67%**

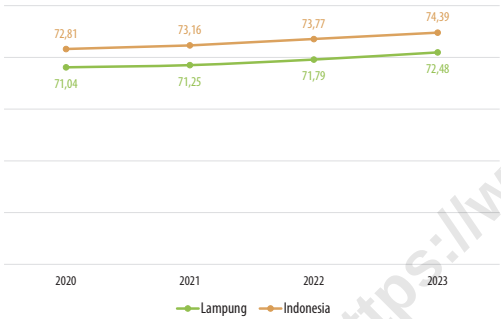
Tabel 5.17 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Lampung, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,17 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,77 tahun	0,32
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,29 tahun	0,98
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.769 ribu	2,56

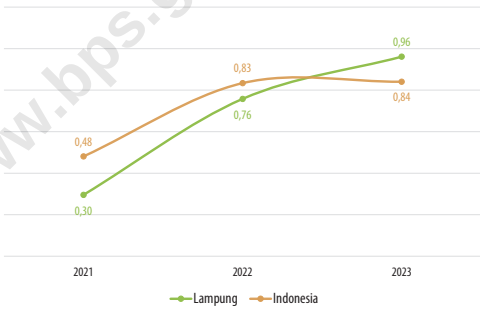
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



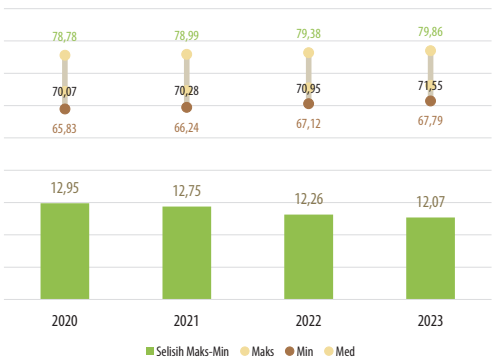
Gambar 5.41 Indeks Indikator Komponen IPM Lampung, 2023



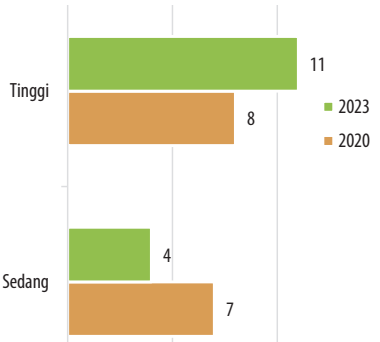
Gambar 5.42 Perkembangan IPM Lampung, 2020–2023



Gambar 5.43 Pertumbuhan IPM Lampung, 2021–2023



Gambar 5.44 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Lampung, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sangat Tinggi”

Gambar 5.45 Jumlah Kabupaten/Kota di Lampung menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.18 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Lampung, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	65,50	67,89	2,39
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	81,60	82,78	1,18
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	2,61	1,54	-1,07
Morbiditas	%	15,19	11,39	-3,80
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	12,66	12,57	-0,09
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	92,21	94,01	1,80
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	97,62	98,40	0,78
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,56	99,61	0,05
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,63	95,93	0,30
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,14	71,74	0,60
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	20,72	21,66	0,94
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,40	0,56	0,16
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,51	7,78	1,27
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	25,17	23,48	-1,69
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	95,31	87,03	-8,28
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,92	85,75	-4,17
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	44.984	48.194	3.211
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	27.974	28.907	933
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.387.966	4.697.658	309.692
Persentase Pekerja Formal ¹	%	28,49	29,33	0,84
Persentase Pekerja Informal ¹	%	71,51	70,67	-0,84
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.322.728	2.424.538	101.810
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,52	4,23	-0,29
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.002	971	-31,74
Penduduk Miskin ³	ribu orang	996	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,57	11,11	-0,46
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,44	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,314	0,324	0,010
Gini Rasio ³	–	0,313	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

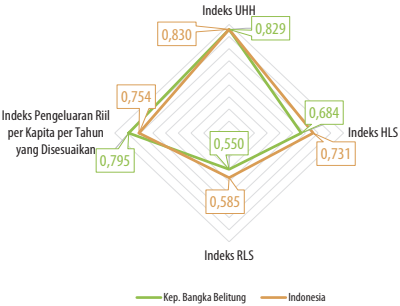
Kep. Bangka Belitung

IPM 2023: **74,09** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,80%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,61%**

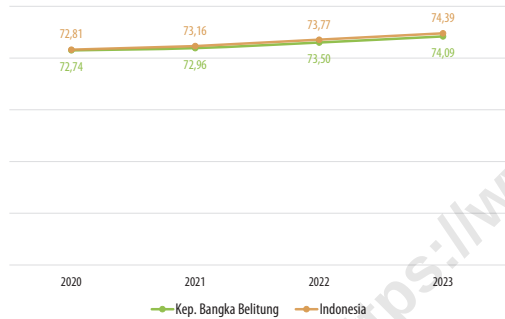
Tabel 5.19 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,9 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,31 tahun	0,71
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,25 tahun	0,78
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.589 ribu	2,03

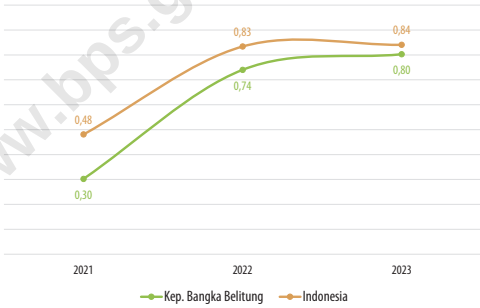
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



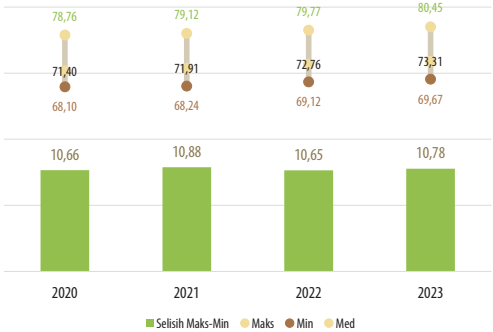
Gambar 5.46 Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2023



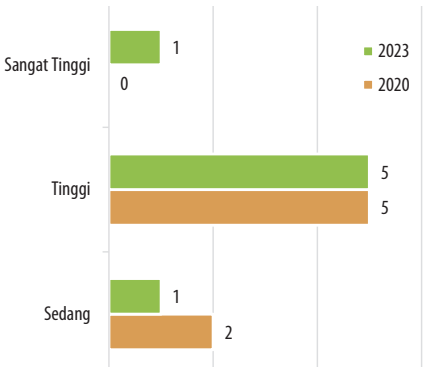
Gambar 5.47 Perkembangan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2020–2023



Gambar 5.48 Pertumbuhan IPM Kepulauan Bangka Belitung, 2021–2023



Gambar 5.49 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Bangka Belitung, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.50 Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.20 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Bangka Belitung, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	84,00	85,82	1,82
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	80,96	81,64	0,68
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	4,05	1,72	-2,33
Morbiditas	%	13,05	10,06	-2,99
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	11,76	11,89	0,13
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,03	97,26	1,23
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,48	98,69	-0,79
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,41	99,51	0,10
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,00	93,20	0,20
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	68,42	69,53	1,11
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	17,68	17,59	-0,09
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,25	0,36	0,11
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	11,42	10,98	-0,44
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	22,56	21,69	-0,87
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	97,26	92,18	-5,08
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	91,09	95,41	4,32
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	63.872	67.885	4.014
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	38.744	39.909	1.165
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	730.972	749.815	18.843
Persentase Pekerja Formal ¹	%	50,37	48,93	-1,44
Persentase Pekerja Informal ¹	%	49,63	51,07	1,44
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.969.146	3.221.747	252.601
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,77	4,56	-0,21
Penduduk Miskin ²	ribu orang	67	69	1,91
Penduduk Miskin ³	ribu orang	70	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,45	4,52	0,07
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,61	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,236	0,245	0,009
Gini Rasio ³	–	0,255	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

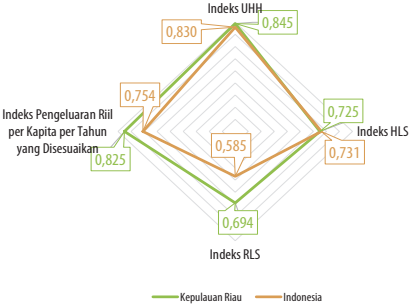
Kepulauan Riau

IPM 2023: **79,08** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,76%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,59%**

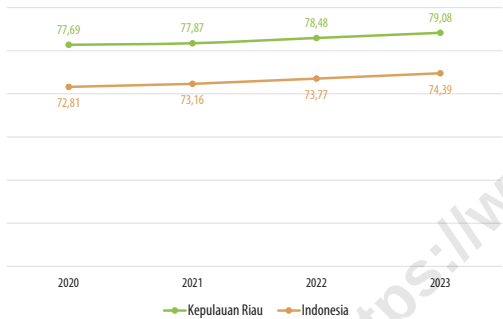
Tabel 5.21 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kepulauan Riau, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,9 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,05 tahun	0,46
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,41 tahun	0,95
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp14.998 ribu	1,82

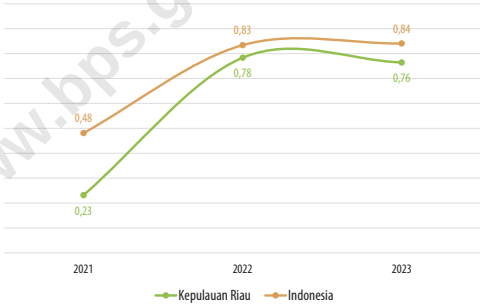
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



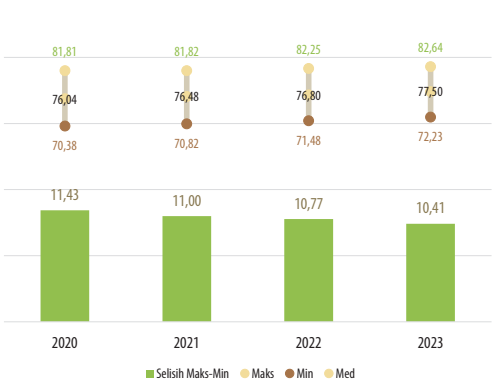
Gambar 5.51 Indeks Indikator Komponen IPM Kepulauan Riau, 2023



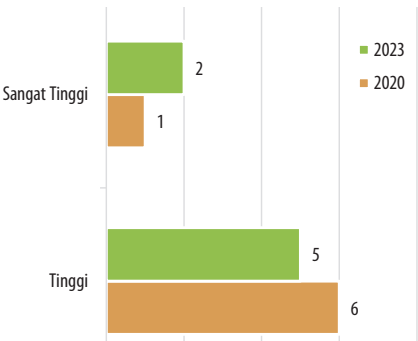
Gambar 5.52 Perkembangan IPM Kepulauan Riau, 2020–2023



Gambar 5.53 Pertumbuhan IPM Kepulauan Riau, 2021–2023



Gambar 5.54 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kepulauan Riau, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sedang”

Gambar 5.55 Jumlah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.22 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kepulauan Riau, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	92,67	92,27	-0,40
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,82	92,10	0,28
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,55	0,46	-0,09
Morbiditas	%	8,18	9,99	1,81
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	4,11	5,22	1,11
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,34	96,06	-0,28
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,15	96,86	-1,29
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,28	99,29	0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	99,01	99,07	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	84,54	84,97	0,43
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	19,50	20,51	1,01
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,53	2,84	0,31
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	13,06	13,04	-0,02
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	87,80	80,31	-7,49
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	86,67	86,35	-0,32
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	145.579	154.179	8.600
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	89.637	92.930	3.293
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.155.997	1.019.356	-136.641
Persentase Pekerja Formal ¹	%	63,68	66,33	2,65
Persentase Pekerja Informal ¹	%	36,32	33,67	-2,65
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.155.520	4.651.057	495.537
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	8,23	6,80	-1,43
Penduduk Miskin ²	ribu orang	152	143	-9,18
Penduduk Miskin ³	ribu orang	149	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,24	5,69	-0,55
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,03	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,342	0,340	-0,002
Gini Rasio ³	—	0,325	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

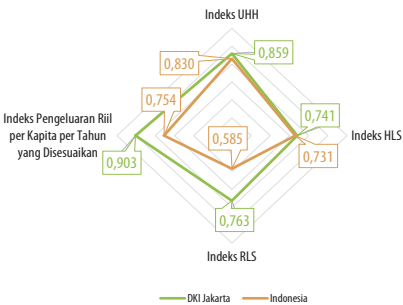
DKI Jakarta

IPM 2023: **83,55** Status Pembangunan Manusia: **SANGAT TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,94%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,66%**

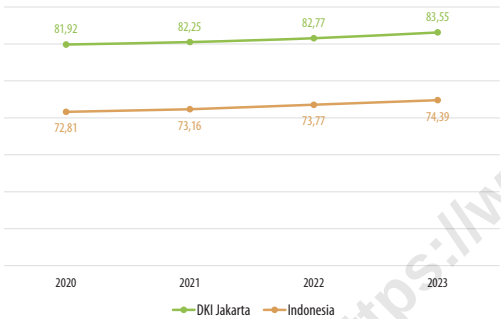
Tabel 5.23 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM DKI Jakarta, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,81 tahun	0,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,33 tahun	0,89
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,45 tahun	0,95
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp19.373 ribu	2,05

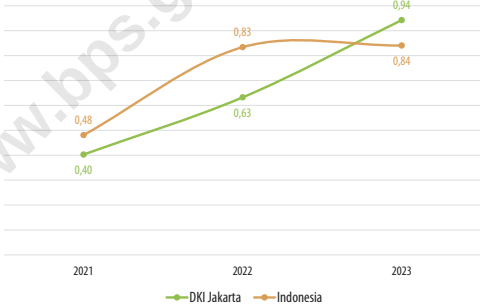
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



Gambar 5.56 Indeks Indikator Komponen IPM DKI Jakarta, 2023



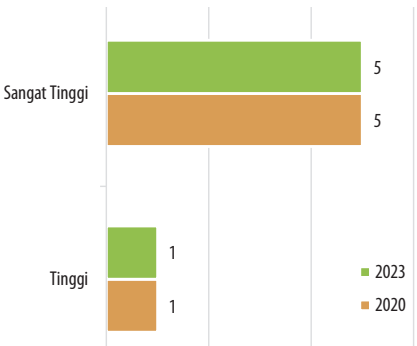
Gambar 5.57 Perkembangan IPM DKI Jakarta, 2020–2023



Gambar 5.58 Pertumbuhan IPM DKI Jakarta, 2021–2023



Gambar 5.59 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di DKI Jakarta, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sedang”

Gambar 5.60 Jumlah Kabupaten/Kota di DKI Jakarta menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.24 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia DKI Jakarta, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	90,67	93,92	3,25
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	97,93	99,42	1,49
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,52	0,13	-0,39
Morbiditas	%	4,31	8,44	4,13
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	6,44	5,25	-1,19
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,89	98,00	1,11
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,06	97,57	-1,49
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,44	99,49	0,05
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,95	98,17	0,22
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	72,10	72,50	0,40
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	24,89	26,52	1,63
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,29	5,54	1,25
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	13,78	12,06	-1,72
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	93,89	93,68	-0,21
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	87,92	96,81	8,89
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	299.675	322.615	22.941
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	183.598	192.133	8.535
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.875.102	5.072.737	197.635
Persentase Pekerja Formal ¹	%	63,12	63,77	0,65
Persentase Pekerja Informal ¹	%	36,88	36,23	-0,65
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	5.255.824	5.532.624	276.800
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	7,18	6,53	-0,65
Penduduk Miskin ²	ribu orang	502	478	-24,21
Penduduk Miskin ³	ribu orang	495	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,69	4,44	-0,25
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,61	NA	NA
Gini Rasio ²	-	0,423	0,431	0,008
Gini Rasio ³	-	0,412	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

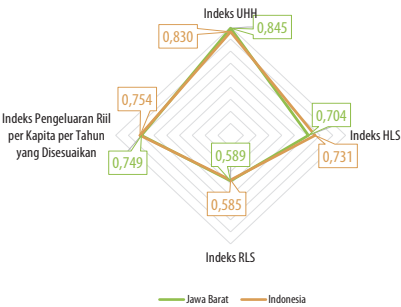
Jawa Barat

IPM 2023: **74,24** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,83%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,74%**

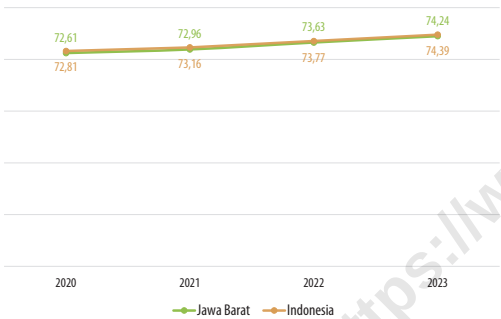
Tabel 5.25 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,91 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,68 tahun	0,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,83 tahun	1,08
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.695 ribu	2,55

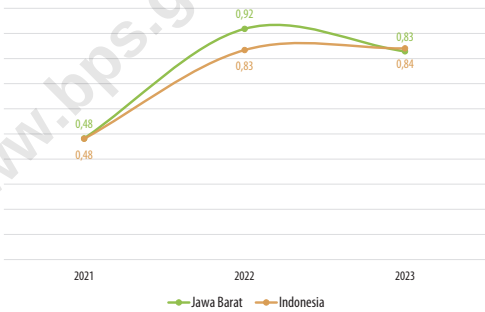
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



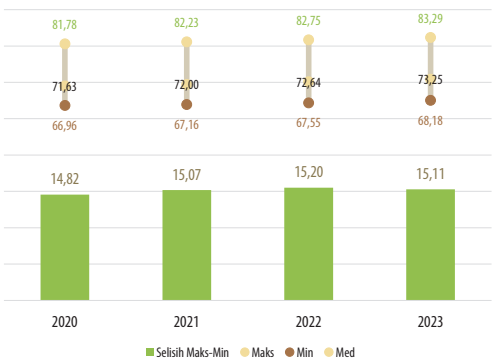
Gambar 5.61 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Barat, 2023



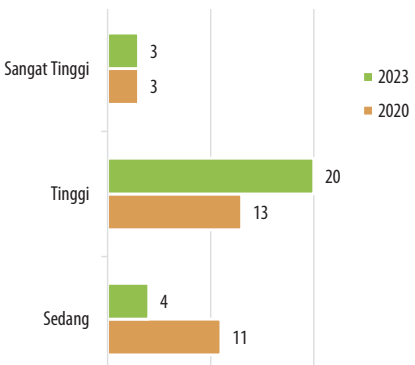
Gambar 5.62 Perkembangan IPM Jawa Barat, 2020–2023



Gambar 5.63 Pertumbuhan IPM Jawa Barat, 2021–2023



Gambar 5.64 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Barat, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.65 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.26 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	75,69	77,94	2,25
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93,04	93,86	0,82
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	3,59	2,43	-1,16
Morbiditas	%	14,91	11,50	-3,41
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	18,79	19,93	1,14
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	85,96	86,44	0,48
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	93,42	92,40	-1,02
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,39	99,40	0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	95,27	95,75	0,48
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	68,66	68,58	-0,08
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,99	24,72	0,73
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,53	0,46	-0,07
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,53	8,61	0,08
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	27,16	27,03	-0,13
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	85,86	84,97	-0,89
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	82,80	84,36	1,56
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	49.137	52.651	3.515
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	32.247	33.482	1.235
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	23.452.568	23.503.598	51.030
Persentase Pekerja Formal ¹	%	45,39	44,85	-0,54
Persentase Pekerja Informal ¹	%	54,61	55,15	0,54
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.533.613	3.674.236	140.623
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	8,31	7,44	-0,87
Penduduk Miskin ²	ribu orang	4.071	3.889	-182,38
Penduduk Miskin ³	ribu orang	4.054	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	8,06	7,62	-0,44
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,98	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,417	0,425	0,008
Gini Rasio ³	—	0,412	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

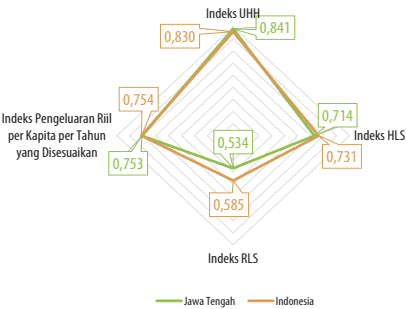
Jawa Tengah

IPM 2023: **73,39** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,81%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,70%**

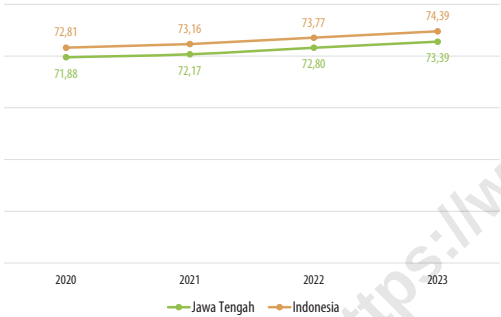
Tabel 5.27 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Tengah, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,69 tahun	0,13
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85 tahun	0,39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,01 tahun	1,37
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.835 ribu	2,69

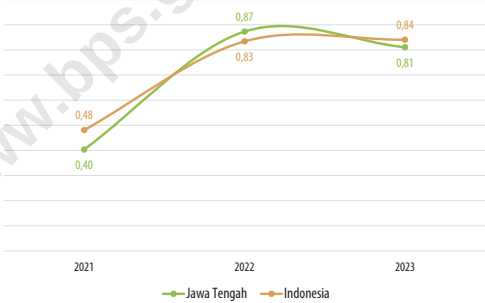
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



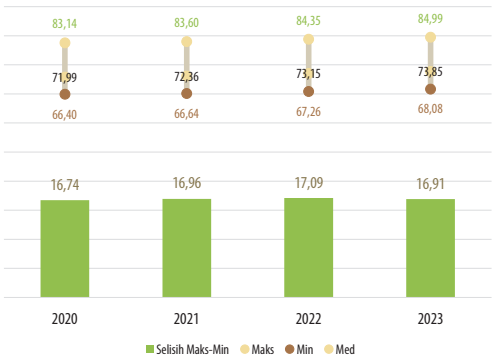
Gambar 5.66 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Tengah, 2023



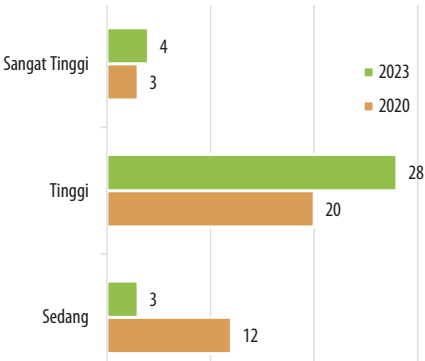
Gambar 5.67 Perkembangan IPM Jawa Tengah, 2020–2023



Gambar 5.68 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah, 2021–2023



Gambar 5.69 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Tengah, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM "Rendah"

Gambar 5.70 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.28 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Tengah, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	79,33	80,89	1,56
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	93,32	93,76	0,44
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	3,77	2,85	-0,92
Morbiditas	%	14,60	12,34	-2,26
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	15,68	15,86	0,18
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	97,69	98,29	0,60
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,10	99,09	-0,01
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,58	99,57	-0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,77	97,08	0,31
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	70,82	70,87	0,05
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,76	24,59	0,83
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,31	0,29	-0,02
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,49	6,49	-1,00
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	25,41	24,72	-0,69
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	89,75	89,13	-0,62
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	87,72	87,54	-0,18
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	41.946	45.199	3.252
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	28.248	29.370	1.121
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	18.390.459	19.988.875	1.598.416
Persentase Pekerja Formal ¹	%	39,84	39,61	-0,23
Persentase Pekerja Informal ¹	%	60,16	60,39	0,23
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.200.716	2.321.344	120.628
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,57	5,13	-0,44
Penduduk Miskin ²	ribu orang	3.831	3.792	-39,94
Penduduk Miskin ³	ribu orang	3.858	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,93	10,77	-0,16
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,98	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,374	0,369	-0,005
Gini Rasio ³	—	0,366	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

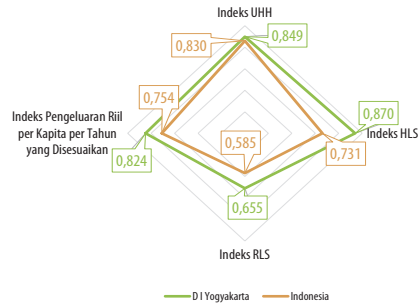
D.I. Yogyakarta

IPM 2023: 81,09 Status Pembangunan Manusia: SANGAT TINGGI
Pertumbuhan 2023: 0,55% Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: 0,47%

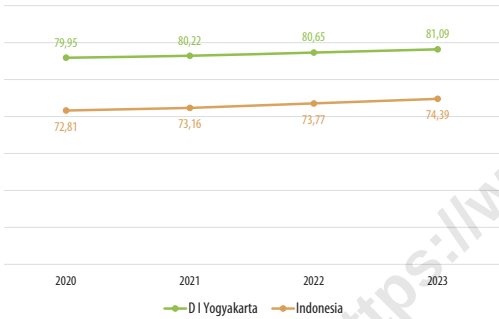
Tabel 5.29 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM D.I. Yogyakarta, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	75,18 tahun	0,10
Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,66 tahun	0,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,83 tahun	0,97
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp14.924 ribu	2,12

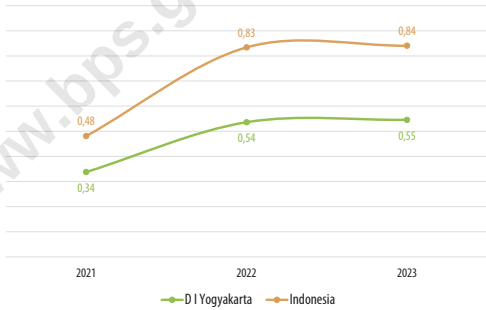
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



Gambar 5.71 Indeks Indikator Komponen IPM D.I. Yogyakarta, 2023



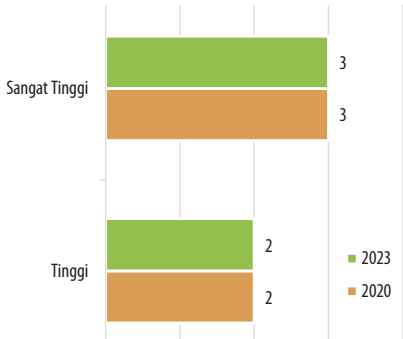
Gambar 5.72 Perkembangan IPM D.I. Yogyakarta, 2020–2023



Gambar 5.73 Pertumbuhan IPM D.I. Yogyakarta, 2021–2023



Gambar 5.74 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di D.I. Yogyakarta, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sedang”

Gambar 5.75 Jumlah Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.30 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia D.I. Yogyakarta, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	76,79	76,35	-0,44
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	96,50	96,69	0,19
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	0,50	0,59	0,09
Morbiditas	%	15,25	10,79	-4,46
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	6,60	6,25	-0,35
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	98,59	100,00	1,41
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,78	98,77	-1,01
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,59	99,63	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	99,01	98,88	-0,13
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	89,95	91,17	1,22
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	50,43	51,60	1,17
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,21	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,07	1,32	-0,75
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	10,26	7,93	-2,33
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	96,63	96,82	0,19
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,85	93,68	4,83
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	44.637	48.358	3.721
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	30.411	31.748	1.338
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.241.131	2.139.710	-101.421
Persentase Pekerja Formal ¹	%	46,62	46,22	-0,40
Persentase Pekerja Informal ¹	%	53,38	53,78	0,40
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.462.583	2.705.601	243.018
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,06	3,69	-0,37
Penduduk Miskin ²	ribu orang	455	448	-6,29
Penduduk Miskin ³	ribu orang	464	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,34	11,04	-0,30
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,49	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,439	0,449	0,010
Gini Rasio ³	–	0,459	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

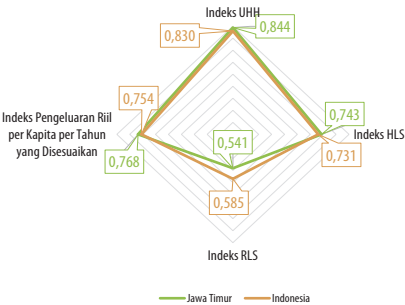
Jawa Timur

IPM 2023: **74,65** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,81%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,73%**

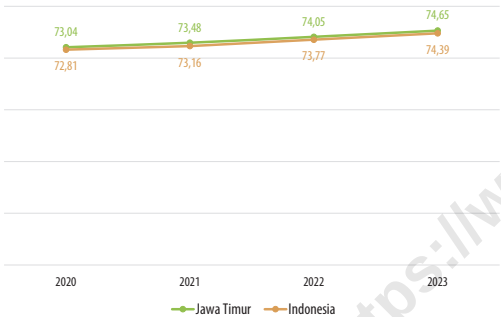
Tabel 5.31 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Jawa Timur, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,87 tahun	0,30
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,38 tahun	0,48
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,11 tahun	1,39
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.421 ribu	2,30

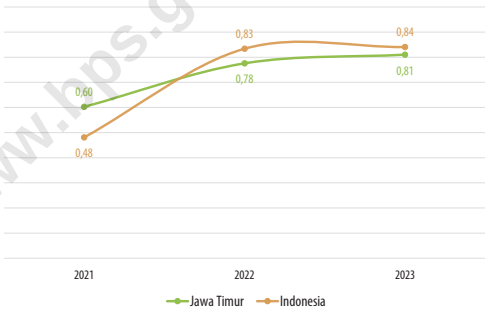
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



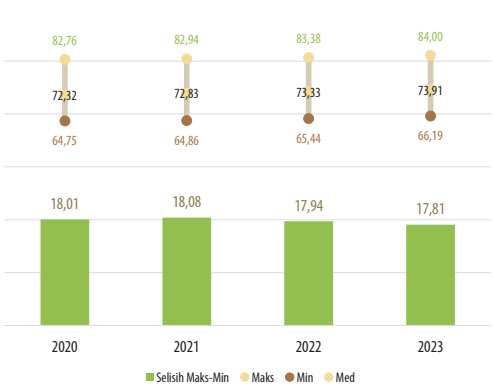
Gambar 5.76 Indeks Indikator Komponen IPM Jawa Timur, 2023



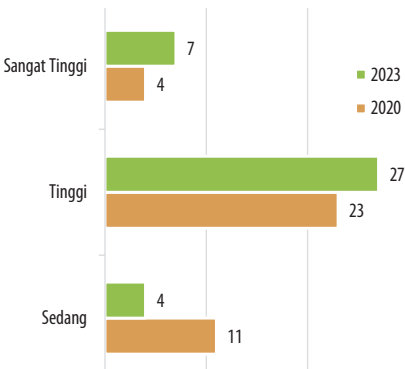
Gambar 5.77 Perkembangan IPM Jawa Timur, 2020–2023



Gambar 5.78 Pertumbuhan IPM Jawa Timur, 2021–2023



Gambar 5.79 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.80 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.32 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Jawa Timur, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	77,60	80,56	2,96
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	95,05	96,01	0,96
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,10	5,13	-1,97
Morbiditas	%	14,26	11,16	-3,10
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	18,97	19,49	0,52
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,28	97,58	1,30
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,33	98,74	0,41
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,14	99,28	0,14
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,64	97,64	0,00
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	73,40	74,07	0,67
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	26,21	26,53	0,32
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,25	0,19	-0,06
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	5,41	5,82	0,41
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	24,58	24,23	-0,35
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,12	86,72	-3,40
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	85,53	87,58	2,05
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	66.247	71.122	4.875
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	42.636	44.423	1.787
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	21.613.293	22.703.177	1.089.884
Persentase Pekerja Formal ¹	%	36,14	36,89	0,75
Persentase Pekerja Informal ¹	%	63,86	63,11	-0,75
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.638.752	2.654.068	15.316
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,49	4,88	-0,61
Penduduk Miskin ²	ribu orang	4.181	4.189	7,52
Penduduk Miskin ³	ribu orang	4.237	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	10,38	10,35	-0,03
Persentase Penduduk Miskin ³	%	10,49	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,371	0,387	0,016
Gini Rasio ³	—	0,365	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

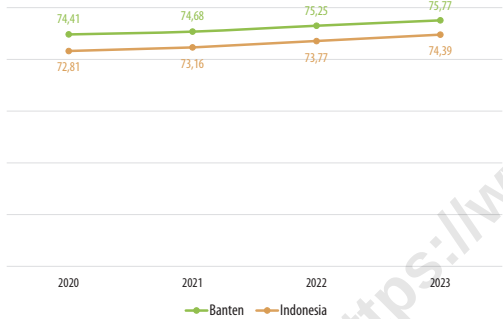
Banten

IPM 2023: **75,77** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,69%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,61%**

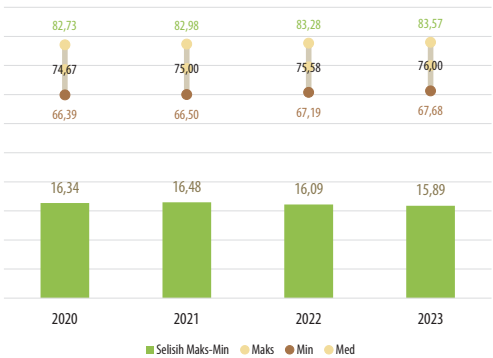
Tabel 5.33 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Banten, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,77 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,09 tahun	0,51
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,15 tahun	0,97
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.601 ribu	1,74

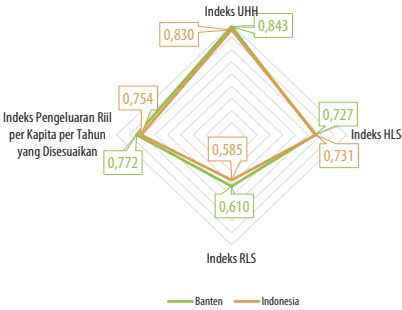
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



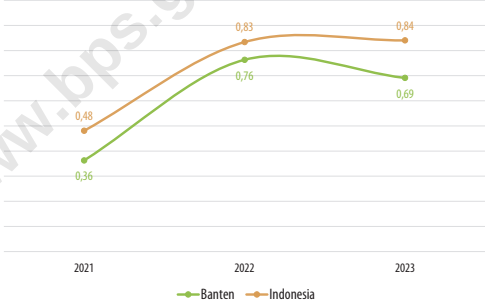
Gambar 5.82 Perkembangan IPM Banten, 2020–2023



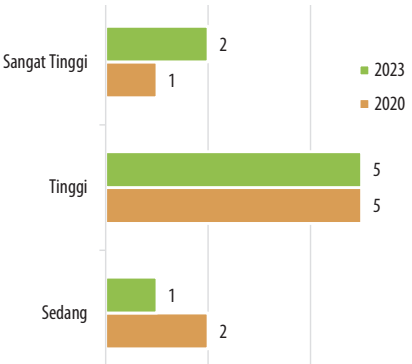
Gambar 5.84 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Banten, 2020–2023



Gambar 5.81 Indeks Indikator Komponen IPM Banten, 2023



Gambar 5.83 Pertumbuhan IPM Banten, 2021–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.85 Jumlah Kabupaten/Kota di Banten menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.34 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Banten, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	74,37	76,11	1,74
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,71	92,95	0,24
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	6,68	4,88	-1,80
Morbiditas	%	11,38	10,61	-0,77
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	13,57	15,24	1,67
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	86,89	88,69	1,80
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	90,69	91,65	0,96
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,33	99,43	0,10
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	96,39	96,65	0,26
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	69,22	69,64	0,42
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	22,14	23,72	1,58
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,55	0,55	0,00
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	6,62	6,50	-0,12
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	24,68	23,28	-1,40
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	84,71	84,08	-0,63
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	85,99	85,13	-0,86
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	61.414	66.147	4.734
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.790	41.228	1.438
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	5.940.618	5.516.656	-423.962
Persentase Pekerja Formal ¹	%	52,04	53,69	1,65
Persentase Pekerja Informal ¹	%	47,96	46,31	-1,65
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	4.370.278	4.378.058	7.780
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	8,09	7,52	-0,57
Penduduk Miskin ²	ribu orang	814	826	12,11
Penduduk Miskin ³	ribu orang	830	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,16	6,17	0,01
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,24	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,363	0,368	0,005
Gini Rasio ³	—	0,377	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

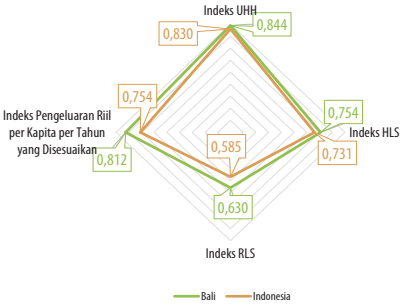
Bali

IPM 2023: **78,01** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,79%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,64%**

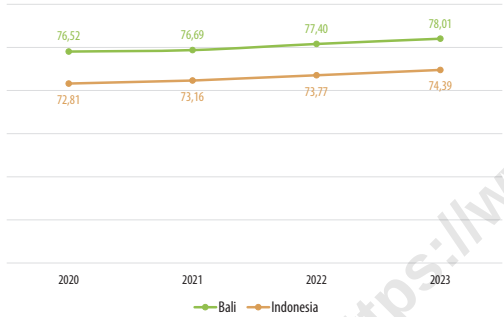
Tabel 5.35 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Bali, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,88 tahun	0,27
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,58 tahun	0,62
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,45 tahun	1,83
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp14.382 ribu	1,07

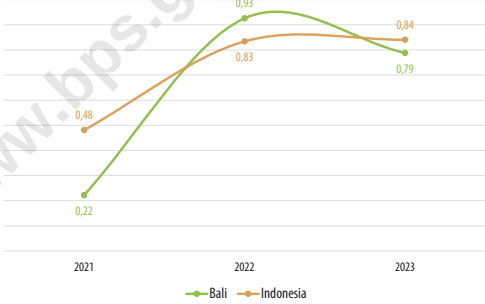
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



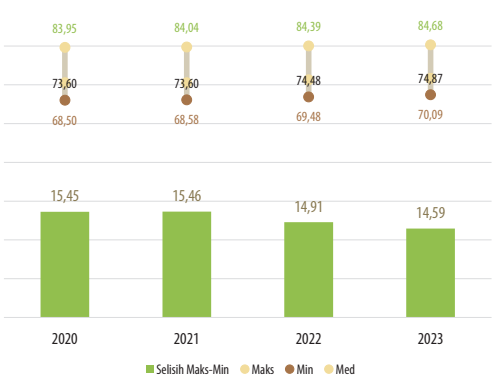
Gambar 5.86 Indeks Indikator Komponen IPM Bali, 2023



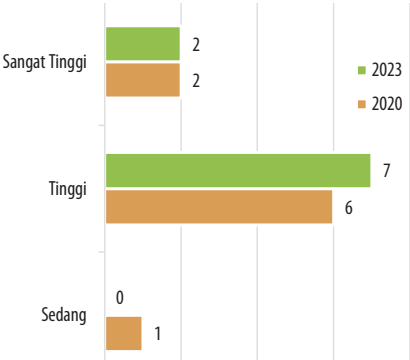
Gambar 5.87 Perkembangan IPM Bali, 2020–2023



Gambar 5.88 Pertumbuhan IPM Bali, 2021–2023



Gambar 5.89 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Bali, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.90 Jumlah Kabupaten/Kota di Bali menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.36 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Bali, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	86,20	87,11	0,91
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	98,42	98,31	-0,11
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	2,46	2,59	0,13
Morbiditas	%	9,54	11,40	1,86
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	5,63	5,11	-0,52
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	98,13	98,93	0,80
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	99,63	99,91	0,28
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,55	99,61	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,85	97,95	0,10
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	83,84	84,73	0,89
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,18	30,92	0,74
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,23	0,22	-0,01
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,33	4,59	0,26
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	12,95	12,60	-0,35
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	96,86	91,88	-4,98
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,43	90,69	0,26
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	56.092	62.293	6.201
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	34.481	36.203	1.722
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.607.070	2.617.816	10.746
Persentase Pekerja Formal ¹	%	46,57	47,65	1,08
Persentase Pekerja Informal ¹	%	53,43	52,35	-1,08
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.002.534	3.380.840	378.306
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,80	2,69	-2,11
Penduduk Miskin ²	ribu orang	206	194	-11,90
Penduduk Miskin ³	ribu orang	205	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,57	4,25	-0,32
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,53	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,363	0,362	-0,001
Gini Rasio ³	–	0,362	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

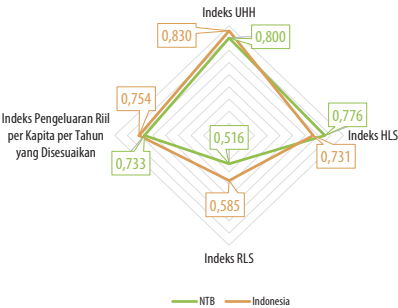
Nusa Tenggara Barat

IPM 2023: **72,37** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **1,00%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,90%**

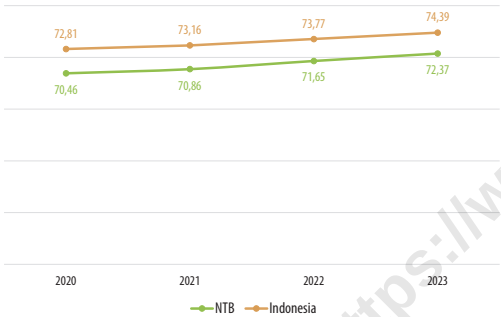
Tabel 5.37 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,02 tahun	0,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,97 tahun	0,65
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,74 tahun	1,92
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.095 ribu	2,34

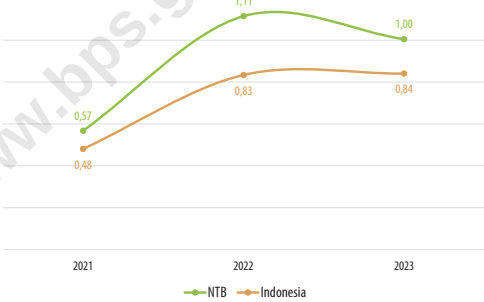
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



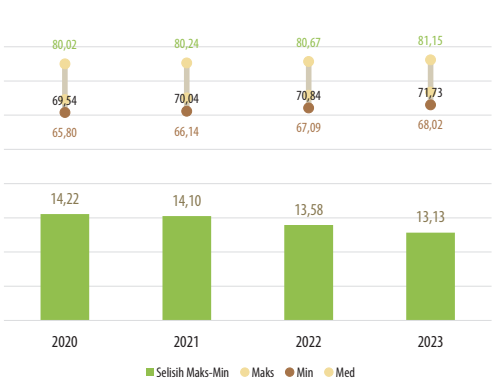
Gambar 5.91 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Barat, 2023



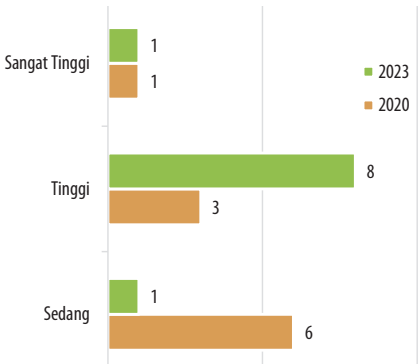
Gambar 5.92 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Barat, 2020–2023



Gambar 5.93 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Barat, 2021–2023



Gambar 5.94 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Barat, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.95 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.38 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	72,71	75,01	2,30
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	95,40	96,03	0,63
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	12,10	8,30	-3,80
Morbiditas	%	23,72	20,92	-2,80
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	13,96	14,95	0,99
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	95,91	96,48	0,57
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,29	98,59	0,30
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,17	99,46	0,29
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,74	97,95	0,21
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,43	77,46	0,03
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,64	26,42	0,78
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,35	0,21	-0,14
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	4,91	3,85	-1,06
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	21,66	15,48	-6,18
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,09	96,32	2,23
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	91,34	90,72	-0,62
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	28.671	29.926	1.255
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	18.647	18.687	40
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.718.345	2.892.982	174.637
Persentase Pekerja Formal ¹	%	24,64	27,70	3,06
Persentase Pekerja Informal ¹	%	75,36	72,30	-3,06
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.218.414	2.344.661	126.247
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,89	2,80	-0,09
Penduduk Miskin ²	ribu orang	732	751	19,29
Penduduk Miskin ³	ribu orang	745	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	13,68	13,85	0,17
Persentase Penduduk Miskin ³	%	13,82	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,373	0,375	0,002
Gini Rasio ³	–	0,374	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

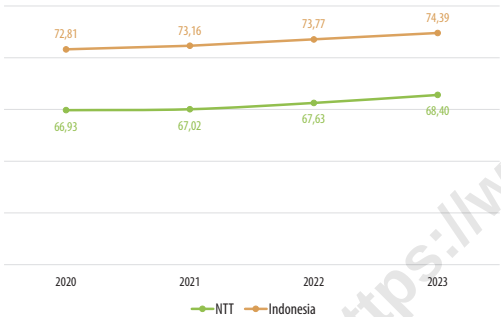
Nusa Tenggara Timur

IPM 2023: **68,40** Status Pembangunan Manusia: **SEDANG**
Pertumbuhan 2023: **1,14%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,73%**

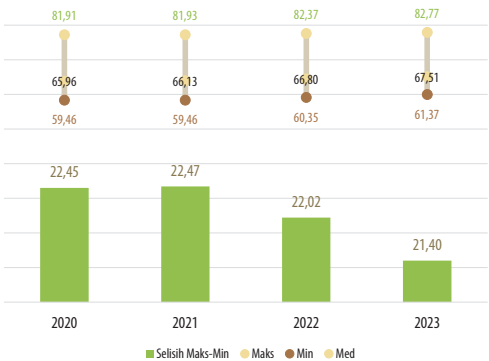
Tabel 5.39 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Nusa Tenggara Timur, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,57 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,22 tahun	0,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,82 tahun	0,82
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp8.248 ribu	2,77

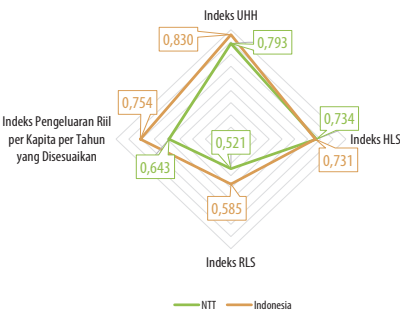
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



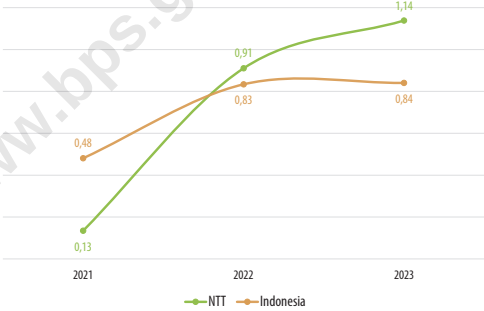
Gambar 5.97 Perkembangan IPM Nusa Tenggara Timur, 2020–2023



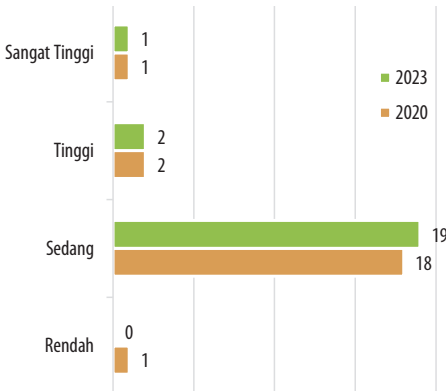
Gambar 5.99 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Nusa Tenggara Timur, 2020–2023



Gambar 5.96 Indeks Indikator Komponen IPM Nusa Tenggara Timur, 2023



Gambar 5.98 Pertumbuhan IPM Nusa Tenggara Timur, 2021–2023



Gambar 5.100 Jumlah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.40 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Timur, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	64,73	66,30	1,57
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	86,76	88,35	1,59
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	8,90	5,68	-3,22
Morbiditas	%	13,66	13,76	0,10
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	3,89	4,31	0,42
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	85,79	86,04	0,25
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	90,11	91,06	0,95
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,59	98,62	0,03
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,83	94,89	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,55	75,93	0,38
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,36	30,68	1,32
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,79	1,22	0,43
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,32	7,48	-0,84
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	24,50	21,64	-2,86
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	92,04	93,21	1,17
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,59	92,12	1,53
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	21.657	23.078	1.421
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	13.261	13.513	252
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.915.293	2.896.901	-18.392
Persentase Pekerja Formal ¹	%	24,76	25,49	0,73
Persentase Pekerja Informal ¹	%	75,24	74,51	-0,73
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.100.927	2.339.851	238.924
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,54	3,14	-0,40
Penduduk Miskin ²	ribu orang	1.132	1.141	9,49
Penduduk Miskin ³	ribu orang	1.149	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	20,05	19,96	-0,09
Persentase Penduduk Miskin ³	%	20,23	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,334	0,325	-0,009
Gini Rasio ³	—	0,340	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

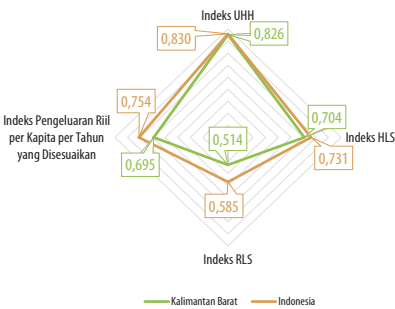
Kalimantan Barat

IPM 2022: **70,47** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2022: **1,09%** Rata-rata Pertumbuhan 2010–2022: **0,82%**

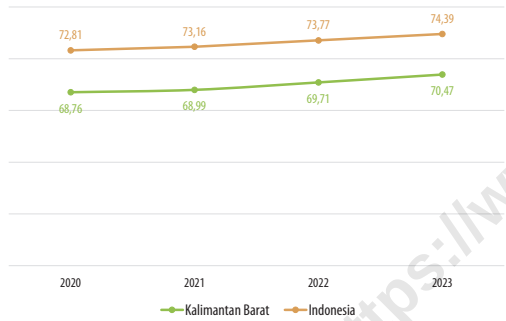
Tabel 5.41 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,71 tahun	0,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,67 tahun	0,18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,71 tahun	1,51
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.810 ribu	3,18

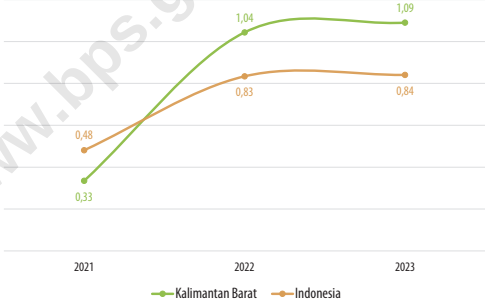
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



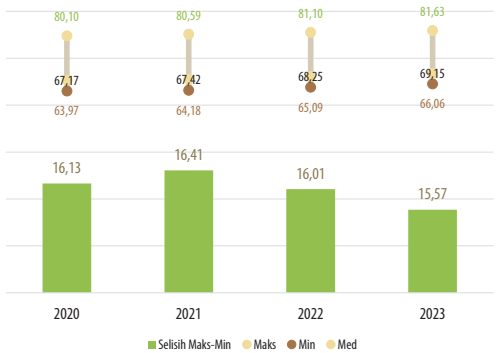
Gambar 5.101 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Barat, 2023



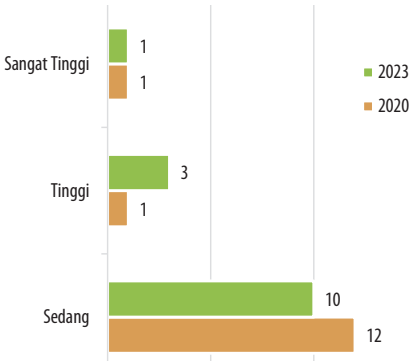
Gambar 5.102 Perkembangan IPM Kalimantan Barat, 2020–2023



Gambar 5.103 Pertumbuhan IPM Kalimantan Barat, 2021–2023



Gambar 5.104 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Barat, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.105 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.42 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	39,58	40,49	0,91
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	80,43	82,08	1,65
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	9,35	6,02	-3,33
Morbiditas	%	11,69	11,89	0,20
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	12,48	12,49	0,01
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	79,48	82,64	3,16
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	91,97	93,03	1,06
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,73	98,81	0,08
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	92,64	92,92	0,28
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	68,72	69,25	0,53
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	24,50	25,08	0,58
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,13	0,87	-0,26
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	11,07	10,45	-0,62
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	26,00	27,71	1,71
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,64	87,84	-3,80
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,93	90,00	0,07
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	46.092	48.809	2.717
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	26.735	27.560	826
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.557.523	2.775.245	217.722
Persentase Pekerja Formal ¹	%	41,23	40,31	-0,92
Persentase Pekerja Informal ¹	%	58,77	59,69	0,92
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.645.920	2.796.615	150.695
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,11	5,05	-0,06
Penduduk Miskin ²	ribu orang	350	353	3,10
Penduduk Miskin ³	ribu orang	357	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,73	6,71	-0,02
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,81	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,314	0,321	0,007
Gini Rasio ³	—	0,311	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

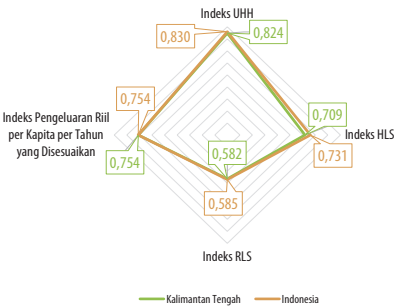
Kalimantan Tengah

IPM 2023: **73,73** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,77%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,51%**

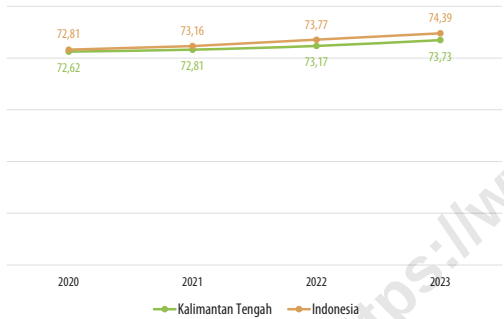
Tabel 5.43 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Tengah, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,54 tahun	0,20
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,76 tahun	0,26
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,73 tahun	0,54
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.878 ribu	2,12

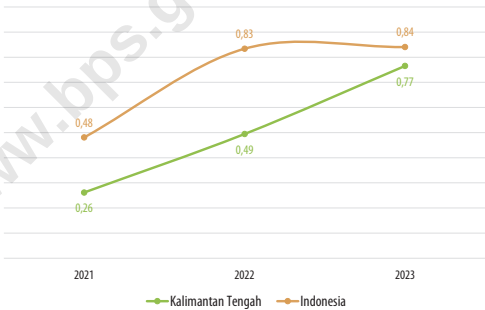
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



Gambar 5.106 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Tengah, 2023



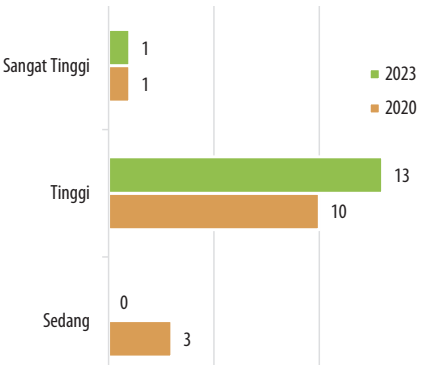
Gambar 5.107 Perkembangan IPM Kalimantan Tengah, 2020–2023



Gambar 5.108 Pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah, 2021–2023



Gambar 5.109 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Tengah, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.110 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.44 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	69,66	71,94	2,28
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	77,01	77,72	0,71
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	4,76	2,47	-2,29
Morbiditas	%	9,06	8,46	-0,60
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	15,97	16,90	0,93
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	71,37	67,18	-4,19
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	92,30	89,72	-2,58
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,20	99,13	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,61	95,21	0,60
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	66,32	66,32	0,00
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	24,29	23,27	-1,02
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,46	0,43	-0,03
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,99	8,46	0,47
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	26,42	27,66	1,24
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	88,05	82,26	-5,79
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,72	90,92	2,20
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	72.989	75.294	2.305
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.856	40.960	1.103
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.344.475	1.349.875	5.400
Persentase Pekerja Formal ¹	%	48,50	48,14	-0,36
Persentase Pekerja Informal ¹	%	51,50	51,86	0,36
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.195.306	3.323.457	128.151
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,26	4,10	-0,16
Penduduk Miskin ²	ribu orang	145	142	-2,93
Penduduk Miskin ³	ribu orang	145	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	5,28	5,11	-0,17
Persentase Penduduk Miskin ³	%	5,22	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,319	0,317	-0,002
Gini Rasio ³	—	0,309	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

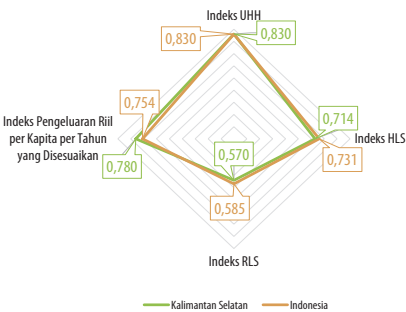
Kalimantan Selatan

IPM 2023: **74,66** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,89%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,71%**

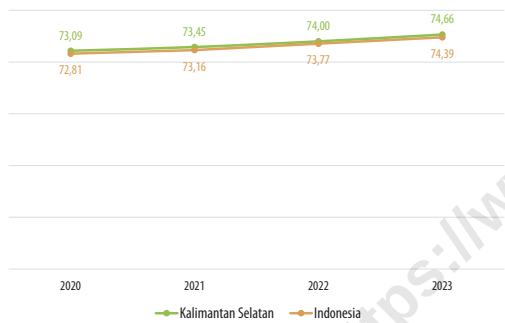
Tabel 5.45 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Selatan, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,97 tahun	0,31
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,86 tahun	0,47
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,55 tahun	1,03
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp12.953 ribu	2,49

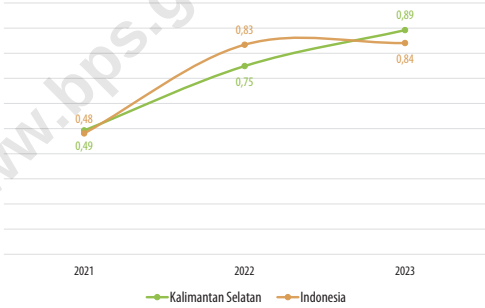
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



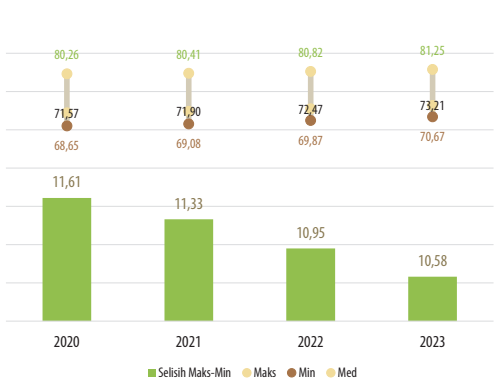
Gambar 5.111 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Selatan, 2023



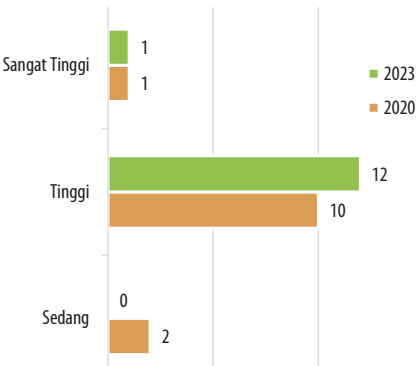
Gambar 5.112 Perkembangan IPM Kalimantan Selatan, 2020–2023



Gambar 5.113 Pertumbuhan IPM Kalimantan Selatan, 2021–2023



Gambar 5.114 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Selatan, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.115 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.46 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	76,62	78,62	2,00
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	76,18	76,29	0,11
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	3,35	1,88	-1,47
Morbiditas	%	9,71	9,34	-0,37
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	19,84	21,95	2,11
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	88,04	88,64	0,60
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	96,64	96,25	-0,39
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,43	99,30	-0,13
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,01	94,12	0,11
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	69,88	69,95	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	24,52	27,18	2,66
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,47	1,10	0,63
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	10,00	10,24	0,24
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	21,56	22,81	1,25
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,90	87,38	-7,52
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,35	92,13	-0,22
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	60.244	63.779	3.535
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	34.133	35.343	1.210
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	2.092.225	2.079.681	-12.544
Persentase Pekerja Formal ¹	%	42,70	44,75	2,05
Persentase Pekerja Informal ¹	%	57,30	55,25	-2,05
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.898.486	3.066.884	168.398
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,74	4,31	-0,43
Penduduk Miskin ²	ribu orang	196	189	-6,77
Penduduk Miskin ³	ribu orang	202	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	4,49	4,29	-0,20
Persentase Penduduk Miskin ³	%	4,61	NA	NA
Gini Rasio ²	–	0,317	0,313	-0,004
Gini Rasio ³	–	0,309	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

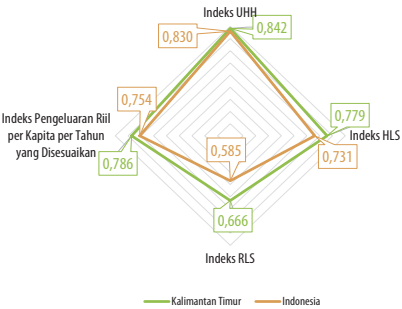
Kalimantan Timur

IPM 2023: **78,20** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **1,09%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,98%**

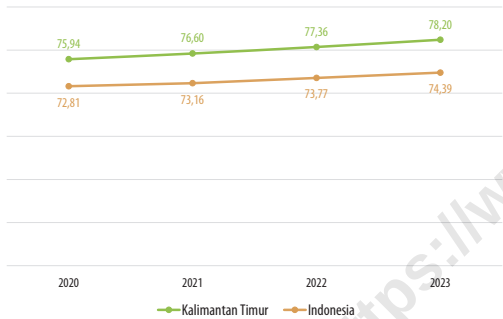
Tabel 5.47 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Timur, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	74,72 tahun	0,46
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,02 tahun	0,72
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,99 tahun	0,75
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp13.202 ribu	4,03

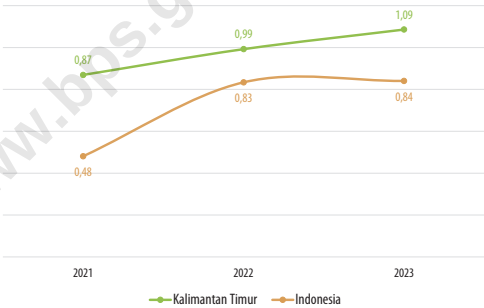
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



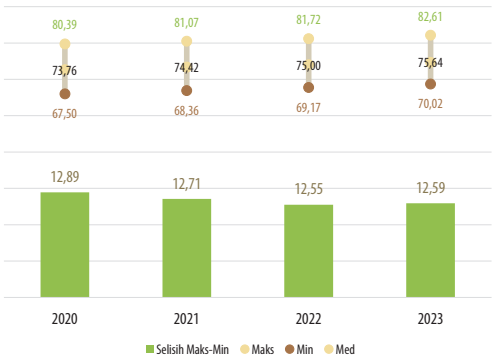
Gambar 5.116 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Timur, 2023



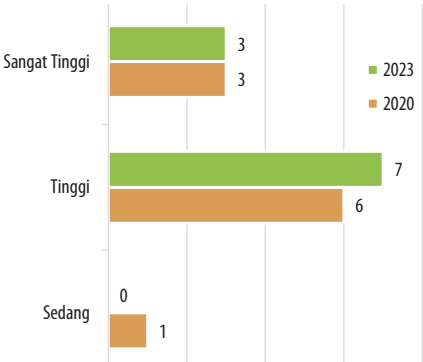
Gambar 5.117 Perkembangan IPM Kalimantan Timur, 2020–2023



Gambar 5.118 Pertumbuhan IPM Kalimantan Timur, 2021–2023



Gambar 5.119 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Timur, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.120 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.48 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Timur, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	94,42	94,53	0,11
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	87,14	87,90	0,76
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	1,04	1,00	-0,04
Morbiditas	%	10,90	9,22	-1,68
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun	%	11,44	11,60	0,16
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	93,24	94,94	1,70
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,80	98,93	0,13
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,57	99,64	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	98,75	98,71	-0,04
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	81,43	81,50	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	29,33	32,33	3,00
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	NA	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,18	3,62	1,44
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	11,56	11,91	0,35
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	92,18	86,15	-6,03
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	93,10	91,87	-1,23
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	238.917	215.761	-23.156
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	131.239	137.510	6.272
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.746.920	1.847.295	100.375
Persentase Pekerja Formal ¹	%	55,74	55,33	-0,41
Persentase Pekerja Informal ¹	%	44,26	44,67	0,41
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.963.732	4.068.893	105.161
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,71	5,31	-0,40
Penduduk Miskin ²	ribu orang	236	231	-5,18
Penduduk Miskin ³	ribu orang	242	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,31	6,11	-0,20
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,44	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,327	0,322	-0,005
Gini Rasio ³	—	0,317	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

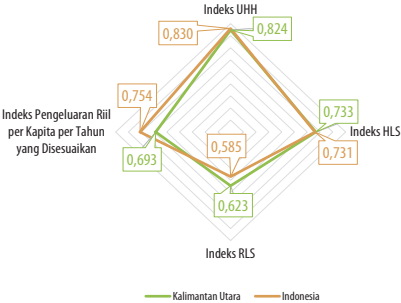
Kalimantan Utara

IPM 2023: **72,88** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,93%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,87%**

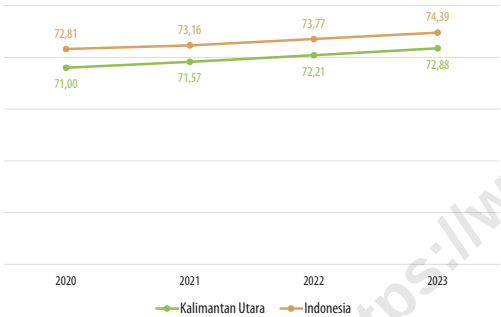
Tabel 5.49 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Kalimantan Utara, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,54 tahun	0,05
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,2 tahun	0,69
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,34 tahun	1,24
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.734 ribu	3,59

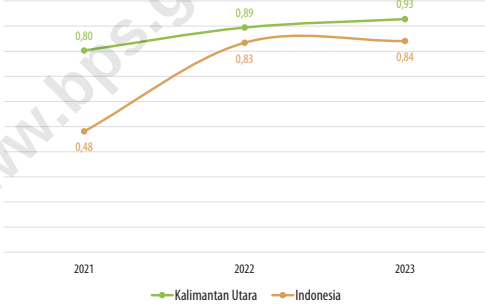
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



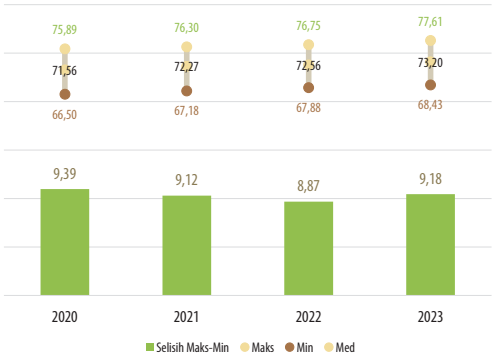
Gambar 5.121 Indeks Indikator Komponen IPM Kalimantan Utara, 2023



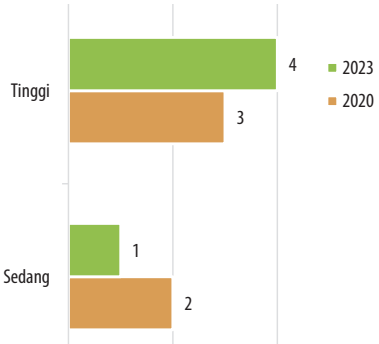
Gambar 5.122 Perkembangan IPM Kalimantan Utara, 2020–2023



Gambar 5.123 Pertumbuhan IPM Kalimantan Utara, 2021–2023



Gambar 5.124 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Kalimantan Utara, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sangat Tinggi”

Gambar 5.125 Jumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.50 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Kalimantan Utara, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	79,39	82,22	2,83
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	89,96	90,19	0,23
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	2,66	1,18	-1,48
Morbiditas	%	16,17	10,42	-5,75
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun	%	12,68	12,13	-0,55
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	94,41	94,24	-0,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,82	94,44	-4,38
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,98	99,22	0,24
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,03	96,96	-0,07
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	76,50	77,03	0,53
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	25,62	27,63	2,01
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	NA	0,68	NA
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,46	6,67	-0,79
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	15,87	18,36	2,49
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	93,30	88,58	-4,72
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	93,20	89,11	-4,09
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	192.588	201.749	9.160
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	92.393	95.638	3.245
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	353.984	372.270	18.286
Persentase Pekerja Formal ¹	%	51,00	48,62	-2,38
Persentase Pekerja Informal ¹	%	49,00	51,38	2,38
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.427.759	3.599.653	171.894
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,33	4,01	-0,32
Penduduk Miskin ²	ribu orang	49	48	-1,49
Penduduk Miskin ³	ribu orang	51	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,77	6,45	-0,32
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,86	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,272	0,277	0,005
Gini Rasio ³	—	0,270	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

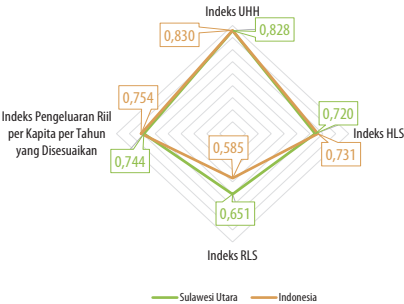
Sulawesi Utara

IPM 2023: **75,04** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,70%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,62%**

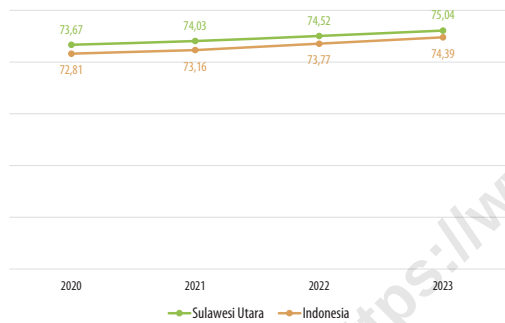
Tabel 5.51 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Utara, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,85 tahun	0,26
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,96 tahun	0,28
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,77 tahun	0,97
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.497 ribu	2,13

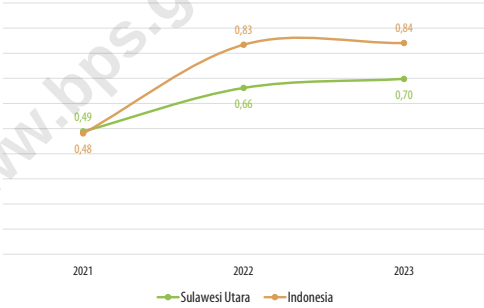
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



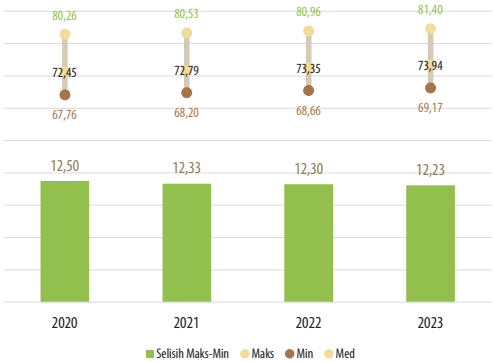
Gambar 5.126 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Utara, 2023



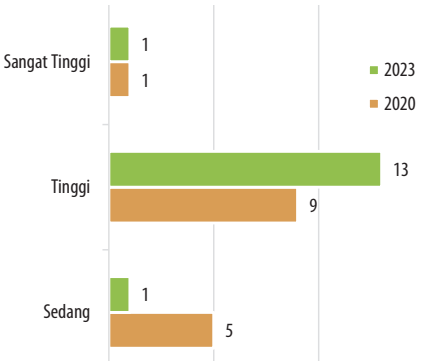
Gambar 5.127 Perkembangan IPM Sulawesi Utara, 2020–2023



Gambar 5.128 Pertumbuhan IPM Sulawesi Utara, 2021–2023



Gambar 5.129 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Utara, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.130 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.52 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Utara, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	80,22	82,35	2,13
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	94,15	94,37	0,22
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,35	5,58	-1,77
Morbiditas	%	11,69	11,83	0,14
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	7,58	7,20	-0,38
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	90,28	90,55	0,27
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	94,58	94,53	-0,05
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,34	99,34	0,00
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,86	95,00	0,14
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	74,33	74,55	0,22
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,43	23,57	0,14
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,42	0,66	0,24
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,10	6,70	-0,40
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,69	16,99	-2,70
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	88,75	88,42	-0,33
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,78	86,71	-2,07
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	59.021	64.131	5.110
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	36.369	38.064	1.696
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.159.965	1.250.948	90.983
Persentase Pekerja Formal ¹	%	40,85	41,86	1,01
Persentase Pekerja Informal ¹	%	59,15	58,14	-1,01
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.240.217	3.282.230	42.013
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,61	6,10	-0,51
Penduduk Miskin ²	ribu orang	185	189	3,86
Penduduk Miskin ³	ribu orang	187	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	7,28	7,38	0,10
Persentase Penduduk Miskin ³	%	7,34	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,365	0,370	0,005
Gini Rasio ³	—	0,359	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

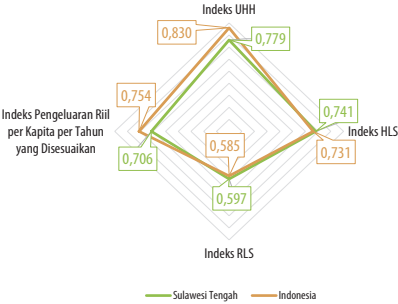
Sulawesi Tengah

IPM 2023: **71,66** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,92%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,64%**

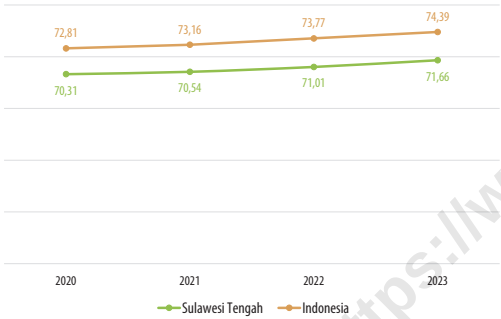
Tabel 5.53 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tengah, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,66 tahun	0,17
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,33 tahun	0,40
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,96 tahun	0,49
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.149 ribu	2,83

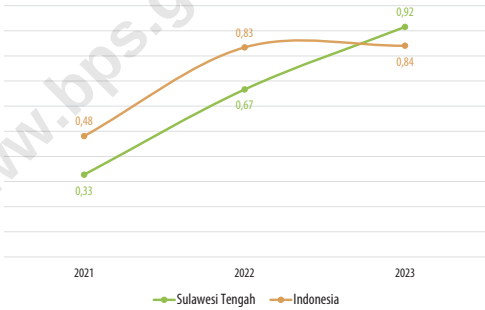
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



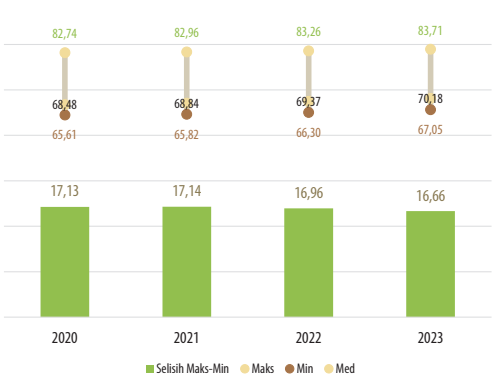
Gambar 5.131 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tengah, 2023



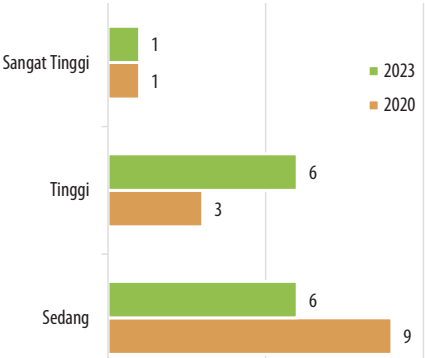
Gambar 5.132 Perkembangan IPM Sulawesi Tengah, 2020–2023



Gambar 5.133 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tengah, 2021–2023



Gambar 5.134 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tengah, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.135 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.54 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	71,01	74,21	3,20
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	86,74	86,85	0,11
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	15,18	10,07	-5,11
Morbiditas	%	12,97	10,01	-2,96
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama ≤ 16 Tahun	%	12,88	12,91	0,03
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	86,32	88,36	2,04
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	93,45	94,93	1,48
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,22	98,34	0,12
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,02	93,13	0,11
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	75,84	76,29	0,45
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	27,04	27,58	0,54
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,07	1,24	0,17
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	8,35	9,33	0,98
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	25,79	21,48	-4,31
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	92,27	83,64	-8,63
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,12	90,98	0,86
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	106.068	112.461	6.393
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	56.577	62.584	6.007
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.586.320	1.547.169	-39.151
Persentase Pekerja Formal ¹	%	32,13	33,90	1,77
Persentase Pekerja Informal ¹	%	67,87	66,10	-1,77
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.605.724	2.648.195	42.471
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,00	2,95	-0,05
Penduduk Miskin ²	ribu orang	388	396	7,31
Penduduk Miskin ³	ribu orang	390	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	12,33	12,41	0,08
Persentase Penduduk Miskin ³	%	12,30	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,308	0,304	-0,004
Gini Rasio ³	—	0,305	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

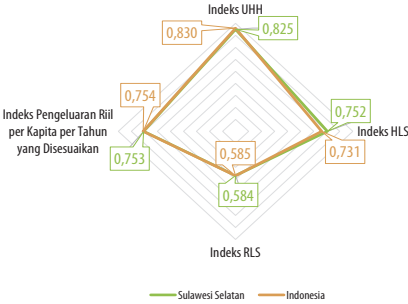
Sulawesi Selatan

IPM 2023: **74,60** Status Pembangunan Manusia: **Tinggi**
Pertumbuhan 2023: **0,87%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,69%**

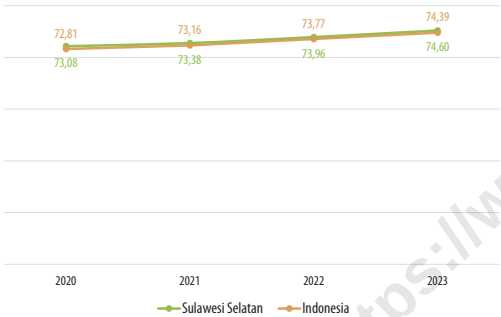
Tabel 5.55 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Selatan, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	73,63 tahun	0,28
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,54 tahun	0,22
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,76 tahun	1,49
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.841 ribu	2,24

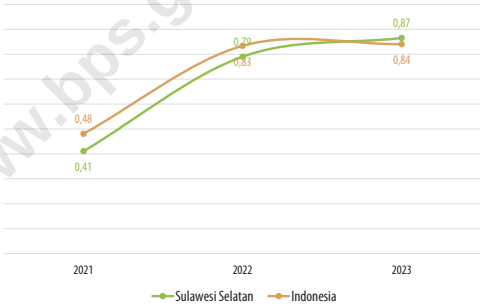
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



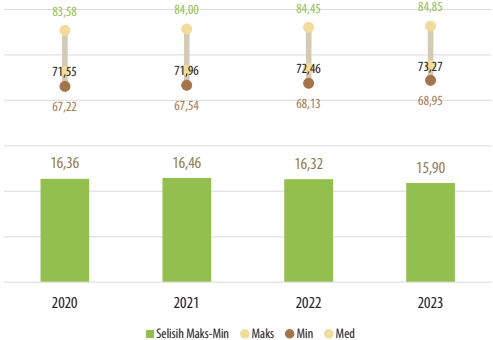
Gambar 5.136 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Selatan, 2023



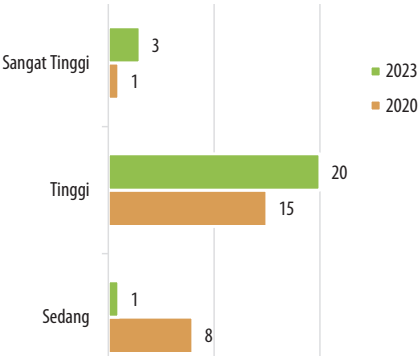
Gambar 5.137 Perkembangan IPM Sulawesi Selatan, 2020–2023



Gambar 5.138 Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2021–2023



Gambar 5.139 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Selatan, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.140 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.56 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	78,50	81,18	2,68
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	91,96	92,12	0,16
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	3,49	2,20	-1,29
Morbiditas	%	13,75	9,63	-4,12
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	14,66	15,36	0,70
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	96,32	96,60	0,28
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	98,64	98,82	0,18
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,43	99,49	0,06
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	93,20	93,22	0,02
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	70,81	71,00	0,19
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	35,07	34,47	-0,60
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,58	0,75	0,17
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	9,16	9,19	0,03
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	22,79	23,51	0,72
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,28	84,15	-6,13
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,39	89,38	-1,01
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	65.350	69.702	4.352
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	38.973	40.285	1.312
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	4.353.650	4.490.983	137.333
Persentase Pekerja Formal ¹	%	36,45	37,23	0,78
Persentase Pekerja Informal ¹	%	63,55	62,77	-0,78
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.876.952	2.969.920	92.968
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	4,51	4,33	-0,18
Penduduk Miskin ²	ribu orang	777	789	11,41
Penduduk Miskin ³	ribu orang	782	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	8,63	8,70	0,07
Persentase Penduduk Miskin ³	%	8,66	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,377	0,377	0,000
Gini Rasio ³	—	0,365	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

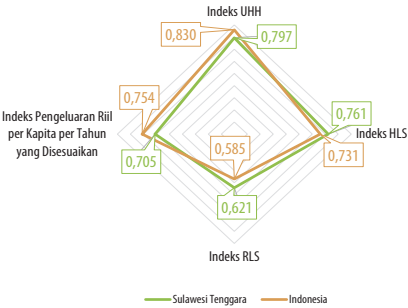
Sulawesi Tenggara

IPM 2023: **72,94** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,77%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,62%**

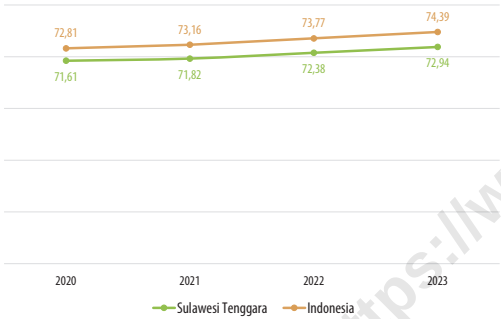
Tabel 5.57 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Tenggara, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	71,79 tahun	0,11
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,7 tahun	0,12
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,31 tahun	0,99
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp10.117 ribu	2,73

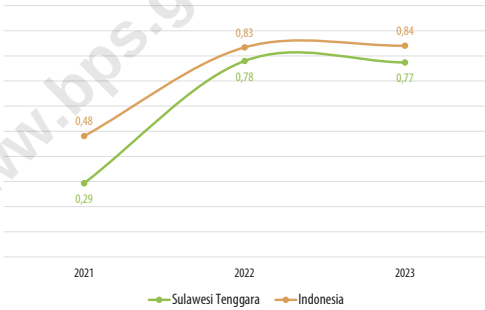
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



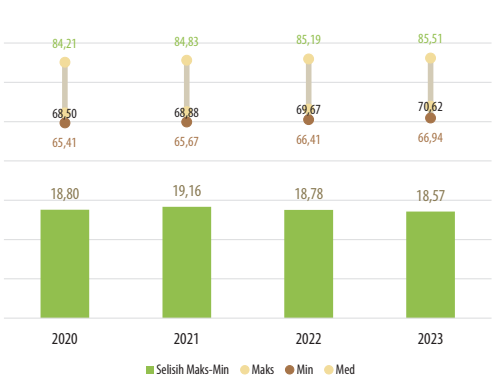
Gambar 5.141 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Tenggara, 2023



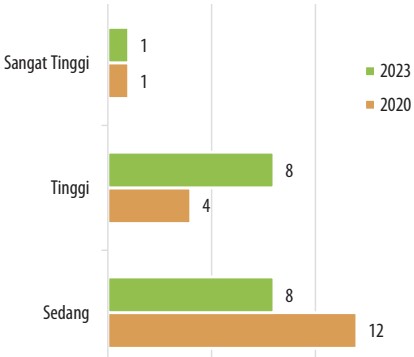
Gambar 5.142 Perkembangan IPM Sulawesi Tenggara, 2020–2023



Gambar 5.143 Pertumbuhan IPM Sulawesi Tenggara, 2021–2023



Gambar 5.144 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Tenggara, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.145 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.58 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	83,42	84,77	1,35
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	94,64	94,80	0,16
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	7,07	4,27	-2,80
Morbiditas	%	16,68	10,39	-6,29
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	13,57	13,91	0,34
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	85,23	83,91	-1,32
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	95,10	93,21	-1,89
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,05	99,20	0,15
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	94,80	95,00	0,20
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	74,53	74,60	0,07
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	31,81	31,73	-0,08
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,93	0,52	-0,41
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	7,60	7,37	-0,23
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	20,18	19,51	-0,67
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,81	91,79	-3,02
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	95,62	94,36	-1,26
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	58.715	64.088	5.374
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	37.956	39.342	1.386
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.335.921	1.351.640	15.719
Persentase Pekerja Formal ¹	%	37,61	38,16	0,55
Persentase Pekerja Informal ¹	%	62,39	61,84	-0,55
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.831.991	2.876.321	44.330
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,36	3,15	-0,21
Penduduk Miskin ²	ribu orang	310	322	11,74
Penduduk Miskin ³	ribu orang	315	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,17	11,43	0,26
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,27	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,387	0,371	-0,016
Gini Rasio ³	—	0,366	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

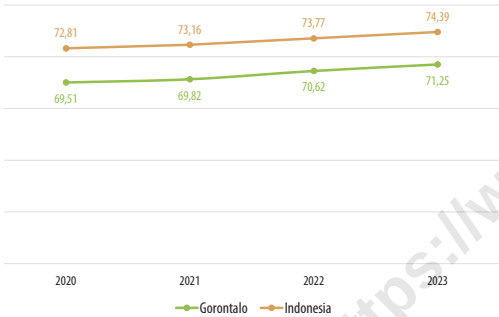
Gorontalo

IPM 2023: **71,25** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,89%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,83%**

Tabel 5.59 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Gorontalo, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,5 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,16 tahun	0,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,1 tahun	1,18
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp11.069 ribu	3,37

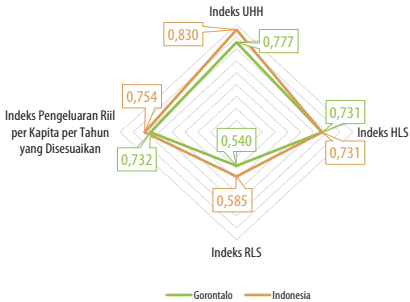
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



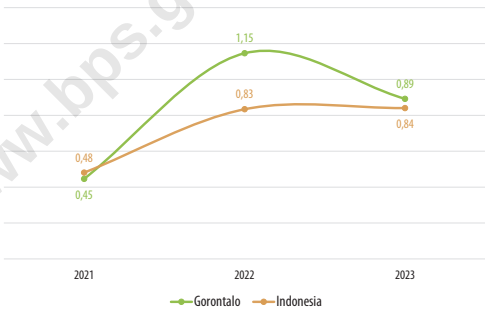
Gambar 5.147 Perkembangan IPM Gorontalo, 2020–2023



Gambar 5.149 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Gorontalo, 2020–2023



Gambar 5.146 Indeks Indikator Komponen IPM Gorontalo, 2023



Gambar 5.148 Pertumbuhan IPM Gorontalo, 2021–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sangat Tinggi”

Gambar 5.150 Jumlah Kabupaten/Kota di Gorontalo menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.60 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Gorontalo, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	87,86	88,73	0,87
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	96,16	96,00	-0,16
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	11,16	9,33	-1,83
Morbiditas	%	18,47	16,35	-2,12
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	12,90	11,98	-0,92
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	94,94	92,43	-2,51
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	96,69	98,60	1,91
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,93	98,69	-0,24
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	91,83	91,85	0,02
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	71,68	71,70	0,02
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,06	33,20	3,14
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	1,42	1,96	0,54
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	9,98	10,92	0,94
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	32,07	25,05	-7,02
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	90,49	89,70	-0,79
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	95,86	94,40	-1,46
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	39.694	42.347	2.653
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	25.270	26.086	816
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	614.250	631.521	17.271
Persentase Pekerja Formal ¹	%	35,03	36,27	1,24
Persentase Pekerja Informal ¹	%	64,97	63,73	-1,24
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.551.301	2.570.181	18.880
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,58	3,06	0,48
Penduduk Miskin ²	ribu orang	185	184	-1,73
Penduduk Miskin ³	ribu orang	187	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	15,42	15,15	-0,27
Persentase Penduduk Miskin ³	%	15,51	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,418	0,417	-0,001
Gini Rasio ³	—	0,423	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

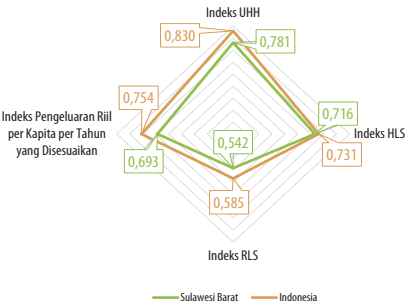
Sulawesi Barat

IPM 2023: **69,80** Status Pembangunan Manusia: **SEDANG**
Pertumbuhan 2023: **0,88%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,68%**

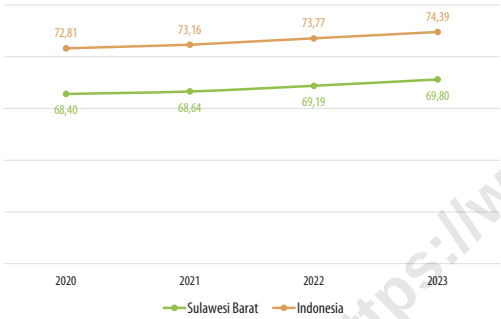
Tabel 5.61 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Sulawesi Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,76 tahun	0,40
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,88 tahun	0,29
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,13 tahun	1,00
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.718 ribu	1,96

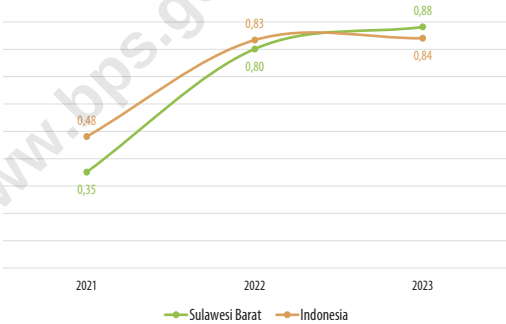
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



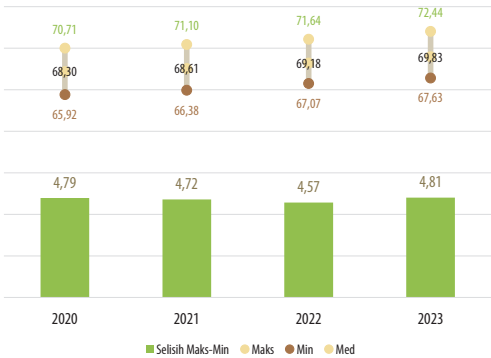
Gambar 5.151 Indeks Indikator Komponen IPM Sulawesi Barat, 2023



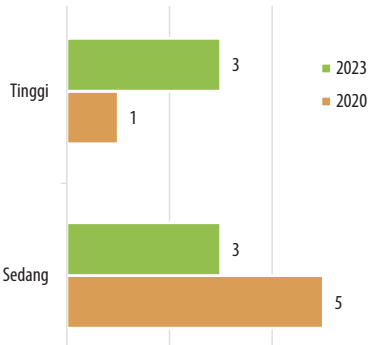
Gambar 5.152 Perkembangan IPM Sulawesi Barat, 2020–2023



Gambar 5.153 Pertumbuhan IPM Sulawesi Barat, 2021–2023



Gambar 5.154 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Sulawesi Barat, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah” dan “Sangat Tinggi”

Gambar 5.155 Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.62 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Sulawesi Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	69,32	71,13	1,81
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	78,98	79,86	0,88
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	12,45	8,71	-3,74
Morbiditas	%	14,12	11,37	-2,75
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	16,70	14,65	-2,05
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	88,84	88,97	0,13
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	93,77	94,07	0,30
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,40	98,31	-0,09
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	89,39	89,47	0,08
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	70,85	71,57	0,72
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,43	23,98	0,55
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	2,00	1,59	-0,41
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	12,63	12,18	-0,45
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	26,44	23,81	-2,63
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	92,11	85,69	-6,42
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	89,70	89,48	-0,22
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	37.068	39.533	2.465
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	23.071	23.919	848
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	731.902	743.007	11.105
Persentase Pekerja Formal ¹	%	22,75	26,65	3,90
Persentase Pekerja Informal ¹	%	77,25	73,35	-3,90
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.340.502	2.367.534	27.032
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,34	2,27	-0,07
Penduduk Miskin ²	ribu orang	166	164	-1,58
Penduduk Miskin ³	ribu orang	169	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	11,75	11,49	-0,26
Persentase Penduduk Miskin ³	%	11,92	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,362	0,351	-0,011
Gini Rasio ³	—	0,371	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

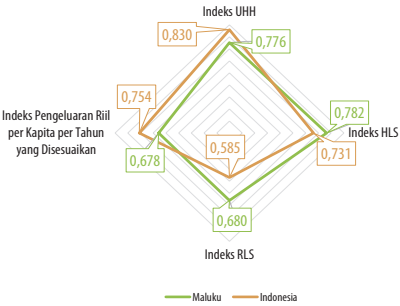
Maluku

IPM 2023: **72,75** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **0,99%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,65%**

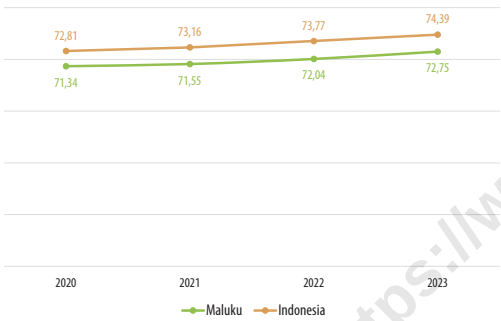
Tabel 5.63 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,45 tahun	0,33
Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,08 tahun	0,29
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,2 tahun	0,90
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp9.278 ribu	2,04

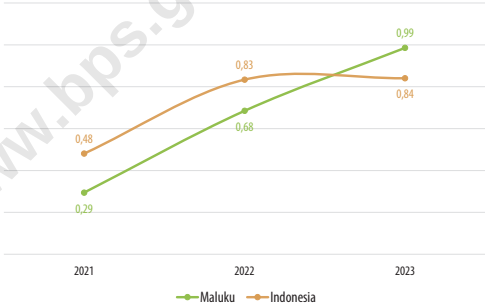
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



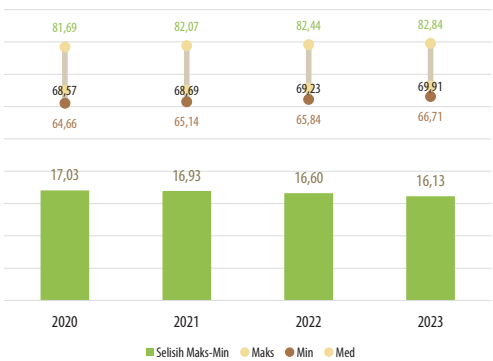
Gambar 5.156 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku, 2023



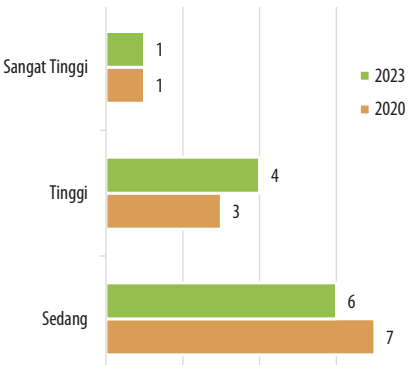
Gambar 5.157 Perkembangan IPM Maluku, 2020–2023



Gambar 5.158 Pertumbuhan IPM Maluku, 2021–2023



Gambar 5.159 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.160 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.64 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	73,13	73,66	0,53
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,10	92,98	0,88
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	10,89	10,31	-0,58
Morbiditas	%	7,52	10,00	2,48
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	4,92	5,54	0,62
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	48,65	51,53	2,88
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	75,86	77,02	1,16
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,55	99,59	0,04
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,69	97,97	0,28
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	79,03	79,90	0,87
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	40,15	37,41	-2,74
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,37	0,37	0,00
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	2,88	3,28	0,40
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	16,29	12,46	-3,83
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	94,73	89,34	-5,39
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	90,67	89,23	-1,44
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	28.526	30.456	1.930
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	17.717	18.393	676
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	808.844	853.254	44.410
Persentase Pekerja Formal ¹	%	36,70	34,58	-2,12
Persentase Pekerja Informal ¹	%	63,30	65,42	2,12
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.719.294	2.865.989	146.695
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	6,88	6,31	-0,57
Penduduk Miskin ²	ribu orang	291	302	11,04
Penduduk Miskin ³	ribu orang	297	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	15,97	16,42	0,45
Persentase Penduduk Miskin ³	%	16,23	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,301	0,288	-0,013
Gini Rasio ³	—	0,306	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

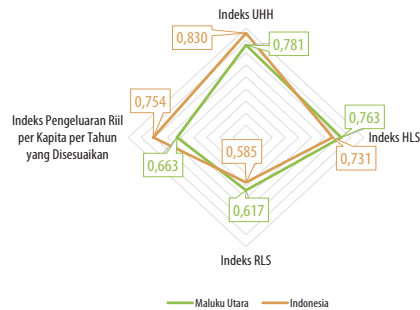
Maluku Utara

IPM 2023: **70,98** Status Pembangunan Manusia: **TINGGI**
Pertumbuhan 2023: **1,02%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,80%**

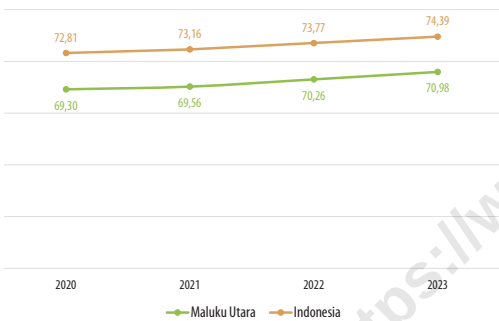
Tabel 5.65 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Maluku Utara, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	70,76 tahun	0,33
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,74 tahun	0,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,26 tahun	0,80
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp8.834 ribu	3,22

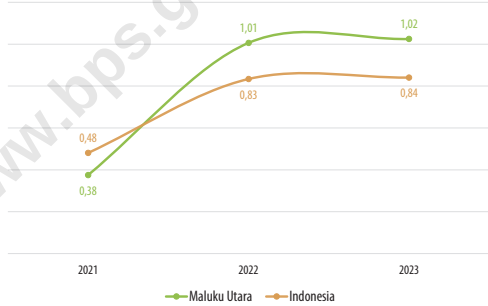
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



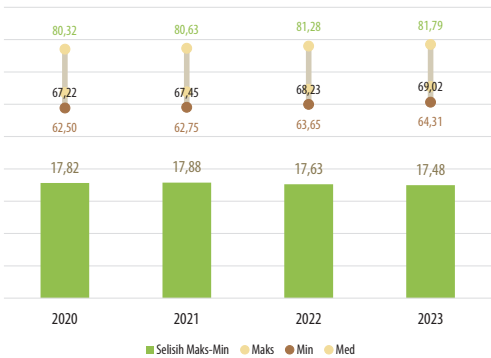
Gambar 5.161 Indeks Indikator Komponen IPM Maluku Utara, 2023



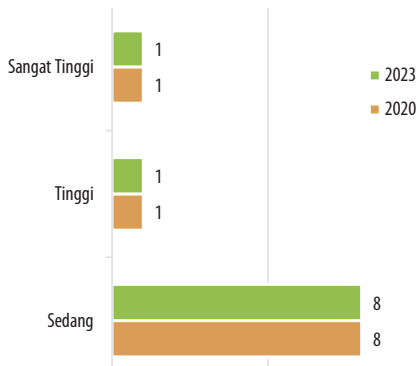
Gambar 5.162 Perkembangan IPM Maluku Utara, 2020–2023



Gambar 5.163 Pertumbuhan IPM Maluku Utara, 2021–2023



Gambar 5.164 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Maluku Utara, 2020–2023



Catatan: Tidak ada kabupaten/kota yang berstatus IPM “Rendah”

Gambar 5.165 Jumlah Kabupaten/Kota di Maluku Utara menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.66 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Maluku Utara, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	66,89	68,22	1,33
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	88,10	89,01	0,91
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	8,62	5,29	-3,33
Morbiditas	%	10,06	8,24	-1,82
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	9,81	9,23	-0,58
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	67,71	67,88	0,17
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	83,44	85,33	1,89
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	99,13	99,12	-0,01
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,59	97,51	-0,08
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	77,70	78,38	0,68
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,67	28,78	-1,89
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,50	0,56	0,06
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,03	3,41	0,38
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	19,00	15,59	-3,41
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	91,44	83,88	-7,56
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	88,71	91,01	2,30
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	53.776	63.677	9.901
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	30.526	36.267	5.741
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	584.968	634.699	49.731
Persentase Pekerja Formal ¹	%	34,37	33,92	-0,45
Persentase Pekerja Informal ¹	%	65,63	66,08	0,45
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	2.938.081	3.267.084	329.003
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,98	4,31	0,33
Penduduk Miskin ²	ribu orang	80	84	3,93
Penduduk Miskin ³	ribu orang	82	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	6,23	6,46	0,23
Persentase Penduduk Miskin ³	%	6,37	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,279	0,300	0,021
Gini Rasio ³	—	0,309	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

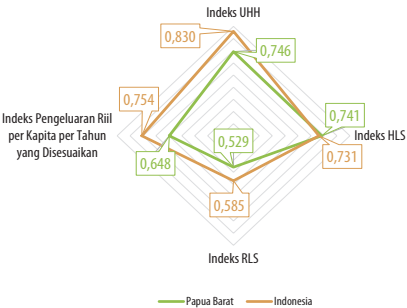
Papua Barat

IPM 2023: **67,47** Status Pembangunan Manusia: **SEDANG**
Pertumbuhan 2023: **1,12%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,77%**

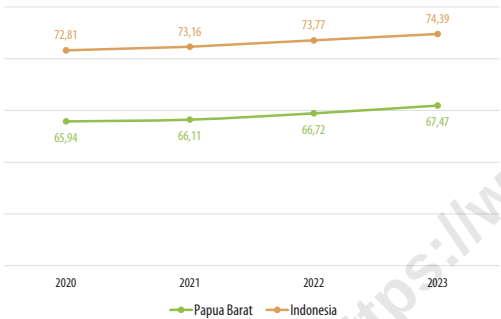
Tabel 5.67 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua Barat, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,51 tahun	0,32
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,34 tahun	1,10
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,93 tahun	1,43
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp8.404 ribu	1,29

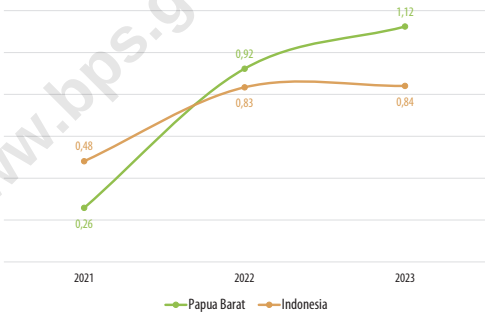
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



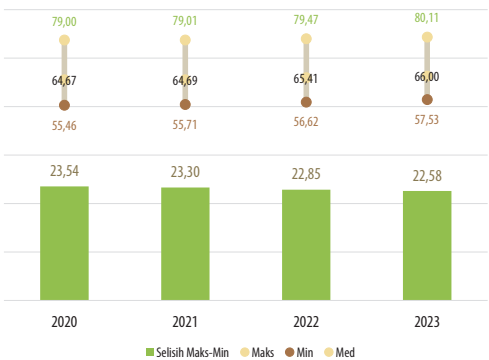
Gambar 5.166 Indeks Indikator Komponen IPM Papua Barat, 2023



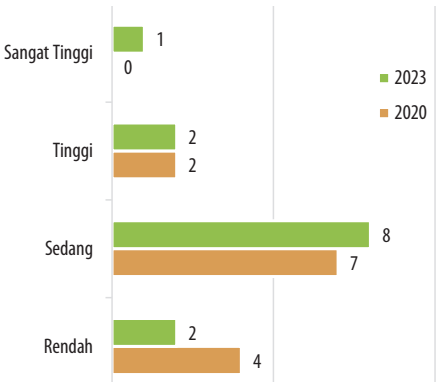
Gambar 5.167 Perkembangan IPM Papua Barat, 2020–2023



Gambar 5.168 Pertumbuhan IPM Papua Barat, 2021–2023



Gambar 5.169 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua Barat, 2020–2023



Gambar 5.170 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua Barat menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.68 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua Barat, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	61,36	61,64	0,28
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	81,57	81,57	0,00
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	5,37	3,21	-2,16
Morbiditas	%	8,99	6,70	-2,29
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	11,37	10,78	-0,59
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	70,80	70,12	-0,68
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	80,51	80,62	0,11
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	98,27	98,41	0,14
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	97,37	97,42	0,05
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	80,56	80,58	0,02
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	30,69	31,15	0,46
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	0,83	1,13	0,30
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	3,98	4,37	0,39
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	18,27	14,88	-3,39
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	92,13	88,10	-4,03
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	92,23	95,36	3,13
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	78.133	108.102	29.969
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	53.507	71.905	18.398
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	487.705	560.883	73.178
Persentase Pekerja Formal ¹	%	39,72	41,45	1,73
Persentase Pekerja Informal ¹	%	60,28	58,55	-1,73
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.283.235	3.601.390	318.155
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	5,37	5,38	0,01
Penduduk Miskin ²	ribu orang	219	215	-3,80
Penduduk Miskin ³	ribu orang	222	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	21,33	20,49	-0,84
Persentase Penduduk Miskin ³	%	21,43	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,370	0,370	0,000
Gini Rasio ³	—	0,384	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus²Kondisi Maret³Kondisi September

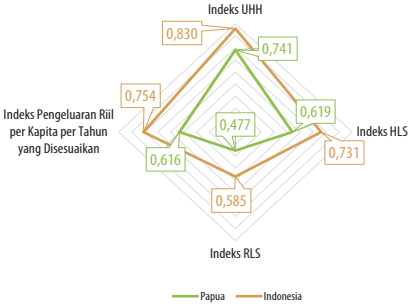
Papua

IPM 2023: **63,01** Status Pembangunan Manusia: **SEDANG**
Pertumbuhan 2023: **1,37%** Rata-rata Pertumbuhan 2020–2023: **0,97%**

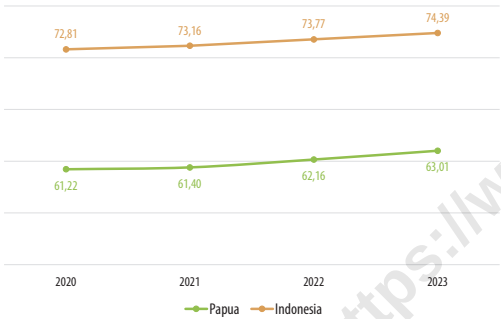
Tabel 5.69 Capaian Indikator Komponen Penyusun IPM Papua, 2023

Indikator	Capaian	Rata-rata Pertumbuhan ¹ 2020–2023 (%)
(1)	(2)	(3)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	68,17 tahun	0,29
Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,15 tahun	0,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,15 tahun	2,24
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	Rp7.562 ribu	2,83

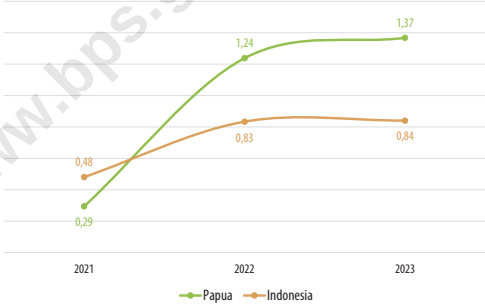
Catatan: ¹Dihitung berdasarkan rata-rata ukur (geometrik)



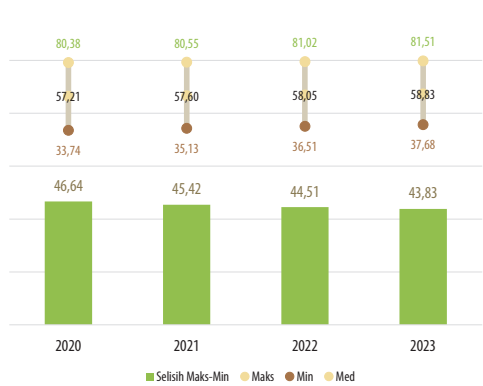
Gambar 5.171 Indeks Indikator Komponen IPM Papua, 2023



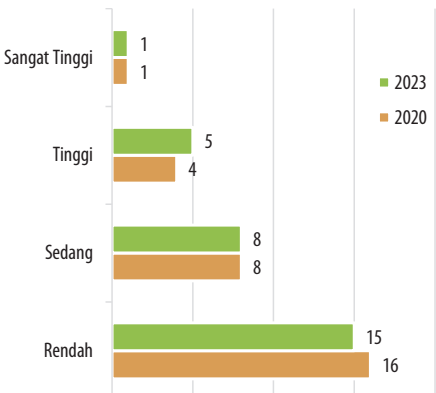
Gambar 5.172 Perkembangan IPM Papua, 2020–2023



Gambar 5.173 Pertumbuhan IPM Papua, 2021–2023



Gambar 5.174 Disparitas dan Capaian IPM Kabupaten/Kota Tertinggi dan Terendah di Papua, 2020–2023



Gambar 5.175 Jumlah Kabupaten/Kota di Papua menurut Status IPM, 2020 dan 2023

Tabel 5.70 Beberapa Indikator yang Terkait dengan Dimensi Pembangunan Manusia Papua, 2022 dan 2023

Indikator	Satuan	2022	2023	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih	%	35,77	40,83	5,06
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	65,39	66,49	1,10
Rumah Tangga yang Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar	%	24,43	23,85	-0,58
Morbiditas	%	5,15	5,73	0,58
Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas dengan Umur Perkawinan Pertama $\leq$ 16 Tahun	%	8,58	8,61	0,03
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan	%	73,28	75,85	2,57
Perempuan Pernah Kawin Berusia 15–49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih	%	79,91	84,16	4,25
Dimensi Pengetahuan				
Angka Partisipasi Sekolah 7–12 Tahun	%	84,35	83,61	-0,74
Angka Partisipasi Sekolah 13–15 Tahun	%	81,66	80,91	-0,75
Angka Partisipasi Sekolah 16–18 Tahun	%	65,93	64,15	-1,78
Angka Partisipasi Sekolah 19–24 Tahun	%	23,58	23,89	0,31
Angka Tidak Bersekolah 7–12 Tahun	%	7,30	15,07	7,77
Angka Tidak Bersekolah 13–15 Tahun	%	21,67	21,44	-0,23
Angka Tidak Bersekolah 16–18 Tahun	%	34,87	36,67	1,80
Angka Melanjutkan/Transisi ke SMP/Sederajat	%	84,15	79,20	-4,95
Angka Melanjutkan/Transisi ke SM/Sederajat	%	77,26	86,68	9,42
Dimensi Standar Hidup Layak				
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	ribu rupiah	59.384	78.061	18.678
PDB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010	ribu rupiah	39.113	47.324	8.211
Jumlah Penduduk Bekerja ¹	orang	1.934.767	2.448.947	514.180
Persentase Pekerja Formal ¹	%	15,89	15,57	-0,32
Persentase Pekerja Informal ¹	%	84,11	84,43	0,32
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan ¹	rupiah	3.954.382	4.420.390	466.008
Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	2,83	2,67	-0,16
Penduduk Miskin ²	ribu orang	922	915	-6,97
Penduduk Miskin ³	ribu orang	936	NA	NA
Persentase Penduduk Miskin ²	%	26,56	26,03	-0,53
Persentase Penduduk Miskin ³	%	26,80	NA	NA
Gini Rasio ²	—	0,406	0,386	-0,020
Gini Rasio ³	—	0,393	NA	NA

Catatan: ¹Kondisi Agustus

²Kondisi Maret

³Kondisi September

Daftar Pustaka

- Alatas, S. H. (1977). The myth of the lazy native: A study of the image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of colonial capitalism. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203043271/MYTH-LAZY-NATIVE-SYED-HUSSEIN-ALATAS>
- Annan, K. (2022). Why Youth Matters – The Missing Piece for Peace and Security. The Kofi Annan Foundation. Why Youth Matters - The Missing Piece for Peace and Security - Kofi Annan Foundation
- Aula, M., R. (2023). Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik di Indonesia. JPI: Jurnal Politikom Indonesiana, 8(2)<https://ourworldindata.org/why-do-women-live-longer-than-men>
- Badan Pusat Statistik. (2014). Indeks Pembangunan Gender. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2021). Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022a). Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022b). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023a). Booklet SAKERNAS Agustus 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2023c). Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Blum, Hendrik L. 1974. Planning for Health, Development and Application of Social Changes Theory. New York: Human Sciences Press.
- Beneria, L. (2016). Gender, development and globalization: economics as if all people mattered
- Lestari, Ayu & Kurniawan, Fariz & Ardi, Rifal. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar. 4. 299. 10.23887/jisd.v4i2.24470
- Obama, B. (2013). Remarks by the President on Investing in America's Future. Brooklyn, New York. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/10/25/remarks-president-investing-america's-future>
- Sen, A. (1990). Development as capability expansion. The community development reader, 41, 58.

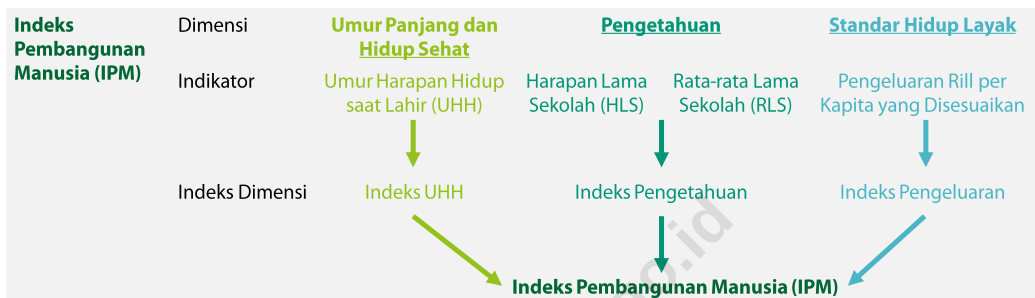
- Sen, A. (2014). Development as freedom (1999). The globalization and development reader: Perspectives on development and global change, 525.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic Development, todaro smith - Google Scholar. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Economic+Development%2C+todaro+smith&btnG=&oq=Economic+Development%2C+todaro+sm
- Todaro, Smith, 2005. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". Edisi Kedelapan Jakarta: Erlangga.
- UI Haq, M. (1995). Reflections on human development. oxford university Press.
- UNDP. (1990). Human Development Report 1990 (Vol. 184, Issues 7–8). <https://doi.org/10.21003/EA.V184-03>
- UNDP. (2015). Human Development Report 2015 Work for Human Development. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2015>
- UNDP. (2018). Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update.
- UNDP. (2022). Human Development Report 2021/2022. https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22reportenglish_0.pdf
- UNDP. (2023a). Human Development Index (HDI). <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- WCED. (1987). Our Common Future. World Commission on Environment and Development, United Nation
- WHO. Healthy life expectancy (HALE) at birth (years). <https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/gho-ghe-hale-healthy-life-expectancy-atbirth>. [4 April 2023 pukul 14.48]
- Wongboonsin, P. (2003). Comparative migration policies in the ESCAP region. Migration Patterns and Policies in the Asian and Pacific Region, 67.

Catatan Teknis

<https://www.bps.go.id>



Diagram Penghitungan IPM



Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Selanjutnya, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran riil per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk standar hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan *input* data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Pengetahuan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses penghitungan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pengetahuan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh anak yang berusia 7 tahun.

Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}} \quad (1)$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j
 p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
 p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
 m : jumlah komoditas

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

Nama Komoditas	Nama Komoditas	Nama Komoditas
(1)	(2)	(3)
Beras	Pisang lainnya	Rokok kretek tanpa filter
Tepung terigu	Pepaya	Rokok putih
Ketela pohon/singkong	Minyak kelapa	Rumah sendiri/bebas sewa
Kentang	Minyak goreng lainnya	Rumah kontrak
Tongkol/tuna/cakalang	Kelapa	Rumah sewa
Kembung	Gula pasir	Rumah dinas
Bandeng	Teh	Listrik
Mujair	Kopi	Air PAM
Mas	Garam	LPG
Lele	Kecap	Minyak tanah
Ikan segar lainnya	Penyedap masakan/vetsin	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)
Daging sapi	Mie instan	Perlengkapan mandi
Daging ayam ras	Roti manis/roti lainnya	Barang kecantikan
Daging ayam kampung	Kue kering	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut
Telur ayam ras	Kue basah	Sabun cuci
Susu kental manis	Makanan gorengan	Biaya RS Pemerintah
Susu bubuk	Gado-gado/ketoprak	Biaya RS Swasta
Susu bubuk bayi	Nasi campur/rames	Puskesmas/pustu
Bayam	Nasi goreng	Praktek dokter/poliklinik
Kangkung	Nasi putih	SPP
Kacang panjang	Lontong/ketupat sayur	Bensin
Bawang merah	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Transportasi/pengangkutan umum
Bawang putih	Sate/tongseng	Pos dan Telekomunikasi
Cabe merah	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi laki-laki dewasa
Cabe rawit	Makanan ringan anak	Pakaian jadi perempuan dewasa
Tahu	Ikang (goreng/bakar dll)	Pakaian jadi anak-anak
Tempe	Ayam/daging (goreng dll)	Alas kaki
Jeruk	Makanan jadi lainnya	Minyak Pelumas
Mangga	Air kemasan galon	Meubelair
Salak	Minuman jadi lainnya	Peralatan Rumah Tangga
Pisang ambon	Es lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga
Pisang raja	Roko kretek filter	Alat-alat Dapur/Makan

Langkah Penghitungan Indeks

Menghitung Indeks Dimensi

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum dalam Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Komponen IPM

Indikator Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur Harappan Hidup saat Lahir (UHH)	tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	0	15
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	ribu rupiah	1.007,436 ¹	26.572,352 ²

Catatan: ¹Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
²Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dengan mengacu pada nilai minimum dan maksimum pada Tabel 7.2, setiap indikator komponen IPM dihitung indeksnya dengan formula sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}} \tag{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \tag{3}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \tag{4}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \tag{5}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})} \tag{6}$$

Mengagregasikan Indeks Dimensi untuk Menghasilkan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari tiga indeks dimensi:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{UHH} \times I_{pengetahuan} \times I_{pengeluaran}} \times 100 \tag{7}$$

Contoh Penghitungan: DKI Jakarta

Indikator	Nilai
(1)	(2)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	72,91
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,13
Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun yang Disesuaikan	18.227

$$I_{UHH} = \frac{72,91 - 20}{85 - 20} = 0,814000$$

$$I_{HLS} = \frac{12,98 - 0}{18 - 0} = 0,721111$$

$$I_{RLS} = \frac{11,13 - 0}{15 - 0} = 0,742000$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{0,721111 + 0,742000}{2} = 0,731556$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(18.227) - \ln(1.007,436)}{\ln(26.572,352) - \ln(1.007,436)} = 0,884806$$

$$IPM = \sqrt[3]{0,814000 \times 0,731556 \times 0,884806} \times 100 = 80,77$$

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal capaian pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi": $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi": $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang": $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah": $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\% \quad (8)$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

Lampiran

<https://www.bps.go.id>



Lampiran 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2023

Provinsi	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	73,06	14,38	9,55	10.334	74,70	0,80
Sumatera Utara	73,67	13,48	9,82	11.049	75,13	0,83
Sumatera Barat	74,14	14,11	9,28	11.380	75,64	0,64
Riau	74,18	13,30	9,32	11.448	74,95	0,67
Jambi	73,84	13,13	8,81	11.160	73,73	0,85
Sumatera Selatan	74,04	12,63	8,50	11.472	73,18	0,97
Bengkulu	73,11	13,74	9,03	11.172	74,30	0,84
Lampung	74,17	12,77	8,29	10.769	72,48	0,96
Kepulauan Bangka Belitung	73,90	12,31	8,25	13.589	74,09	0,80
Kepulauan Riau	74,90	13,05	10,41	14.998	79,08	0,76
DKI Jakarta	75,81	13,33	11,45	19.373	83,55	0,94
Jawa Barat	74,91	12,68	8,83	11.695	74,24	0,83
Jawa Tengah	74,69	12,85	8,01	11.835	73,39	0,81
D.I. Yogyakarta	75,18	15,66	9,83	14.924	81,09	0,55
Jawa Timur	74,87	13,38	8,11	12.421	74,65	0,81
Banten	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69
Bali	74,88	13,58	9,45	14.382	78,01	0,79
Nusa Tenggara Barat	72,02	13,97	7,74	11.095	72,37	1,00
Nusa Tenggara Timur	71,57	13,22	7,82	8.248	68,40	1,14
Kalimantan Barat	73,71	12,67	7,71	9.810	70,47	1,09
Kalimantan Tengah	73,54	12,76	8,73	11.878	73,73	0,77
Kalimantan Selatan	73,97	12,86	8,55	12.953	74,66	0,89
Kalimantan Timur	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20	1,09
Kalimantan Utara	73,54	13,20	9,34	9.734	72,88	0,93
Sulawesi Utara	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04	0,70
Sulawesi Tengah	70,66	13,33	8,96	10.149	71,66	0,92
Sulawesi Selatan	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60	0,87
Sulawesi Tenggara	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94	0,77
Gorontalo	70,50	13,16	8,10	11.069	71,25	0,89
Sulawesi Barat	70,76	12,88	8,13	9.718	69,80	0,88
Maluku	70,45	14,08	10,20	9.278	72,75	0,99
Maluku Utara	70,76	13,74	9,26	8.834	70,98	1,02
Papua Barat	68,51	13,34	7,93	8.404	67,47	1,12
Papua	68,17	11,15	7,15	7.562	63,01	1,37
INDONESIA	73,93	13,15	8,77	11.899	74,39	0,84

Catatan: ¹UHH: Umur Harapan Hidup saat Lahir hasil LF SP2020

²HLS: Harapan Lama Sekolah

³RLS: Rata-rata Lama Sekolah

⁴Pengeluaran: Pengeluaran per Kapita Riil per Tahun yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ACEH	73,06	14,38	9,55	10.334	74,70	0,80
Simeulue	69,57	14,28	9,81	7.686	69,98	1,17
Aceh Singkil	69,85	14,35	8,70	9.374	71,14	0,75
Aceh Selatan	70,33	14,70	8,91	8.712	71,14	0,82
Aceh Tenggara	72,62	14,27	10,09	8.566	72,93	1,04
Aceh Timur	72,13	13,07	8,47	9.436	70,73	0,86
Aceh Tengah	72,93	14,85	9,89	11.323	76,45	0,87
Aceh Barat	71,89	14,64	9,98	10.085	74,62	0,72
Aceh Besar	73,11	14,76	10,36	10.309	75,98	0,72
Pidie	69,88	14,50	9,03	10.584	72,95	0,63
Bireuen	73,66	14,87	9,32	9.758	74,56	0,62
Aceh Utara	72,63	14,74	8,85	8.970	72,50	0,90
Aceh Barat Daya	70,47	13,67	8,77	9.043	70,47	0,97
Gayo Lues	69,80	14,34	8,42	9.407	70,82	1,00
Aceh Tamiang	73,63	14,23	9,24	9.050	73,02	1,30
Nagan Raya	72,53	14,17	8,96	9.062	72,15	0,97
Aceh Jaya	70,76	14,02	8,74	10.461	72,44	0,72
Bener Meriah	72,85	13,72	10,12	11.855	76,06	0,80
Pidie Jaya	73,16	14,99	9,58	11.005	76,04	0,60
Kota Banda Aceh	75,02	17,93	13,04	17.521	88,32	0,45
Kota Sabang	73,34	14,68	11,20	12.137	78,70	0,86
Kota Langsa	73,98	15,70	11,27	12.678	80,50	0,68
Kota Lhokseumawe	74,76	15,54	11,27	12.125	80,26	1,11
Kota Subulussalam	69,68	15,06	8,32	8.065	69,66	1,37
SUMATERA UTARA	73,67	13,48	9,82	11.049	75,13	0,83
Nias	71,74	13,30	6,14	7.301	65,15	1,32
Mandailing Natal	71,72	13,86	8,84	10.251	72,65	0,67
Tapanuli Selatan	71,61	13,58	9,51	11.829	74,58	0,84
Tapanuli Tengah	71,76	13,49	8,87	10.690	72,77	0,82
Tapanuli Utara	74,10	13,73	10,09	12.115	76,86	0,56
Toba Samosir	74,22	13,59	10,59	12.676	77,83	0,32
Labuhan Batu	72,88	13,25	9,49	11.670	74,70	1,00
Asahan	73,39	12,64	8,83	11.795	73,59	0,56
Simalungun	74,08	12,82	9,72	11.746	75,17	0,66
Dairi	74,13	13,32	9,88	10.969	75,18	0,78

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karo	74,16	13,25	10,03	12.779	76,88	0,67
Deli Serdang	73,65	13,39	10,28	12.890	77,16	0,39
Langkat	74,14	13,27	8,73	11.632	74,33	0,41
Nias Selatan	71,61	12,78	6,48	7.299	64,98	1,45
Humbang Hasundutan	74,07	13,32	10,01	8.476	72,49	0,61
Pakpak Bharat	72,61	13,90	9,61	8.764	72,30	1,02
Samosir	74,10	13,51	9,47	9.158	72,93	0,50
Serdang Bedagai	73,11	12,64	8,85	11.695	73,40	0,70
Batu Bara	72,63	13,11	8,50	10.933	72,56	1,13
Padang Lawas Utara	71,57	13,53	9,55	10.615	73,45	0,93
Padang Lawas	71,52	13,70	9,43	9.395	72,16	1,05
Labuhan Batu Selatan	72,46	13,42	8,93	11.950	74,23	0,87
Labuhan Batu Utara	74,06	13,57	8,87	12.429	75,45	1,13
Nias Utara	72,12	13,36	6,85	6.788	65,44	1,38
Nias Barat	72,30	12,98	7,07	6.382	64,68	1,13
Kota Sibolga	74,02	13,42	10,44	12.285	77,07	0,50
Kota Tanjung Balai	74,01	13,14	9,68	11.753	75,42	0,92
Kota Pematang Siantar	74,75	14,60	11,58	12.984	80,46	0,94
Kota Tebing Tinggi	74,07	13,12	10,86	13.385	78,17	1,01
Kota Medan	74,76	14,78	11,62	15.674	82,61	0,58
Kota Binjai	74,18	14,17	11,19	11.567	78,11	0,79
Kota Padangsidimpuan	73,54	14,59	11,12	11.552	78,10	0,48
Kota Gunungsitoli	74,03	13,78	8,65	8.635	71,55	0,62
SUMATERA BARAT	74,14	14,11	9,28	11.380	75,64	0,64
Kepulauan Mentawai	71,06	12,90	7,76	6.891	65,79	1,48
Pesisir Selatan	73,27	13,36	8,58	9.953	72,24	0,73
Solok	72,31	13,55	7,90	10.717	71,92	0,74
Sijunjung	72,59	12,72	8,57	11.018	72,30	1,37
Tanah Datar	74,19	14,78	9,02	10.905	75,57	0,93
Padang Pariaman	73,77	14,19	8,41	11.432	74,54	1,18
Agam	74,22	13,89	9,22	10.402	74,44	0,81
Lima Puluh Kota	73,25	13,41	8,12	10.285	72,05	0,57
Pasaman	72,04	13,25	8,13	8.908	69,85	1,06
Solok Selatan	72,22	12,80	8,69	10.884	72,24	1,23
Dharmasraya	74,04	12,68	8,71	11.901	73,87	0,93

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasaman Barat	72,44	13,70	8,81	9.538	72,03	0,90
Kota Padang	74,94	16,56	11,62	15.089	83,98	0,35
Kota Solok	74,56	14,36	11,36	12.709	79,66	0,39
Kota Sawah Lunto	73,79	13,69	10,44	10.829	75,91	0,93
Kota Padang Panjang	74,24	15,29	11,94	11.310	79,76	0,61
Kota Bukittinggi	75,33	15,01	11,64	13.859	81,88	0,44
Kota Payakumbuh	74,77	14,30	10,88	13.978	80,14	0,55
Kota Pariaman	74,20	14,79	10,79	13.355	79,76	0,57
RIAU	74,18	13,30	9,32	11.448	74,95	0,67
Kuantan Singingi	72,68	13,37	8,90	10.945	73,35	0,78
Indragiri Hulu	73,38	12,59	8,42	10.957	72,28	0,82
Indragiri Hilir	72,27	12,20	7,31	10.659	69,64	0,75
Pelalawan	74,37	12,90	8,73	12.399	74,69	0,73
Siak	73,72	12,86	9,88	12.637	75,97	0,58
Kampar	74,29	13,60	9,40	11.662	75,59	0,51
Rokan Hulu	73,59	12,88	8,81	10.055	72,28	0,81
Bengkalis	73,88	13,34	9,73	12.153	75,96	0,77
Rokan Hilir	73,64	12,88	8,52	10.097	71,98	0,88
Kepulauan Meranti	72,14	12,86	7,99	8.613	68,96	0,95
Kota Pekanbaru	75,55	15,58	11,94	14.983	83,67	0,35
Kota Dumai	73,31	13,33	10,16	12.457	76,45	0,33
JAMBI	73,84	13,13	8,81	11.160	73,73	0,85
Kerinci	73,18	13,91	8,59	10.965	73,77	0,72
Merangin	73,97	12,25	8,13	10.969	71,81	1,17
Sarolangun	73,46	12,48	8,14	12.392	73,05	0,54
Batang Hari	74,48	12,96	8,22	10.528	72,50	0,71
Muaro Jambi	74,55	13,15	8,69	9.525	72,26	1,19
Tanjung Jabung Timur	74,09	12,20	7,43	9.898	69,85	1,29
Tanjung Jabung Barat	73,21	12,67	8,31	10.229	71,44	0,79
Tebo	73,45	12,92	7,94	10.894	71,99	1,19
Bungo	73,76	12,66	8,39	12.224	73,57	0,67
Kota Jambi	74,85	15,54	11,32	12.783	80,93	0,68
Kota Sungai Penuh	74,01	14,83	10,36	11.027	77,20	0,59
SUMATERA SELATAN	74,04	12,63	8,50	11.472	73,18	0,97
Ogan Komering Ulu	73,44	12,99	8,85	10.859	73,17	1,05

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ogan Komering Ilir	74,09	11,97	7,08	11.736	70,80	0,90
Muara Enim	74,29	12,01	8,14	11.683	72,33	1,13
Lahat	73,36	12,44	8,56	10.811	72,15	0,98
Musi Rawas	73,96	12,22	7,56	10.429	70,52	0,69
Musi Banyuasin	74,22	12,31	7,68	10.862	71,30	0,81
Banyu Asin	74,29	12,09	7,46	10.731	70,67	1,03
Ogan Komering Ulu Selatan	73,21	11,79	8,05	9.176	69,05	1,05
Ogan Komering Ulu Timur	74,31	12,47	8,07	12.046	73,05	1,00
Ogan Ilir	73,20	12,41	8,08	11.456	72,01	1,14
Empat Lawang	70,81	12,10	7,66	10.375	69,07	0,99
Penulak Abab Lematang Ilir	73,84	12,49	7,08	9.139	68,78	1,31
Musi Rawas Utara	73,01	11,70	7,50	10.631	69,63	1,27
Kota Palembang	75,37	14,45	10,92	15.592	81,72	0,65
Kota Prabumulih	74,58	13,31	10,35	13.494	78,07	1,21
Kota Pagar Alam	73,61	13,49	9,43	9.683	73,25	1,17
Kota Lubuklinggau	74,67	13,55	9,93	14.211	78,36	0,84
BENGKULU	73,11	13,74	9,03	11.172	74,30	0,84
Bengkulu Selatan	72,87	13,65	9,41	10.657	74,06	0,65
Rejang Lebong	73,67	14,19	8,80	10.848	74,43	1,21
Bengkulu Utara	73,03	12,91	8,11	11.188	72,27	0,71
Kaur	72,74	13,14	8,41	9.365	70,92	0,88
Seluma	72,71	13,32	8,13	8.949	70,27	0,76
Mukomuko	73,71	12,86	8,56	11.075	73,00	1,18
Lebong	72,59	12,90	8,26	12.012	72,95	0,83
Kepahiang	72,26	13,14	8,36	10.044	71,38	0,75
Bengkulu Tengah	72,46	13,46	7,51	10.114	70,81	0,74
Kota Bengkulu	74,43	16,06	11,83	14.924	83,38	0,54
LAMPUNG	74,17	12,77	8,29	10.769	72,48	0,96
Lampung Barat	73,78	12,29	8,36	10.593	71,72	1,00
Tanggamus	73,87	12,31	7,36	10.038	69,93	0,88
Lampung Selatan	74,22	12,64	7,77	10.617	71,55	0,85
Lampung Timur	73,95	12,97	8,14	10.812	72,44	0,86
Lampung Tengah	74,17	13,04	7,81	12.195	73,39	1,10
Lampung Utara	73,91	12,55	8,36	9.374	70,78	0,84
Way Kanan	74,11	12,43	7,74	9.887	70,51	0,84

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tulangbawang	73,81	12,29	7,57	11.552	71,56	0,68
Pesawaran	73,80	12,62	7,99	8.633	69,46	1,33
Pringsewu	74,33	12,92	8,42	11.016	73,11	0,74
Mesuji	73,71	11,81	7,11	8.947	67,79	1,00
Tulang Bawang Barat	74,02	12,10	7,79	9.162	69,38	0,99
Pesisir Barat	73,75	12,14	8,70	9.102	70,40	1,18
Kota Bandar Lampung	74,53	14,72	10,97	13.092	79,86	0,67
Kota Metro	75,14	14,77	11,00	12.618	79,85	0,59
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	73,90	12,31	8,25	13.589	74,09	0,80
Bangka	73,03	13,11	8,32	13.146	74,34	0,98
Belitung	72,52	11,90	8,98	14.365	74,49	0,89
Bangka Barat	71,91	11,73	7,47	13.105	71,13	0,48
Bangka Tengah	73,54	12,12	7,23	13.643	72,36	0,42
Bangka Selatan	71,51	11,59	6,91	12.627	69,67	0,80
Belitung Timur	73,57	11,66	8,90	12.536	73,31	0,76
Kota Pangkal Pinang	75,01	13,19	10,50	16.734	80,45	0,85
KEPULAUAN RIAU	74,90	13,05	10,41	14.998	79,08	0,76
Karimun	74,58	12,61	8,69	12.756	74,70	1,00
Bintan	74,82	13,44	8,92	14.882	77,50	0,91
Natuna	74,15	13,93	9,08	15.409	78,23	0,82
Lingga	73,45	12,63	7,35	12.485	72,23	1,05
Kepulauan Anambas	73,50	13,05	7,40	12.495	72,80	0,90
Kota Batam	74,98	13,34	11,19	18.990	82,64	0,47
Kota Tanjung Pinang	74,68	14,15	10,65	16.213	81,14	0,69
DKI JAKARTA	75,81	13,33	11,45	19.373	83,55	0,94
Kepulauan Seribu	74,89	12,66	9,03	13.523	75,91	0,76
Kota Jakarta Selatan	76,02	13,66	11,75	24.975	86,71	0,98
Kota Jakarta Timur	75,37	14,06	11,88	18.712	84,26	0,79
Kota Jakarta Pusat	76,34	13,29	11,54	18.202	83,29	0,47
Kota Jakarta Barat	75,81	12,87	11,23	21.709	83,85	0,50
Kota Jakarta Utara	75,07	12,67	10,84	19.617	81,85	0,36
JAWA BARAT	74,91	12,68	8,83	11.695	74,24	0,83
Bogor	74,67	12,64	8,37	11.153	73,02	0,79
Sukabumi	74,65	12,38	7,33	9.482	69,71	1,22
Cianjur	74,61	12,03	7,22	8.626	68,18	0,93

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bandung	74,92	12,73	9,10	11.018	74,03	0,78
Garut	74,66	12,16	7,84	8.685	69,22	1,04
Tasikmalaya	73,87	12,63	7,96	8.562	69,38	1,36
Ciamis	74,96	14,29	8,09	9.750	73,12	0,83
Kuningan	74,91	12,26	7,89	10.011	70,99	0,78
Cirebon	74,71	12,41	7,64	11.128	71,81	1,25
Majalengka	74,73	12,26	7,52	10.340	70,76	0,83
Sumedang	75,04	13,01	8,73	11.136	74,02	0,67
Indramayu	74,61	12,29	6,94	10.580	70,19	0,96
Subang	74,87	11,91	7,45	11.537	71,42	1,25
Purwakarta	74,67	12,18	8,13	12.619	73,43	0,74
Karawang	74,90	12,20	8,04	12.392	73,25	0,84
Bekasi	75,09	13,17	9,57	12.123	76,13	0,70
Bandung Barat	74,78	11,91	8,23	9.392	70,33	0,73
Pangandaran	74,88	12,30	8,04	9.406	70,57	0,51
Kota Bogor	75,52	13,45	10,64	12.656	78,36	0,88
Kota Sukabumi	74,89	13,60	10,37	11.799	77,16	1,21
Kota Bandung	75,53	14,24	11,06	18.236	83,29	0,65
Kota Cirebon	75,17	13,16	10,37	12.506	77,45	0,73
Kota Bekasi	75,86	14,12	11,66	16.479	83,06	0,65
Kota Depok	75,53	13,96	11,58	16.279	82,53	0,62
Kota Cimahi	75,27	13,84	11,39	12.883	79,69	0,86
Kota Tasikmalaya	75,08	13,49	9,54	11.063	75,47	0,84
Kota Banjar	74,77	13,27	8,79	11.356	74,45	0,70
JAWA TENGAH	74,69	12,85	8,01	11.835	73,39	0,81
Cilacap	74,73	12,67	7,39	11.432	72,04	1,15
Banyumas	74,20	13,26	7,87	12.492	73,96	0,90
Purbalingga	73,98	12,02	7,34	10.964	70,51	1,02
Banjarnegara	74,50	11,82	6,86	10.226	69,16	0,79
Kebumen	74,98	13,37	7,86	9.734	71,88	0,83
Purworejo	75,37	13,53	8,46	11.110	74,35	0,92
Wonosobo	74,01	11,80	6,89	11.577	70,18	0,70
Magelang	74,44	12,61	7,82	10.493	71,56	0,85
Boyolali	76,23	12,66	8,09	13.716	75,41	0,59
Klaten	77,07	13,41	9,27	12.968	77,59	0,83

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sukoharjo	77,86	13,91	9,84	12.319	78,65	0,91
Wonogiri	76,56	12,52	7,67	10.283	71,97	1,31
Karanganyar	77,72	13,71	9,02	12.260	77,31	0,95
Sragen	75,97	12,92	7,87	13.439	75,10	0,60
Grobogan	75,04	12,46	7,28	11.083	71,49	0,73
Blora	74,71	12,51	7,08	10.541	70,63	0,97
Rembang	74,77	12,15	7,72	11.399	71,89	1,25
Pati	76,39	12,96	7,80	11.385	73,59	0,62
Kudus	76,86	13,26	9,34	12.088	76,71	1,08
Jepara	76,04	12,85	8,26	11.306	73,85	0,96
Demak	75,60	13,34	8,27	11.166	74,07	0,97
Semarang	75,95	13,05	8,07	12.943	75,13	0,62
Temanggung	75,77	12,61	7,50	10.108	71,33	0,79
Kendal	74,58	12,99	7,73	12.755	73,86	0,92
Batang	74,85	12,15	7,07	10.470	70,20	1,08
Pekalongan	73,99	12,44	7,47	11.297	71,45	0,90
Pemalang	73,98	12,01	6,55	9.587	68,08	1,22
Tegal	74,01	12,92	7,34	10.537	71,12	0,99
Brebes	73,95	12,44	6,40	10.993	69,71	1,31
Kota Magelang	77,22	14,40	11,20	13.175	81,17	0,97
Kota Surakarta	77,63	14,90	11,00	15.870	83,54	0,55
Kota Salatiga	77,93	15,44	11,24	16.650	84,99	0,76
Kota Semarang	77,90	15,55	10,81	16.420	84,43	0,42
Kota Pekalongan	74,60	12,87	9,29	14.056	76,71	1,07
Kota Tegal	74,84	13,18	9,24	14.013	77,06	1,12
D.I. YOGYAKARTA	75,18	15,66	9,83	14.924	81,09	0,55
Kulon Progo	75,35	14,48	9,18	10.723	75,82	0,45
Bantul	74,64	15,61	9,79	16.524	81,74	0,86
Gunung Kidul	74,76	13,39	7,32	10.065	71,46	0,39
Sleman	75,26	16,77	11,01	16.976	84,86	0,55
Kota Yogyakarta	75,52	17,62	12,11	19.920	88,61	0,69
JAWA TIMUR	74,87	13,38	8,11	12.421	74,65	0,81
Pacitan	74,58	12,68	7,88	9.681	70,94	1,07
Ponorogo	75,07	13,77	7,78	10.658	73,18	0,81
Trenggalek	75,16	12,62	7,90	10.465	71,96	0,95

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tulungagung	74,99	13,34	8,66	11.565	74,65	0,69
Blitar	75,12	12,65	7,83	11.499	72,84	0,82
Kediri	74,85	13,62	8,24	11.952	74,68	0,65
Malang	75,14	13,48	7,75	10.791	73,00	1,07
Lumajang	74,41	12,16	7,14	9.720	69,37	1,30
Jember	74,02	13,49	6,52	10.277	70,42	0,89
Banyuwangi	73,93	13,12	7,76	12.820	73,79	0,87
Bondowoso	73,19	13,32	6,36	11.255	70,56	0,93
Situbondo	73,22	13,19	6,90	10.702	70,65	1,28
Probolinggo	73,80	12,63	6,29	11.756	70,36	1,15
Pasuruan	74,41	12,77	7,44	11.239	71,91	0,87
Sidoarjo	75,36	14,97	10,78	15.311	81,88	0,63
Mojokerto	74,74	12,97	9,11	13.467	76,23	0,82
Jombang	74,43	13,59	8,77	11.999	75,16	0,67
Nganjuk	74,43	13,17	8,24	12.821	74,70	1,01
Madiun	74,59	13,23	7,95	12.259	74,02	0,69
Magetan	75,19	14,07	8,67	12.495	76,30	0,71
Ngawi	75,01	12,85	7,78	11.897	73,28	0,91
Bojonegoro	74,72	12,92	7,45	10.776	71,80	0,91
Tuban	74,77	12,27	7,40	11.174	71,40	0,86
Lamongan	74,86	14,02	8,34	12.019	75,29	0,61
Gresik	74,24	13,97	10,01	13.870	78,44	1,06
Bangkalan	73,29	11,97	5,99	9.438	66,82	1,07
Sampang	73,49	12,54	5,07	9.363	66,19	1,15
Pamekasan	73,51	13,68	7,15	9.420	70,32	1,40
Sumenep	73,69	13,58	5,94	9.807	69,13	0,93
Kota Kediri	75,74	15,45	10,69	13.276	80,97	1,06
Kota Blitar	74,97	14,57	10,78	14.548	80,78	0,79
Kota Malang	75,32	15,77	10,94	17.222	84,00	0,74
Kota Probolinggo	74,10	13,73	9,56	12.999	76,93	1,12
Kota Pasuruan	74,64	13,66	9,78	14.250	78,30	0,76
Kota Mojokerto	75,80	14,04	11,05	14.422	80,90	0,89
Kota Madiun	75,40	14,44	11,82	17.115	83,71	0,83
Kota Surabaya	75,82	14,85	10,70	18.977	83,99	0,80
Kota Batu	75,14	14,56	9,85	13.603	79,07	1,20

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BANTEN	74,77	13,09	9,15	12.601	75,77	0,69
Pandeglang	74,01	13,73	7,15	9.151	70,28	0,83
Lebak	73,80	12,10	6,60	9.130	67,68	0,73
Tangerang	75,18	12,87	8,93	12.749	75,56	0,55
Serang	74,62	12,86	7,79	11.320	72,63	0,89
Kota Tangerang	75,30	13,89	10,91	15.377	80,98	0,67
Kota Cilegon	74,81	13,21	10,38	13.663	78,24	0,72
Kota Serang	75,13	12,82	8,91	14.088	76,43	0,55
Kota Tangerang Selatan	75,64	14,68	11,85	16.225	83,57	0,35
BALI	74,88	13,58	9,45	14.382	78,01	0,79
Jembrana	74,84	13,02	8,65	12.236	74,80	0,56
Tabanan	75,41	13,04	9,35	14.832	77,87	0,84
Badung	75,73	14,22	10,90	17.915	83,00	1,06
Gianyar	75,45	14,09	9,80	15.047	79,69	1,04
Klungkung	74,61	13,12	8,48	11.760	74,18	0,56
Bangli	73,98	12,52	7,57	11.670	71,99	0,73
Karangasem	73,93	12,63	6,68	10.753	70,09	0,88
Buleleng	74,65	13,27	7,57	13.987	74,87	0,52
Kota Denpasar	75,59	14,11	11,52	20.128	84,68	0,34
NUSA TENGGARA BARAT	72,02	13,97	7,74	11.095	72,37	1,00
Lombok Barat	72,37	13,98	6,87	11.960	72,18	1,04
Lombok Tengah	71,39	13,87	6,61	10.948	70,41	1,21
Lombok Timur	71,72	14,06	7,12	10.152	70,65	1,17
Sumbawa	72,41	13,24	8,52	9.981	71,68	1,37
Dompu	71,54	13,83	8,97	9.404	71,77	1,14
Bima	71,65	13,65	8,29	8.963	70,33	1,01
Sumbawa Barat	72,65	13,66	8,98	12.214	74,84	0,67
Lombok Utara	71,26	13,01	6,39	9.785	68,02	1,39
Kota Mataram	74,65	15,67	9,56	15.894	81,15	0,60
Kota Bima	72,97	15,06	10,95	11.740	78,24	0,63
NUSA TENGGARA TIMUR	71,57	13,22	7,82	8.248	68,40	1,14
Sumba Barat	71,16	13,26	6,92	7.993	66,82	1,20
Sumba Timur	71,31	12,86	7,57	10.008	69,63	1,18
Kupang	69,24	13,89	7,42	8.220	67,51	1,18
Timor Tengah Selatan	71,02	12,61	6,97	7.450	65,39	1,32

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Timor Tengah Utara	70,75	13,35	8,16	6.889	66,56	1,39
Belu	73,97	12,31	7,39	7.907	67,50	0,94
Alor	70,55	12,28	8,45	7.565	66,82	1,12
Lembata	73,00	12,46	8,26	7.962	68,41	0,96
Flores Timur	73,57	12,95	8,04	8.223	69,24	1,29
Sikka	73,97	13,66	6,98	8.678	69,41	1,09
Ende	72,74	13,82	8,20	9.739	71,77	0,94
Ngada	74,12	12,74	8,82	9.350	71,61	1,24
Manggarai	72,20	13,71	7,63	7.903	68,48	0,88
Rote Ndao	69,55	13,22	7,82	7.061	65,79	1,14
Manggarai Barat	72,59	12,53	7,94	7.913	67,84	1,33
Sumba Tengah	69,21	13,13	7,00	6.484	63,63	1,26
Sumba Barat Daya	68,99	13,10	6,38	7.080	63,74	0,93
Nagekeo	72,24	12,59	8,14	8.706	69,03	1,26
Manggarai Timur	72,79	12,59	7,70	6.276	65,05	1,47
Sabu Raijua	66,46	13,18	6,98	5.899	61,37	1,69
Malaka	71,28	12,82	7,13	6.569	64,50	1,03
Kota Kupang	74,66	16,44	11,62	13.762	82,77	0,49
KALIMANTAN BARAT	73,71	12,67	7,71	9.810	70,47	1,09
Sambas	74,02	12,72	6,75	11.057	70,60	1,03
Bengkayang	74,20	12,16	7,22	9.859	69,53	1,15
Landak	73,95	12,53	7,24	8.423	68,22	1,40
Mempawah	74,04	12,88	7,20	8.690	68,91	1,47
Sanggau	74,01	11,87	7,44	9.213	68,73	1,27
Ketapang	73,58	11,96	7,55	9.984	69,61	1,09
Sintang	74,07	12,30	7,64	9.128	69,39	1,17
Kapuas Hulu	73,33	12,20	7,82	8.055	67,86	1,42
Sekadau	73,93	11,92	7,13	7.981	66,83	1,06
Melawi	73,70	11,34	7,42	9.155	67,92	1,39
Kayong Utara	72,17	12,12	6,35	8.594	66,06	1,49
Kubu Raya	73,27	13,89	7,04	9.605	70,50	0,96
Kota Pontianak	75,07	15,04	10,45	15.632	81,63	0,65
Kota Singkawang	74,42	12,94	8,21	12.457	74,13	0,64
KALIMANTAN TENGAH	73,54	12,76	8,73	11.878	73,73	0,77
Kotawaringin Barat	73,13	12,77	8,66	13.798	74,92	0,71

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Timur	74,22	12,88	8,17	12.546	73,99	0,74
Kapuas	72,75	12,96	7,84	11.829	72,40	0,95
Barito Selatan	72,63	12,80	9,13	12.067	74,01	0,76
Barito Utara	73,58	12,54	8,91	10.720	72,71	0,76
Sukamara	74,12	12,16	8,17	9.494	70,35	0,70
Lamandau	73,31	12,52	8,67	12.050	73,44	0,87
Seruyan	73,09	12,03	8,00	10.157	70,24	0,62
Katingan	73,98	12,98	8,85	11.399	73,90	0,64
Pulang Pisau	72,97	12,51	8,27	10.752	71,62	0,80
Gunung Mas	73,31	12,05	9,25	11.462	73,18	0,94
Barito Timur	72,04	12,87	9,45	12.083	74,21	0,71
Murung Raya	73,23	12,04	7,81	11.053	70,91	1,11
Kota Palangka Raya	74,23	14,99	11,65	14.727	81,95	0,59
KALIMANTAN SELATAN	73,97	12,86	8,55	12.953	74,66	0,89
Tanah Laut	74,46	12,41	7,92	12.198	72,98	0,90
Kota Baru	73,76	12,07	7,55	12.480	72,01	0,61
Banjar	73,33	13,03	7,94	13.301	74,01	1,04
Barito Kuala	72,28	12,55	7,74	10.750	70,67	1,14
Tapin	74,47	12,33	8,05	12.776	73,52	1,25
Hulu Sungai Selatan	72,52	12,46	7,86	13.743	73,21	1,02
Hulu Sungai Tengah	72,33	12,24	8,29	12.782	72,76	0,61
Hulu Sungai Utara	72,21	13,19	7,77	10.491	71,12	1,12
Tabalong	74,63	12,91	9,14	12.507	75,43	0,82
Tanah Bumbu	74,28	12,60	8,30	12.516	73,86	0,71
Balangan	73,69	12,82	8,03	11.888	72,97	1,07
Kota Banjarmasin	74,88	13,97	10,24	15.280	79,98	0,65
Kota Banjar Baru	74,90	14,85	10,99	14.524	81,25	0,53
KALIMANTAN TIMUR	74,72	14,02	9,99	13.202	78,20	1,09
Paser	73,89	13,37	8,91	11.651	74,56	0,96
Kutai Barat	73,73	13,25	8,85	11.291	73,97	1,11
Kutai Kartanegara	74,12	13,64	9,26	12.323	75,95	0,85
Kutai Timur	74,33	13,01	9,45	11.961	75,33	0,86
Berau	73,45	13,36	9,56	13.620	76,71	0,62
Penajam Paser Utara	74,03	12,86	8,53	12.517	74,33	1,05
Mahakam Ulu	73,44	12,63	8,49	8.696	70,02	1,23

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kota Balikpapan	75,64	14,24	10,93	16.195	82,03	0,66
Kota Samarinda	75,27	15,39	10,93	15.610	82,61	1,09
Kota Bontang	74,81	13,43	10,92	17.659	81,63	0,78
KALIMANTAN UTARA	73,54	13,20	9,34	9.734	72,88	0,93
Malinau	73,25	13,34	9,43	10.708	74,00	0,61
Bulungan	73,83	13,04	9,21	10.205	73,20	0,88
Tana Tidung	73,47	12,39	9,04	8.386	70,06	0,88
Nunukan	73,11	12,68	8,26	7.787	68,43	0,81
Kota Tarakan	74,24	14,21	10,36	11.992	77,61	1,12
SULAWESI UTARA	73,85	12,96	9,77	11.497	75,04	0,70
Bolaang Mongondow	71,94	11,63	8,36	10.915	70,48	0,95
Minahasa	74,96	14,18	10,11	13.027	78,48	0,98
Kepulauan Sangihe	74,49	12,60	8,64	11.946	73,94	0,80
Kepulauan Talaud	73,25	12,66	9,91	9.146	72,22	0,96
Minahasa Selatan	74,07	12,99	9,41	12.090	75,25	1,01
Minahasa Utara	74,50	13,07	10,30	11.958	76,50	0,76
Bolaang Mongondow Utara	73,41	12,38	8,58	9.652	70,97	0,82
Siau Tagulandang Biaro	74,40	12,03	9,25	8.742	70,81	0,90
Minahasa Tenggara	73,11	12,45	9,13	11.034	72,97	0,57
Bolaang Mongondow Selatan	70,80	12,33	8,17	9.593	69,17	0,74
Bolaang Mongondow Timur	73,25	11,90	8,27	9.741	70,09	1,07
Kota Manado	75,02	14,19	11,44	14.822	81,40	0,54
Kota Bitung	74,22	12,66	9,94	12.954	76,33	0,51
Kota Tomohon	75,28	14,24	10,99	12.488	79,29	0,81
Kota Kotamobagu	74,70	12,90	10,33	11.452	76,01	0,60
SULAWESI TENGAH	70,66	13,33	8,96	10.149	71,66	0,92
Banggai Kepulauan	67,35	13,09	8,62	8.066	67,05	1,13
Banggai	72,09	13,34	8,63	10.400	72,19	0,85
Morowali	71,00	13,38	9,37	11.708	73,82	0,59
Poso	72,98	13,74	9,53	9.622	73,25	0,69
Donggala	70,52	12,61	7,99	8.766	68,17	1,01
Toli-Toli	71,09	13,04	8,77	8.665	69,68	1,32
Buol	71,06	13,17	9,09	8.678	70,18	1,17
Parigi Moutong	68,62	12,51	8,04	10.471	69,06	1,13
Tojo Una-Una	70,89	12,37	8,51	8.550	68,47	1,26

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sigi	71,11	13,05	9,03	8.891	70,28	1,27
Banggai Laut	70,75	13,03	8,64	8.470	69,12	1,05
Morowali Utara	72,19	12,29	8,94	9.623	70,74	1,03
Kota Palu	73,71	16,51	11,74	15.501	83,71	0,54
SULAWESI SELATAN	73,63	13,54	8,76	11.841	74,60	0,87
Kepulauan Selayar	73,27	12,69	8,35	9.830	71,13	1,22
Bulukumba	74,01	13,43	8,26	11.392	73,64	1,22
Bantaeng	72,67	12,53	7,09	12.304	71,28	1,24
Jeneponto	73,81	12,12	7,00	9.781	68,95	1,20
Takalar	73,43	12,49	7,66	11.239	71,46	0,85
Gowa	74,03	13,70	8,41	10.233	73,01	0,79
Sinjai	72,83	13,26	7,80	10.180	71,20	0,85
Maros	73,55	13,50	8,03	11.795	73,56	0,88
Pangkajene dan Kepulauan	72,87	12,80	8,31	12.241	73,23	1,13
Barru	72,57	13,62	8,54	11.712	73,80	1,15
Bone	73,20	13,00	7,54	9.682	70,25	1,18
Soppeng	73,47	13,21	8,27	10.098	71,94	1,25
Wajo	73,25	13,31	7,45	13.192	73,56	1,20
Sidenreng Rappang	74,32	13,02	8,20	12.739	74,38	0,77
Pinrang	74,47	13,27	8,30	12.559	74,70	1,08
Enrekang	73,92	13,87	8,94	11.636	75,11	0,67
Luwu	73,30	13,41	8,73	10.691	73,23	1,12
Tana Toraja	74,63	13,88	8,60	8.017	71,01	1,21
Luwu Utara	73,56	12,59	8,14	12.513	73,31	1,15
Luwu Timur	74,32	13,01	8,93	13.451	75,84	0,57
Toraja Utara	74,88	13,42	8,51	8.871	71,69	1,21
Kota Makasar	75,15	15,61	11,56	17.889	84,85	0,47
Kota Parepare	74,44	14,54	10,70	14.495	80,36	0,61
Kota Palopo	74,00	15,12	11,13	13.892	80,77	0,66
SULAWESI TENGGARA	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94	0,77
Buton	70,36	13,88	8,49	7.995	68,96	1,34
Muna	71,56	14,02	8,53	8.703	70,62	0,76
Konawe	72,78	13,04	9,56	10.963	73,88	1,01
Kolaka	73,54	13,03	9,35	13.055	75,73	1,00
Konawe Selatan	71,72	12,78	8,51	9.753	70,64	1,39

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bombana	70,88	11,90	8,07	9.132	68,12	0,93
Wakatobi	70,76	13,52	8,51	10.240	71,45	0,80
Kolaka Utara	70,62	12,17	8,81	11.020	71,11	0,91
Buton Utara	71,36	13,17	9,12	8.289	69,85	0,98
Konawe Utara	70,53	13,12	9,60	10.113	72,11	0,82
Kolaka Timur	73,11	12,70	8,40	8.520	69,61	1,22
Konawe Kepulauan	70,25	12,54	9,45	7.564	68,11	0,92
Muna Barat	71,17	12,62	7,86	8.076	67,44	1,37
Buton Tengah	70,37	13,20	7,34	8.003	66,94	0,80
Buton Selatan	70,14	13,26	7,65	7.936	67,19	1,08
Kota Kendari	75,34	16,91	12,53	15.116	85,51	0,38
Kota Baubau	74,53	15,52	11,02	11.207	79,00	1,09
GORONTALO	70,50	13,16	8,10	11.069	71,25	0,89
Boalemo	71,24	12,48	7,30	9.941	68,78	1,36
Gorontalo	70,81	13,21	7,79	10.336	70,37	1,24
Pohuwato	69,40	12,46	7,59	11.018	69,30	0,92
Bone Bolango	70,19	13,67	8,35	11.114	71,97	0,81
Gorontalo Utara	69,65	12,49	7,17	10.037	68,00	0,88
Kota Gorontalo	73,25	14,58	10,40	13.351	78,64	0,54
SULAWESI BARAT	70,76	12,88	8,13	9.718	69,80	0,88
Majene	70,06	13,71	9,28	10.462	72,44	1,12
Polewali Mandar	70,82	13,48	7,71	9.096	69,24	1,20
Mamasa	72,16	12,54	8,11	8.108	68,14	0,90
Mamuju	71,79	13,26	8,16	10.075	71,07	1,02
Pasangkayu	70,09	12,07	8,12	11.649	70,42	0,69
Mamuju Tengah	69,76	12,66	7,73	8.821	67,63	0,83
MALUKU	70,45	14,08	10,20	9.278	72,75	0,99
Maluku Tenggara Barat	70,19	12,33	9,91	6.722	67,04	1,07
Maluku Tenggara	70,71	12,90	9,79	8.174	69,91	0,98
Maluku Tengah	70,83	14,37	9,78	10.788	74,34	0,83
Buru	70,19	13,23	9,01	10.879	72,11	0,82
Kepulauan Aru	70,27	12,36	8,97	8.133	68,19	1,23
Seram Bagian Barat	70,88	13,69	9,35	9.324	71,68	1,30
Seram Bagian Timur	68,33	12,91	8,82	10.020	69,84	1,14
Maluku Barat Daya	69,30	12,70	8,92	7.223	66,71	1,32

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buru Selatan	70,11	12,84	8,23	8.108	67,68	1,30
Kota Ambon	72,86	16,07	12,22	14.692	82,84	0,49
Kota Tual	71,32	14,01	10,66	7.825	71,67	1,16
MALUKU UTARA	70,76	13,74	9,26	8.834	70,98	1,02
Halmahera Barat	70,46	13,24	8,58	8.046	68,56	1,06
Halmahera Tengah	70,19	13,23	9,19	8.675	69,95	1,45
Kepulauan Sula	68,54	12,97	9,04	7.718	67,49	0,88
Halmahera Selatan	70,25	13,03	8,17	7.883	67,55	1,15
Halmahera Utara	71,74	13,68	8,65	8.152	69,79	0,95
Halmahera Timur	71,36	12,87	8,66	8.650	69,48	1,25
Pulau Morotai	70,81	12,99	7,55	7.141	65,93	1,45
Pulau Taliabu	67,04	12,87	7,97	6.939	64,31	1,04
Kota Ternate	72,55	15,78	12,07	14.042	81,79	0,63
Kota Tidore Kepulauan	72,20	14,48	9,97	9.034	73,40	1,14
PAPUA BARAT	68,51	13,34	7,93	8.404	67,47	1,12
Fakfak	71,44	14,78	9,17	7.851	70,85	0,84
Kaimana	68,96	12,50	8,80	8.749	68,31	0,87
Teluk Wondama	65,32	11,90	7,27	8.490	63,84	1,30
Teluk Bintuni	67,75	12,44	8,51	10.324	69,01	1,05
Manokwari	72,25	13,78	8,54	12.566	74,52	0,81
Sorong Selatan	67,11	13,28	7,62	6.727	63,98	1,35
Sorong	69,88	13,92	8,61	7.984	68,89	1,16
Raja Ampat	66,98	12,11	8,24	8.483	66,00	0,90
Tambrauw	65,70	12,36	5,71	5.302	57,53	1,61
Maybrat	65,82	13,49	7,32	5.669	61,29	1,32
Manokwari Selatan	68,09	12,56	6,96	5.948	61,55	1,43
Pegunungan Arfak	67,71	11,79	5,51	5.438	57,82	1,42
Kota Sorong	72,83	14,42	11,50	14.133	80,11	0,81
PAPUA	68,17	11,15	7,15	7.562	63,01	1,37
Merauke	71,27	14,47	9,25	10.747	74,00	1,29
Jayawijaya	69,79	12,84	5,98	8.159	64,81	1,50
Jayapura	70,23	14,58	10,32	10.671	74,74	1,11
Nabire	69,82	12,64	10,33	9.381	71,36	1,28
Kepulauan Yapen	70,72	12,81	9,70	8.091	69,62	0,99
Biak Numfor	70,75	14,22	10,54	10.229	74,45	0,79

Lanjutan Lampiran 2

Provinsi/Kabupaten/Kota	UHH ¹ (tahun)	HLS ² (tahun)	RLS ³ (tahun)	Pengeluaran ⁴ (ribu rupiah)	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Paniai	69,49	10,53	4,79	6.977	58,83	1,34
Puncak Jaya	67,77	7,51	4,23	5.731	51,49	1,96
Mimika	72,83	12,96	10,47	12.076	75,91	1,11
Boven Digoel	68,90	11,43	9,25	8.396	67,32	1,49
Mappi	66,23	11,04	6,95	6.821	60,71	1,61
Asmat	67,84	9,70	5,58	6.057	56,85	1,88
Yahukimo	66,42	8,04	4,34	5.351	51,19	1,87
Pegunungan Bintang	65,93	6,78	3,37	5.849	48,51	2,04
Tolikara	67,03	9,02	3,68	5.397	51,74	1,91
Sarmi	69,68	12,33	9,36	7.204	67,00	1,38
Keerom	69,73	12,46	8,57	9.545	69,25	1,29
Waropen	69,54	12,84	9,41	7.335	67,67	1,18
Supiori	69,37	13,19	9,20	6.259	65,84	1,48
Mamberamo Raya	68,75	11,83	6,28	5.105	58,49	1,85
Nduga	63,88	4,33	1,71	4.352	37,68	3,20
Lanny Jaya	67,19	9,27	3,71	4.751	50,81	1,88
Mamberamo Tengah	68,93	9,62	3,63	4.855	51,98	2,00
Yalimo	65,95	9,66	3,34	5.015	50,87	1,94
Puncak	66,77	5,59	2,19	5.975	44,71	1,64
Dogiyai	66,49	10,62	4,97	6.182	56,74	1,74
Intan Jaya	66,68	7,69	3,27	6.140	50,39	1,90
Deiyai	66,52	9,85	3,27	5.104	51,40	1,50
Kota Jayapura	71,76	15,26	11,84	15.272	81,51	0,60
INDONESIA	73,93	13,15	8,77	11.899	74,39	0,84

Catatan: ¹UHH: Umur Harapan Hidup saat Lahir hasil LF SP2020

²HLS: Harapan Lama Sekolah

³RLS: Rata-rata Lama Sekolah

⁴Pengeluaran: Pengeluaran per Kapita Riil per Tahun yang Disesuaikan

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi, 2020–2023

Provinsi (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Aceh	73,29	73,48	74,11	74,70
Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64
Riau	73,67	73,89	74,45	74,95
Jambi	72,29	72,62	73,11	73,73
Sumatera Selatan	71,62	71,83	72,48	73,18
Bengkulu	72,93	73,16	73,68	74,30
Lampung	71,04	71,25	71,79	72,48
Kepulauan Bangka Belitung	72,74	72,96	73,50	74,09
Kepulauan Riau	77,69	77,87	78,48	79,08
DKI Jakarta	81,92	82,25	82,77	83,55
Jawa Barat	72,61	72,96	73,63	74,24
Jawa Tengah	71,88	72,17	72,80	73,39
D.I. Yogyakarta	79,95	80,22	80,65	81,09
Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65
Banten	74,41	74,68	75,25	75,77
Bali	76,52	76,69	77,40	78,01
Nusa Tenggara Barat	70,46	70,86	71,65	72,37
Nusa Tenggara Timur	66,93	67,02	67,63	68,40
Kalimantan Barat	68,76	68,99	69,71	70,47
Kalimantan Tengah	72,62	72,81	73,17	73,73
Kalimantan Selatan	73,09	73,45	74,00	74,66
Kalimantan Timur	75,94	76,60	77,36	78,20
Kalimantan Utara	71,00	71,57	72,21	72,88
Sulawesi Utara	73,67	74,03	74,52	75,04
Sulawesi Tengah	70,31	70,54	71,01	71,66
Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60
Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94
Gorontalo	69,51	69,82	70,62	71,25
Sulawesi Barat	68,40	68,64	69,19	69,80
Maluku	71,34	71,55	72,04	72,75
Maluku Utara	69,30	69,56	70,26	70,98
Papua Barat	65,94	66,11	66,72	67,47
Papua	61,22	61,40	62,16	63,01
INDONESIA	72,81	73,16	73,77	74,39

Catatan: IPM dihitung menggunakan UHH hasil LF SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota, 2020–2023

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
ACEH	73,29	73,48	74,11	74,70
Simeulue	67,90	68,29	69,17	69,98
Aceh Singkil	69,92	70,21	70,61	71,14
Aceh Selatan	69,79	70,12	70,56	71,14
Aceh Tenggara	71,21	71,28	72,18	72,93
Aceh Timur	69,02	69,22	70,13	70,73
Aceh Tengah	75,07	75,20	75,79	76,45
Aceh Barat	73,11	73,41	74,09	74,62
Aceh Besar	75,00	75,03	75,44	75,98
Pidie	71,92	71,99	72,49	72,95
Bireuen	73,22	73,27	74,10	74,56
Aceh Utara	70,95	71,08	71,85	72,50
Aceh Barat Daya	69,12	69,37	69,79	70,47
Gayo Lues	69,06	69,42	70,12	70,82
Aceh Tamiang	70,87	71,12	72,08	73,02
Nagan Raya	70,54	70,67	71,46	72,15
Aceh Jaya	71,30	71,39	71,92	72,44
Bener Meriah	74,54	74,84	75,46	76,06
Pidie Jaya	74,44	74,84	75,59	76,04
Kota Banda Aceh	87,06	87,36	87,92	88,32
Kota Sabang	76,96	77,29	78,03	78,70
Kota Langsa	79,30	79,58	79,96	80,50
Kota Lhokseumawe	78,65	78,92	79,38	80,26
Kota Subulussalam	67,39	67,75	68,72	69,66
SUMATERA UTARA	73,62	73,84	74,51	75,13
Nias	62,55	63,37	64,30	65,15
Mandailing Natal	70,89	71,31	72,17	72,65
Tapanuli Selatan	73,16	73,37	73,96	74,58
Tapanuli Tengah	71,10	71,48	72,18	72,77
Tapanuli Utara	75,77	76,06	76,43	76,86
Toba Samosir	76,81	77,03	77,58	77,83
Labuhan Batu	73,08	73,16	73,96	74,70
Asahan	72,35	72,55	73,18	73,59
Simalungun	74,19	74,33	74,68	75,17
Dairi	73,63	73,89	74,60	75,18
Karo	75,40	75,81	76,37	76,88
Deli Serdang	76,11	76,21	76,86	77,16
Langkat	73,14	73,50	74,03	74,33
Nias Selatan	62,78	63,24	64,05	64,98
Humbang Hasundutan	70,70	71,28	72,05	72,49
Pakpak Bharat	70,30	70,65	71,57	72,30

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Samosir	71,56	71,75	72,57	72,93
Serdang Bedagai	71,93	72,25	72,89	73,40
Batu Bara	70,57	70,80	71,75	72,56
Padang Lawas Utara	71,69	71,96	72,77	73,45
Padang Lawas	70,08	70,48	71,41	72,16
Labuhan Batu Selatan	72,86	73,15	73,59	74,23
Labuhan Batu Utara	73,47	73,73	74,61	75,45
Nias Utara	63,17	63,63	64,55	65,44
Nias Barat	62,58	63,05	63,96	64,68
Kota Sibolga	75,56	75,87	76,69	77,07
Kota Tanjung Balai	73,48	73,78	74,73	75,42
Kota Pematang Siantar	78,75	79,17	79,71	80,46
Kota Tebing Tinggi	76,40	76,65	77,39	78,17
Kota Medan	81,31	81,58	82,13	82,61
Kota Binjai	76,45	76,57	77,50	78,11
Kota Padangsidimpuan	76,93	77,19	77,73	78,10
Kota Gunungsitoli	70,22	70,51	71,11	71,55
SUMATERA BARAT	74,29	74,56	75,16	75,64
Kepulauan Mentawai	63,71	63,98	64,83	65,79
Pesisir Selatan	70,87	71,01	71,72	72,24
Solok	70,44	70,60	71,39	71,92
Sijunjung	70,36	70,48	71,32	72,30
Tanah Datar	74,01	74,14	74,87	75,57
Padang Pariaman	72,80	72,92	73,67	74,54
Agam	73,11	73,20	73,84	74,44
Lima Puluh Kota	70,82	71,03	71,64	72,05
Pasaman	68,35	68,48	69,12	69,85
Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24
Dharmasraya	72,30	72,65	73,19	73,87
Pasaman Barat	70,30	70,57	71,39	72,03
Kota Padang	83,22	83,30	83,69	83,98
Kota Solok	78,41	78,53	79,35	79,66
Kota Sawah Lunto	73,97	74,35	75,21	75,91
Kota Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76
Kota Bukittinggi	80,68	80,79	81,52	81,88
Kota Payakumbuh	79,06	79,24	79,70	80,14
Kota Pariaman	78,55	78,72	79,31	79,76
RIAU	73,67	73,89	74,45	74,95
Kuantan Singingi	72,12	72,40	72,78	73,35
Indragiri Hulu	70,98	71,25	71,69	72,28
Indragiri Hilir	68,43	68,49	69,12	69,64
Pelalawan	72,77	73,28	74,15	74,69

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Siak	74,72	75,03	75,53	75,97
Kampar	74,23	74,41	75,21	75,59
Rokan Hulu	70,95	71,19	71,70	72,28
Bengkalis	74,49	74,60	75,38	75,96
Rokan Hilir	70,42	70,61	71,35	71,98
Kepulauan Meranti	67,39	67,59	68,31	68,96
Kota Pekanbaru	82,67	82,93	83,38	83,67
Kota Dumai	75,34	75,67	76,20	76,45
JAMBI	72,29	72,62	73,11	73,73
Kerinci	72,47	72,72	73,24	73,77
Merangin	70,20	70,55	70,98	71,81
Sarolangun	71,63	72,02	72,66	73,05
Batang Hari	71,34	71,61	71,99	72,50
Muaro Jambi	70,41	70,79	71,41	72,26
Tanjung Jabung Timur	67,58	68,09	68,96	69,85
Tanjung Jabung Barat	69,62	70,26	70,88	71,44
Tebo	70,51	70,73	71,14	71,99
Bungo	72,46	72,70	73,08	73,57
Kota Jambi	79,19	79,94	80,38	80,93
Kota Sungai Penuh	76,02	76,30	76,75	77,20
SUMATERA SELATAN	71,62	71,83	72,48	73,18
Ogan Komering Ulu	71,50	71,79	72,41	73,17
Ogan Komering Ilir	68,96	69,33	70,17	70,80
Muara Enim	70,84	70,95	71,52	72,33
Lahat	70,48	70,62	71,45	72,15
Musi Rawas	69,05	69,26	70,04	70,52
Musi Banyuasin	69,83	70,25	70,73	71,30
Banyu Asin	68,76	69,15	69,95	70,67
Ogan Komering Ulu Selatan	67,81	67,85	68,33	69,05
Ogan Komering Ulu Timur	71,37	71,68	72,33	73,05
Ogan Ilir	70,29	70,40	71,20	72,01
Empat Lawang	67,64	67,77	68,39	69,07
Penukal Abab Lematang Ilir	66,84	67,03	67,89	68,78
Musi Rawas Utara	67,48	67,94	68,76	69,63
Kota Palembang	80,08	80,46	81,19	81,72
Kota Prabumulih	76,19	76,30	77,14	78,07
Kota Pagar Alam	71,10	71,47	72,40	73,25
Kota Lubuklinggau	76,99	77,09	77,71	78,36
BENGKULU	72,93	73,16	73,68	74,30
Bengkulu Selatan	72,81	72,93	73,58	74,06
Rejang Lebong	72,51	72,85	73,54	74,43
Bengkulu Utara	70,81	71,28	71,76	72,27

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Kaur	69,52	69,71	70,30	70,92
Seluma	68,87	69,00	69,74	70,27
Mukomuko	71,47	71,67	72,15	73,00
Lebong	71,20	71,67	72,35	72,95
Kepahiang	69,91	70,38	70,85	71,38
Bengkulu Tengah	69,42	69,78	70,29	70,81
Kota Bengkulu	82,31	82,49	82,93	83,38
LAMPUNG	71,04	71,25	71,79	72,48
Lampung Barat	70,47	70,55	71,01	71,72
Tanggamus	68,58	68,79	69,32	69,93
Lampung Selatan	70,36	70,48	70,95	71,55
Lampung Timur	70,62	70,91	71,82	72,44
Lampung Tengah	71,97	72,04	72,59	73,39
Lampung Utara	69,58	69,78	70,19	70,78
Way Kanan	69,33	69,46	69,92	70,51
Tulangbawang	70,07	70,28	71,08	71,56
Pesawaran	67,70	68,04	68,55	69,46
Pringsewu	72,04	72,14	72,57	73,11
Mesuji	65,83	66,24	67,12	67,79
Tulang Bawang Barat	67,51	67,76	68,70	69,38
Pesisir Barat	68,43	68,79	69,58	70,40
Kota Bandar Lampung	78,78	78,93	79,33	79,86
Kota Metro	78,69	78,99	79,38	79,85
KEP. BANGKA BELITUNG	72,74	72,96	73,50	74,09
Bangka	73,06	73,13	73,62	74,34
Belitung	72,97	73,01	73,83	74,49
Bangka Barat	69,75	70,28	70,79	71,13
Bangka Tengah	71,11	71,55	72,06	72,36
Bangka Selatan	68,10	68,24	69,12	69,67
Belitung Timur	71,40	71,91	72,76	73,31
Kota Pangkal Pinang	78,76	79,12	79,77	80,45
KEPULAUAN RIAU	77,69	77,87	78,48	79,08
Karimun	72,85	73,11	73,96	74,70
Bintan	76,04	76,48	76,80	77,50
Natuna	77,03	77,33	77,59	78,23
Lingga	70,38	70,82	71,48	72,23
Kepulauan Anambas	71,50	71,86	72,15	72,80
Kota Batam	81,81	81,82	82,25	82,64
Kota Tanjung Pinang	79,96	79,98	80,58	81,14
DKI JAKARTA	81,92	82,25	82,77	83,55
Kepulauan Seribu	74,19	74,65	75,34	75,91
Kota Jakarta Selatan	85,40	85,58	85,87	86,71

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Kota Jakarta Timur	82,84	83,14	83,60	84,26
Kota Jakarta Pusat	82,22	82,38	82,90	83,29
Kota Jakarta Barat	82,33	82,70	83,43	83,85
Kota Jakarta Utara	81,04	81,26	81,56	81,85
JAWA BARAT	72,61	72,96	73,63	74,24
Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02
Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71
Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18
Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03
Garut	67,20	67,53	68,51	69,22
Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38
Ciamis	71,57	72,00	72,52	73,12
Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99
Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81
Majalengka	69,20	69,42	70,18	70,76
Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02
Indramayu	68,25	68,60	69,52	70,19
Subang	69,66	69,84	70,54	71,42
Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43
Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25
Bekasi	74,47	74,84	75,60	76,13
Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33
Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57
Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36
Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16
Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29
Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45
Kota Bekasi	81,50	81,99	82,52	83,06
Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53
Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69
Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47
Kota Banjar	73,08	73,30	73,93	74,45
JAWA TENGAH	71,88	72,17	72,80	73,39
Cilacap	70,19	70,66	71,22	72,04
Banyumas	72,13	72,59	73,30	73,96
Purbalingga	69,23	69,41	69,80	70,51
Banjarnegara	67,46	67,87	68,62	69,16
Kebumen	70,32	70,56	71,29	71,88
Purworejo	72,76	73,06	73,67	74,35
Wonosobo	69,04	69,24	69,69	70,18
Magelang	69,98	70,23	70,96	71,56
Boyolali	74,25	74,40	74,97	75,41

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Klaten	75,56	76,12	76,95	77,59
Sukoharjo	76,98	77,13	77,94	78,65
Wonogiri	70,25	70,49	71,04	71,97
Karanganyar	75,86	75,99	76,58	77,31
Sragen	73,95	74,08	74,65	75,10
Grobogan	69,87	70,41	70,97	71,49
Blora	68,84	69,37	69,95	70,63
Rembang	70,02	70,43	71,00	71,89
Pati	71,77	72,28	73,14	73,59
Kudus	75,00	75,16	75,89	76,71
Jepara	71,99	72,36	73,15	73,85
Demak	72,22	72,57	73,36	74,07
Semarang	74,10	74,24	74,67	75,13
Temanggung	69,57	69,88	70,77	71,33
Kendal	72,29	72,50	73,19	73,86
Batang	68,65	68,92	69,45	70,20
Pekalongan	69,64	70,11	70,81	71,45
Pemalang	66,40	66,64	67,26	68,08
Tegal	69,28	69,67	70,42	71,12
Brebes	67,90	68,10	68,81	69,71
Kota Magelang	78,99	79,43	80,39	81,17
Kota Surakarta	82,21	82,62	83,08	83,54
Kota Salatiga	83,14	83,60	84,35	84,99
Kota Semarang	83,05	83,55	84,08	84,43
Kota Pekalongan	74,98	75,40	75,90	76,71
Kota Tegal	75,14	75,59	76,21	77,06
D.I. YOGYAKARTA	79,95	80,22	80,65	81,09
Kulon Progo	74,48	74,73	75,48	75,82
Bantul	80,36	80,63	81,04	81,74
Gunung Kidul	70,18	70,37	71,18	71,46
Sleman	83,92	84,08	84,40	84,86
Kota Yogyakarta	86,93	87,50	88,00	88,61
JAWA TIMUR	73,04	73,48	74,05	74,65
Pacitan	69,28	69,45	70,19	70,94
Ponorogo	71,57	71,81	72,59	73,18
Trenggalek	70,10	70,40	71,28	71,96
Tulungagung	73,15	73,29	74,14	74,65
Blitar	71,02	71,48	72,25	72,84
Kediri	72,80	73,31	74,20	74,68
Malang	71,24	71,48	72,23	73,00
Lumajang	67,04	67,65	68,48	69,37
Jember	69,01	69,20	69,80	70,42

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Banyuwangi	71,85	72,62	73,15	73,79
Bondowoso	69,10	69,24	69,91	70,56
Situbondo	68,94	69,34	69,76	70,65
Probolinggo	68,77	68,94	69,56	70,36
Pasuruan	70,20	70,54	71,29	71,91
Sidoarjo	80,65	81,01	81,37	81,88
Mojokerto	74,58	74,90	75,61	76,23
Jombang	73,63	74,10	74,66	75,16
Nganjuk	72,78	73,03	73,95	74,70
Madiun	72,94	73,07	73,51	74,02
Magetan	74,85	75,08	75,76	76,30
Ngawi	71,49	71,97	72,62	73,28
Bojonegoro	70,18	70,70	71,15	71,80
Tuban	69,60	70,10	70,79	71,40
Lamongan	73,44	73,97	74,83	75,29
Gresik	76,59	76,98	77,62	78,44
Bangkalan	65,17	65,42	66,11	66,82
Sampang	64,75	64,86	65,44	66,19
Pamekasan	68,65	68,78	69,35	70,32
Sumenep	67,15	67,74	68,49	69,13
Kota Kediri	78,78	79,15	80,12	80,97
Kota Blitar	78,88	79,27	80,15	80,78
Kota Malang	82,19	82,77	83,38	84,00
Kota Probolinggo	74,81	75,20	76,08	76,93
Kota Pasuruan	76,47	76,83	77,71	78,30
Kota Mojokerto	78,95	79,34	80,19	80,90
Kota Madiun	81,93	82,27	83,02	83,71
Kota Surabaya	82,76	82,94	83,32	83,99
Kota Batu	76,82	77,21	78,13	79,07
BANTEN	74,41	74,68	75,25	75,77
Pandeglang	68,86	69,02	69,70	70,28
Lebak	66,39	66,50	67,19	67,68
Tangerang	74,09	74,47	75,15	75,56
Serang	70,93	71,05	71,99	72,63
Kota Tangerang	79,83	80,08	80,44	80,98
Kota Cilegon	76,80	77,11	77,68	78,24
Kota Serang	75,25	75,53	76,01	76,43
Kota Tangerang Selatan	82,73	82,98	83,28	83,57
BALI	76,52	76,69	77,40	78,01
Jembrana	73,18	73,57	74,38	74,80
Tabanan	76,67	76,95	77,22	77,87
Badung	81,60	81,84	82,13	83,00

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Gianyar	77,88	78,21	78,87	79,69
Klungkung	72,97	72,98	73,77	74,18
Bangli	70,60	70,60	71,47	71,99
Karangasem	68,50	68,58	69,48	70,09
Buleleng	73,60	73,60	74,48	74,87
Kota Denpasar	83,95	84,04	84,39	84,68
NUSA TENGGARA BARAT	70,46	70,86	71,65	72,37
Lombok Barat	70,23	70,64	71,44	72,18
Lombok Tengah	68,32	68,70	69,57	70,41
Lombok Timur	68,54	68,90	69,83	70,65
Sumbawa	69,43	69,82	70,71	71,68
Dompu	69,65	70,27	70,96	71,77
Bima	68,36	68,72	69,63	70,33
Sumbawa Barat	73,34	73,54	74,34	74,84
Lombok Utara	65,80	66,14	67,09	68,02
Kota Mataram	80,02	80,24	80,67	81,15
Kota Bima	76,74	77,03	77,75	78,24
NUSA TENGGARA TIMUR	66,93	67,02	67,63	68,40
Sumba Barat	65,13	65,44	66,03	66,82
Sumba Timur	68,20	68,42	68,82	69,63
Kupang	66,00	66,08	66,72	67,51
Timor Tengah Selatan	63,97	63,97	64,54	65,39
Timor Tengah Utara	64,93	65,09	65,65	66,56
Belu	66,32	66,40	66,87	67,50
Alor	65,13	65,16	66,08	66,82
Lembata	67,04	67,04	67,76	68,41
Flores Timur	67,64	67,63	68,36	69,24
Sikka	67,77	68,08	68,66	69,41
Ende	70,23	70,49	71,10	71,77
Ngada	70,37	70,37	70,73	71,61
Manggarai	66,58	67,07	67,88	68,48
Rote Ndao	64,27	64,48	65,05	65,79
Manggarai Barat	65,91	66,19	66,95	67,84
Sumba Tengah	61,74	62,01	62,84	63,63
Sumba Barat Daya	62,28	62,29	63,15	63,74
Nagekeo	67,77	67,77	68,17	69,03
Manggarai Timur	62,64	63,17	64,11	65,05
Sabu Raijua	59,46	59,46	60,35	61,37
Malaka	62,76	62,97	63,84	64,50
Kota Kupang	81,91	81,93	82,37	82,77
KALIMANTAN BARAT	68,76	68,99	69,71	70,47
Sambas	68,97	69,03	69,88	70,60

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Bengkayang	67,87	68,04	68,74	69,53
Landak	66,10	66,33	67,28	68,22
Mempawah	66,71	67,00	67,91	68,91
Sanggau	66,73	67,18	67,87	68,73
Ketapang	68,13	68,39	68,86	69,61
Sintang	67,61	67,66	68,59	69,39
Kapuas Hulu	65,92	65,98	66,91	67,86
Sekadau	65,33	65,48	66,13	66,83
Melawi	65,74	66,06	66,99	67,92
Kayong Utara	63,97	64,18	65,09	66,06
Kubu Raya	68,89	69,09	69,83	70,50
Kota Pontianak	80,10	80,59	81,10	81,63
Kota Singkawang	72,73	72,90	73,66	74,13
KALIMANTAN TENGAH	72,62	72,81	73,17	73,73
Kotawaringin Barat	73,95	74,15	74,39	74,92
Kotawaringin Timur	73,18	73,25	73,45	73,99
Kapuas	71,18	71,34	71,72	72,40
Barito Selatan	72,73	73,05	73,45	74,01
Barito Utara	71,44	71,64	72,16	72,71
Sukamara	69,04	69,28	69,86	70,35
Lamandau	72,21	72,28	72,81	73,44
Seruyan	69,22	69,31	69,81	70,24
Katingan	72,45	72,66	73,43	73,90
Pulang Pisau	70,57	70,65	71,05	71,62
Gunung Mas	72,00	72,22	72,50	73,18
Barito Timur	73,09	73,17	73,69	74,21
Murung Raya	69,54	69,67	70,13	70,91
Kota Palangka Raya	81,17	81,22	81,47	81,95
KALIMANTAN SELATAN	73,09	73,45	74,00	74,66
Tanah Laut	71,36	71,86	72,33	72,98
Kota Baru	70,68	70,94	71,57	72,01
Banjar	71,67	72,40	73,25	74,01
Barito Kuala	68,65	69,08	69,87	70,67
Tapin	71,71	71,90	72,61	73,52
Hulu Sungai Selatan	71,57	71,93	72,47	73,21
Hulu Sungai Tengah	71,45	71,67	72,32	72,76
Hulu Sungai Utara	69,09	69,63	70,33	71,12
Tabalong	73,84	74,25	74,82	75,43
Tanah Bumbu	72,26	72,55	73,34	73,86
Balangan	71,28	71,58	72,20	72,97
Kota Banjarmasin	78,62	79,09	79,46	79,98
Kota Banjar Baru	80,26	80,41	80,82	81,25

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
KALIMANTAN TIMUR	75,94	76,60	77,36	78,20
Paser	72,43	73,34	73,85	74,56
Kutai Barat	71,42	72,31	73,16	73,97
Kutai Kartanegara	74,19	74,69	75,31	75,95
Kutai Timur	73,32	74,15	74,69	75,33
Berau	75,19	75,69	76,24	76,71
Penajam Paser Utara	72,40	73,01	73,56	74,33
Mahakam Ulu	67,50	68,36	69,17	70,02
Kota Balikpapan	80,35	81,07	81,49	82,03
Kota Samarinda	80,39	81,05	81,72	82,61
Kota Bontang	80,06	80,65	81,00	81,63
KALIMANTAN UTARA	71,00	71,57	72,21	72,88
Malinau	72,73	73,12	73,55	74,00
Bulungan	71,56	72,27	72,56	73,20
Tana Tidung	67,79	68,59	69,45	70,06
Nunukan	66,50	67,18	67,88	68,43
Kota Tarakan	75,89	76,30	76,75	77,61
SULAWESI UTARA	73,67	74,03	74,52	75,04
Bolaang Mongondow	68,77	69,04	69,82	70,48
Minahasa	76,85	77,29	77,72	78,48
Kepulauan Sangihe	72,45	72,79	73,35	73,94
Kepulauan Talaud	70,51	70,94	71,53	72,22
Minahasa Selatan	73,74	73,94	74,50	75,25
Minahasa Utara	75,15	75,36	75,92	76,50
Bolaang Mongondow Utara	69,31	69,72	70,39	70,97
Siau Tagulandang Biaro	68,87	69,28	70,18	70,81
Minahasa Tenggara	71,62	72,16	72,56	72,97
Bolaang Mongondow Selatan	67,76	68,20	68,66	69,17
Bolaang Mongondow Timur	68,13	68,70	69,35	70,09
Kota Manado	80,26	80,53	80,96	81,40
Kota Bitung	75,37	75,46	75,94	76,33
Kota Tomohon	77,93	78,09	78,65	79,29
Kota Kotamobagu	74,59	75,09	75,56	76,01
SULAWESI TENGAH	70,31	70,54	71,01	71,66
Banggai Kepulauan	65,61	65,82	66,30	67,05
Banggai	71,01	71,09	71,58	72,19
Morowali	73,06	73,12	73,39	73,82
Poso	72,10	72,27	72,75	73,25
Donggala	66,80	66,96	67,49	68,17
Toli-Toli	67,70	68,31	68,77	69,68
Buol	68,49	68,92	69,37	70,18
Parigi Moutong	67,46	67,84	68,29	69,06

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Tojo Una-Una	66,67	66,81	67,62	68,47
Sigi	68,48	68,84	69,40	70,28
Banggai Laut	67,60	67,82	68,40	69,12
Morowali Utara	69,42	69,52	70,02	70,74
Kota Palu	82,74	82,96	83,26	83,71
SULAWESI SELATAN	73,08	73,38	73,96	74,60
Kepulauan Selayar	69,29	69,68	70,27	71,13
Bulukumba	71,37	72,02	72,75	73,64
Bantaeng	69,45	69,71	70,41	71,28
Jeneponto	67,22	67,54	68,13	68,95
Takalar	69,84	70,25	70,86	71,46
Gowa	71,58	71,74	72,44	73,01
Sinjai	69,86	70,02	70,60	71,20
Maros	71,77	72,32	72,92	73,56
Pangkajene dan Kepulauan	71,31	71,81	72,41	73,23
Barru	72,43	72,56	72,96	73,80
Bone	68,46	68,81	69,43	70,25
Soppeng	70,01	70,33	71,05	71,94
Wajo	71,57	72,05	72,69	73,56
Sidenreng Rappang	73,07	73,39	73,81	74,38
Pinrang	73,27	73,46	73,90	74,70
Enrekang	73,98	74,13	74,61	75,11
Luwu	71,58	71,92	72,42	73,23
Tana Toraja	69,05	69,78	70,16	71,01
Luwu Utara	71,53	71,99	72,48	73,31
Luwu Timur	74,71	74,83	75,41	75,84
Toraja Utara	69,80	70,22	70,83	71,69
Kota Makassar	83,58	84,00	84,45	84,85
Kota Parepare	79,20	79,56	79,87	80,36
Kota Palopo	79,39	79,72	80,24	80,77
SULAWESI TENGGARA	71,61	71,82	72,38	72,94
Buton	66,78	67,12	68,05	68,96
Muna	69,49	69,64	70,09	70,62
Konawe	72,44	72,58	73,14	73,88
Kolaka	74,45	74,56	74,98	75,73
Konawe Selatan	68,50	68,88	69,67	70,64
Bombana	66,73	66,93	67,49	68,12
Wakatobi	69,51	69,90	70,88	71,45
Kolaka Utara	69,40	69,60	70,47	71,11
Buton Utara	68,04	68,25	69,17	69,85
Konawe Utara	70,28	70,66	71,52	72,11
Kolaka Timur	67,06	67,79	68,77	69,61

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Konawe Kepulauan	66,20	66,52	67,49	68,11
Muna Barat	65,41	65,81	66,53	67,44
Buton Tengah	65,49	65,67	66,41	66,94
Buton Selatan	65,97	66,02	66,47	67,19
Kota Kendari	84,21	84,83	85,19	85,51
Kota Baubau	77,40	77,75	78,15	79,00
GORONTALO	69,51	69,82	70,62	71,25
Boalemo	66,50	67,02	67,86	68,78
Gorontalo	68,10	68,53	69,51	70,37
Pohuwato	67,49	67,93	68,67	69,30
Bone Bolango	70,50	70,76	71,39	71,97
Gorontalo Utara	66,29	66,64	67,41	68,00
Kota Gorontalo	77,13	77,41	78,22	78,64
SULAWESI BARAT	68,40	68,64	69,19	69,80
Majene	70,71	71,10	71,64	72,44
Polewali Mandar	67,47	67,85	68,42	69,24
Mamasa	66,36	66,97	67,53	68,14
Mamuju	69,64	69,80	70,35	71,07
Pasangkayu	69,12	69,37	69,94	70,42
Mamuju Tengah	65,92	66,38	67,07	67,63
MALUKU	71,34	71,55	72,04	72,75
Maluku Tenggara Barat	65,75	65,85	66,33	67,04
Maluku Tenggara	68,57	68,69	69,23	69,91
Maluku Tengah	73,20	73,27	73,73	74,34
Buru	70,55	70,93	71,52	72,11
Kepulauan Aru	66,88	66,99	67,36	68,19
Seram Bagian Barat	69,68	69,90	70,76	71,68
Seram Bagian Timur	68,11	68,29	69,05	69,84
Maluku Barat Daya	64,66	65,14	65,84	66,71
Buru Selatan	66,14	66,25	66,81	67,68
Kota Ambon	81,69	82,07	82,44	82,84
Kota Tual	70,24	70,44	70,85	71,67
MALUKU UTARA	69,30	69,56	70,26	70,98
Halmahera Barat	66,96	67,20	67,84	68,56
Halmahera Tengah	67,97	68,38	68,95	69,95
Kepulauan Sula	65,72	65,99	66,90	67,49
Halmahera Selatan	65,42	65,88	66,78	67,55
Halmahera Utara	68,26	68,58	69,13	69,79
Halmahera Timur	67,47	67,70	68,62	69,48
Pulau Morotai	63,69	64,09	64,99	65,93
Pulau Taliabu	62,50	62,75	63,65	64,31
Kota Ternate	80,32	80,63	81,28	81,79

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Kota Tidore Kepulauan	71,57	72,04	72,57	73,40
PAPUA BARAT	65,94	66,11	66,72	67,47
Fakfak	69,53	69,69	70,26	70,85
Kaimana	66,61	66,92	67,72	68,31
Teluk Wondama	62,36	62,48	63,02	63,84
Teluk Bintuni	67,59	67,67	68,29	69,01
Manokwari	73,36	73,36	73,92	74,52
Sorong Selatan	62,49	62,52	63,13	63,98
Sorong	67,17	67,19	68,10	68,89
Raja Ampat	64,67	64,69	65,41	66,00
Tambrau	55,46	55,71	56,62	57,53
Maybrat	59,52	59,70	60,49	61,29
Manokwari Selatan	59,84	59,85	60,68	61,55
Pegunungan Arfak	56,33	56,13	57,01	57,82
Kota Sorong	79,00	79,01	79,47	80,11
PAPUA	61,22	61,40	62,16	63,01
Merauke	71,92	72,33	73,06	74,00
Jayawijaya	62,16	62,85	63,85	64,81
Jayapura	72,97	73,29	73,92	74,74
Nabire	69,34	69,66	70,46	71,36
Kepulauan Yapen	68,22	68,27	68,94	69,62
Biak Numfor	73,23	73,36	73,87	74,45
Paniai	57,21	57,60	58,05	58,83
Puncak Jaya	49,01	49,64	50,50	51,49
Mimika	74,19	74,48	75,08	75,91
Boven Digoel	65,29	65,38	66,33	67,32
Mappi	58,27	58,83	59,75	60,71
Asmat	53,99	54,80	55,80	56,85
Yahukimo	49,37	49,48	50,25	51,19
Pegunungan Bintang	45,77	46,61	47,54	48,51
Tolikara	49,77	49,87	50,77	51,74
Sarmi	64,86	65,17	66,09	67,00
Keerom	67,54	67,62	68,37	69,25
Waropen	66,16	66,32	66,88	67,67
Supiori	63,53	63,94	64,88	65,84
Mamberamo Raya	56,02	56,45	57,43	58,49
Nduga	33,74	35,13	36,51	37,68
Lanny Jaya	48,12	48,93	49,87	50,81
Mamberamo Tengah	49,19	49,97	50,96	51,98
Yalimo	48,34	49,01	49,90	50,87
Puncak	43,18	43,31	43,99	44,71
Dogiyai	54,90	55,05	55,77	56,74

Lanjutan Lampiran 4

Provinsi/Kabupaten/Kota (1)	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Intan Jaya	47,99	48,55	49,45	50,39
Deiyai	49,69	50,19	50,64	51,40
Kota Jayapura	80,38	80,55	81,02	81,51
INDONESIA	72,81	73,16	73,77	74,39

Catatan: IPM dihitung menggunakan UHH hasil LF SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

<https://www.bps.go.id>

Lampiran 5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-negara Anggota ASEAN, 1990–2022

Rank IPM (2022)	Negara	1990	2000	2010	2015	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Singapura	0,780	0,863	0,921	0,935	0,942	0,945	0,942	0,942	0,949
55	Brunei Darussalam	0,779	0,789	0,825	0,832	0,826	0,827	0,827	0,824	0,823
63	Malaysia	0,649	0,726	0,768	0,792	0,802	0,805	0,802	0,798	0,807
66	Thailand	0,581	0,663	0,743	0,789	0,796	0,801	0,800	0,797	0,803
107	Viet Nam	0,492	0,599	0,676	0,697	0,711	0,717	0,726	0,718	0,726
112	Indonesia	0,526	0,597	0,667	0,698	0,712	0,718	0,712	0,707	0,713
113	Filipina	0,598	0,635	0,673	0,696	0,706	0,714	0,705	0,692	0,710
139	Laos	0,408	0,473	0,557	0,604	0,613	0,617	0,616	0,615	0,620
144	Kamboja	0,333	0,407	0,506	0,557	0,595	0,608	0,615	0,599	0,608
148	Myanmar	0,379	0,431	0,542	0,564	0,588	0,596	0,596	0,596	0,600

Catatan: IPM yang dihitung oleh UNDP memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1

Sumber: <https://hdr.undp.org/data-center/documentation-and-downloads>

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291, Faks. (021) 3857046

Homepage: <https://bps.go.id> Email: bpshq@bps.go.id

ISSN 2086-2369

